

BUKU I

**BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN
(B P P)**

AUDIT BERBASIS RISIKO

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU



BANK MALUKU

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU

NOMOR : DIR/131/KP

Tentang

**PEDOMAN AUDIT BERBASIS RISIKO (RISK BASED AUDIT) DAN
BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) PROFIL RISIKO CABANG
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU.**

DIREKSI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU

Menimbang : a. bahwa guna terselenggaranya kegiatan Audit Intern Bank, diperlukan adanya Pedoman Pelaksanaan Audit.

b. bahwa Pedoman Pelaksanaan Audit tersebut merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh Satuan Kerja Audit Intern.

c. bahwa Pedoman Audit Berbasis Risiko (Risk Based Audit) sesuai SK Direksi Nomor : DIR/120/KP tanggal 21 Desember 2005 perlu direview dan disempurnakan, sejalan dengan perkembangan operasional Bank.

d. Bahwa Penyempurnaan Pedoman Audit Berbasis Risiko (Risk Based Audit) perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Direksi.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor : 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 182), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 10 tahun 1998 (Lembaran Negara RI tahun 1998 Nomor : 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3790) tentang Perbankan.

2. Undang-Undang Nomor : 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT),

3. Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 27 Tanggal 19 Juli 1999.

pt.

4. Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor: 04/RUPS-LB/PT-BPDM/2011 tanggal 27 Januari 2011 tentang Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.
5. Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : 07/RUPS/PT.BPDM/2009 tanggal 24 Mei 2009 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.

Memperhatikan :

1. Peraturan Bank Indonesia, Nomor : 1/6/PBI//1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standart Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.
2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standart Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.
3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 6/4/DASP tanggal 31 Maret 2004 perihal : Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Tertulis Laporan Pemeriksaan Internal serta Laporan Hasil Security Audit.
4. Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009.
5. Surat Edaran bank Indonesia No. 3/23/DPNP tanggal 25 oktober 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
6. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor : DIR/112/KP tanggal 16 November 2005 tentang Good Corporate Governance (GCG)
7. Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. : 89/DK/2012 Tanggal 28 Desember 2012
8. Hasil Kajian Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Nomor Resgiter : SP/118/2012 Tanggal 31 Desember 2012.

g.

MEMUTUSKAN

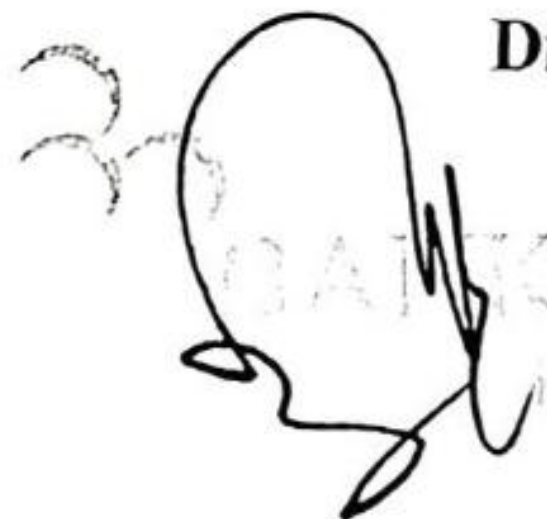
- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU TENTANG PERUBAHAN PEDOMAN AUDIT BERBASIS RISIKO (RISK BASED AUDIT).
- Pertama : Pedoman Audit Berbasis Risiko (Risk Based Audit) Bank Maluku diterbitkan dalam bentuk Buku Pedoman Perusahaan (BPP) yang terdiri dari :
1. Buku I : Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Risk Based Audit (RBA) Bank Maluku
 2. Buku II : Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Profil Risiko Cabang.
- Kedua : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi Nomor : DIR/120/KP tanggal 21 Desember 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 31 Desember 2012

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU

Direksi,



D. Soplat
Direktur Utama



H. H. H. H.
Direktur Keuangan

 BANK MALUKU <i>Solo Maluku</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP Tanggal 31/12/2012	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	<i>Hal.</i> 1
NAMA BAB			

BUKU I

BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN

(BPP)

AUDIT BERBASIS RISIKO

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU

 BANK MALUKU <i>Saka Melaprei</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP Tanggal 31/12/2012	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	Hal. 2
NAMA BAB			
DAFTAR ISI			
BUKU I : PEDOMAN PERUSAHAAN AUDIT BERBASIS RISIKO			1
DAFTAR ISI			2
BAB I INTERNAL AUDIT CHARTER			
A. PENDAHULUAN			4
B. MISI DAN TUJUAN SKAI			4
C. CAKUPAN TUGAS SKAI			5
D. AKUNTABILITAS			5
E. INDEPENDENSI SKAI			6
F. TANGGUNG JAWAB SKAI			6
BAB II PENDAHULUAN			
A. LATAR BELAKANG			9
B. LANDASAN HUKUM			10
C. PENGERTIAN			10
BAB III KETENTUAN UMUM			
A. PROSES PENYUSUNAN			15
B. JENIS PENGAWASAN			28
C. PRINSIP PENGAWASAN			33
BAB IV AUDIT INTERN			
A. PERBEDAAN PENDEKATAN AUDIT INTERNAL DAN EKSTERNAL			36
B. METODE AUDIT			37
C. SARANA AUDIT			38
D. PROSES KEGIATAN AUDIT			41

 BANK MALUKU <i>Solo Rileksi</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP Tanggal 31/12/2012	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	Hal. 3
NAMA BAB			
BAB V PERSIAPAN AUDIT			
A. PERANCANAAN			42
B. SOURCES /SUMBER DATA UNTUK PENGKAJIAN RISIKO			43
C. PROSES PENGKAJIAN RISIKO			44
D. PERENCANAAN AUDIT DENGAN PENDEKATAN BERBASIS RISIKO			46
E. RISK ASSESMENT STRUCTURE			55
F. PENILAIAN TERHADAP PROFIL RISIKO			57
G. PROGRAM KERJA AUDIT TAHUNAN (PKAT)			59
BAB VI PELAKSANAAN AUDIT			
A. TAHAP PELAKSANAAN			63
B. TEMUAN AUDIT			68
C. DISKUSI AUDIT			74
BAB VII LAPORAN HASIL AUDIT			
LAPORAN KEPADA PIHAK INTERN DAN EKTERN			76
LAMPIRAN-LAMPIRAN			
A. PROFIL RISIKO CABANG			79 - 126
B. PETUNJUK PENGISIAN RISK ASSESMENT			127 - 170

BANK MALUKU Bank Berkeadilan	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	Hal. 4
	Tanggal 31/11/2012		
NAMA BAB			

BAB I

INTERNAL AUDIT CHARTER

A. PENDAHULUAN

Transparansi dan kejelasan sangat penting dalam pengelolaan Bank, sehingga kebijakan audit intern yang berkaitan dengan wewenang dan tingkat independensinya perlu dinyatakan dalam sebuah dokumen tertulis dari Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris yang disebut Internal Audit Charter.

Internal Audit Charter sebagai landasan kerja, terutama bagi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), karena dapat memberikan dasar yang kokoh untuk semua pihak untuk melaksanakan tugasnya atas dasar fungsi masing-masing secara jelas.

Internal Audit Charter ini bertujuan untuk menetapkan misi dan cakupan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), posisi SKAI dalam PT. Bank Maluku, kewenangan dan tanggung jawab untuk memeriksa semua catatan, pegawai, dan harta benda perusahaan secara fisik yang relevan dengan kinerja dan kegiatan audit.

menjadi mitra

B. MISI DAN TUJUAN SKAI

Misi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) ialah untuk memberi jasa berupa kepastian dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, yang khusus dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan kegiatan organisasi.

Fungsi ini bertujuan untuk membantu perusahaan memenuhi tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan pendekatan yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dari proses-proses Manajemen Risiko, pengendalian (*control*) dan tata kelola yang baik (*governance*).

Untuk memenuhi tujuan di atas, SKAI memasok manajemen dengan analisis, appraisal, rekomendasi, nasihat, dan informasi mengenai areal atau kegiatan yang dikaji untuk meningkatkan pengendalian risiko yang efektif dengan biaya yang memadai.

BANK MALUKU <i>Bank Berbasis Desa</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	Hal. 5
	Tanggal 31/11/2012		
NAMA BAB			

D C. CAKUPAN TUGAS SKAI

Cakupan tugas SKAI ialah menetapkan apakah jaringan pengorganisasian dari proses-proses Manajemen Risiko, pengendalian dan tata kelola sebagaimana dirancang dan dilaksanakan oleh manajemen, memadai dan berfungsi dengan baik untuk memastikan bahwa:

1. Semua risiko yang ada telah diidentifikasi dan dikelola secara cukup.
2. Interaksi antara SKAI dengan berbagai satuan kerja/divisi berlangsung sebagaimana mestinya.
3. Semua informasi mengenai keuangan, manajerial dan kegiatan operasional yang penting disajikan secara akurat, dapat dipercaya dan tepat waktu.
4. Semua tindak perbuatan pegawai tidak ada yang bertentangan dengan kebijakan, standar, prosedur dan ketentuan hukum maupun regulasi yang ada.
5. Semua sumberdaya yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha didapatkan secara ekonomis, digunakan secara efisien dan dipelihara secukupnya.
6. Semua program, rencana dan tujuan perusahaan dapat dicapai.
7. Kualitas dari proses pengendalian organisasi telah disempurnakan secara berkala.
8. Semua isu mengenai ketentuan hukum dan regulasi yang berdampak buruk kepada perusahaan telah diketahui dan diatasi secara cukup.

Kesempatan untuk meningkatkan pengendalian manajemen (*management control*), profitabilitas dan image perusahaan akan selalu diupayakan selama audit dilaksanakan. Temuan mengenai hal-hal ini akan dikomunikasikan kepada manajemen terkait di jenjang yang lebih tinggi.

D. AKUNTABILITAS

Pemimpin Satuan Kerja Audit Intern harus mempertanggungjawabkan tugas dan kewajibannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Melaporkan hasil penilaian mengenai kecukupan dan efektivitas dari proses mengendalikan kegiatan dan mengelola risiko perusahaan sebagaimana disebutkan dalam misi dan cakupan tugas di atas yang disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali.
2. Melaporkan issue penting yang berkaitan dengan proses pengendalian kegiatan perusahaan dan afiliasinya (anak perusahaan, jika ada), mencakup perbaikan kegiatan dimaksud yang disajikan dalam laporan khusus.

BANK MALUKU Bank Rakyat dan Koperasi Daerah	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	Hal. 6
	Tanggal 31/11/2012		
NAMA BAB			

3. Secara berkala menyajikan informasi mengenai status dan hasil pelaksanaan rencana audit tahunan berikut kecukupan sumberdaya SKAI.

4. Berkoordinasi dengan fungsi lain yang juga melakukan tugas pengendalian dan pemantauan fungsi (Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Kasudiv Hukum, Eksternal Audit dan lain sebagainya) termasuk memberikan pendapat mengenai fungsi-fungsi tersebut.

E. INDEPENDENSI SKAI *ETIKA Profesi (GAGV Pasal 8 & 5)*

Audit intern merupakan fungsi penilaian yang independen yang ditetapkan dalam organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatan perusahaan.

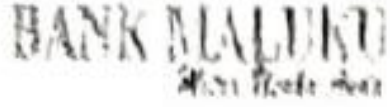
Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan kegiatan pemeriksaan dan pemberian informasi tersebut harus dilaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan, termasuk juga laporan mengenai personalia SKAI.

F. HUBUNGAN FUNGSI AUDIT INTERN, SKAI DAN KIC DENGAN KOMITE AUDIT.

1. Dewan Komisaris harus menjamin agar SKAI dapat melaksanakan tugas secara independen. Dalam hal ini Dewan Komisaris melalui Komite Audit wajib melakukan review atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Setiap kajian dan arahan Komite Audit atas hasil pemeriksaan SKAI yang disampaikan kepada Dewan Komisaris, harus menjadi perhatian dan menindaklanjuti perbaikannya.
3. Komite Audit dapat mengundang SKAI untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan fungsi audit intern serta adanya temuan audit SKAI yang dianggap perlu mendapat perhatian khusus.

G. TANGGUNG JAWAB SKAI

1. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dipimpin seorang Pemimpin yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Bank Indonesia.

	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	<i>Hal.</i> 7
	Tanggal 31/11/2012		
NAMA BAB			

2. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
3. Ruang lingkup kegiatan audit intern mencakup seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank secara langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat terselenggaranya secara baik kepentingan bank dan masyarakat.
4. Kegiatan audit ialah tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
5. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) berwenang untuk melakukan akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
6. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) berusaha agar dapat berperan sebagai konsultan bagi pihak-pihak internbank yang membutuhkan terutama yang menyangkut ruang lingkup tugasnya.
7. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) berwenang memeriksa organisasi yang berada dibawah naungan Bank dan Perusahaan Anak.
8. Kegiatan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) senantiasa memiliki independensi dalam melakukan pemeriksaan dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar pemeriksaan yang berlaku umum.
9. Auditor intern harus memiliki pendidikan dan pengalaman kerja yang memadai dalam bidang pemeriksaan intern, kegiatan operasional perbankan serta disiplin ilmu lain yang relevan dengan spesialisasinya.
10. Kegiatan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) tidak boleh berhubungan dengan wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari objek yang diperiksa.
11. Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris yang tembusannya disampaikan kepada Direktur Kepatuhan.

 BANK MALUKU	SK DIREKSI NOMOR DIR /131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RESIKO	HAL. 8
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

12. Kegiatan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) senantiasa didukung sepenuhnya oleh seluruh tingkat manajemen bank dan Dewan Komisaris.

Ambon, November 2012

Disetujui oleh:
Dewan Komisaris
PT. Bank Maluku



(Z. Sahuburua)

Direktur Utama
PT. Bank Maluku



(D. Soplanit)

 BANK MALUKU <i>Satu Malukani</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	<i>Hal.</i> 9
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

BAB II PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan adanya perubahan konsep pelaksanaan audit dari audit berbasis kepatuhan (*Compliance Based Audit*) menjadi audit berbasis risiko (*Risk Based Audit*), maka perlu dilakukan *risk assessment* (penilaian risiko) dan dilanjutkan dengan pembuatan peta risiko. Dari peta risiko tersebut akan didapatkan gambaran secara menyeluruh tentang kondisi Auditee berdasarkan risiko yang ada (profil risiko), apakah Auditee dimaksud masuk dalam kategori *high*, *moderate to high*, *moderate*, *low to moderate* atau *low risk* (cf Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, serta SE Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum).

Dengan demikian audit dilakukan berdasarkan profil risiko yang ada dan audit lebih difokuskan pada Obyek Audit yang mengandung risiko tinggi, sehingga akan tercipta suatu pelaksanaan audit yang efektif dan efisien.

Risiko, merupakan tindakan atau kejadian yang menghambat pencapaian tujuan organisasi/perusahaan.

Audit berbasis risiko ialah audit dengan melakukan identifikasi dan analisa risiko (*risk assessment*) yang berarti dan berpotensi muncul dalam perencanaan audit yang lebih terarah, audit yang lebih fokus dan pelaporan yang mengarahkan pada penghindaran, transferring maupun *accepting risk*.

Analisa risiko meliputi perkiraan signifikansi risiko dan penilaian kemungkinan terjadinya risiko, serta mempertimbangkan bagaimana pengelolaan risiko dilakukan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *risk assessment* sebagai komponen pengendalian intern (*internal control*) yang dilakukan dengan mengidentifikasikan faktor eksternal dan faktor internal, kemudian dianalisa dengan memperkirakan tingkat signifikansi risiko

 BANK MALUKU <i>Satu Milik Kami</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	<i>Hal.</i> 10
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

(*the significance of risk*) dan menilai tingkat kemungkinan risiko tersebut muncul/timbul (*likelihood of the risk occurring*).

Pada pengembangan awal *risk-based audit* dipergunakan dalam tahap perencanaan audit (cf Standar profesional internal audit dari *The Institute of Internal Auditing*).

Perkembangan lebih terkini dipergunakan dalam pelaksanaan audit tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

B. LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009.
2. Peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
3. Surat Edaran Nomor 13/23/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
4. Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi bank Umum.

C. PENGERTIAN

1. Audit Berbasis Risiko

Audit berbasis risiko ialah audit dengan melakukan identifikasi dan analisa risiko (*risk assessment*) yang berarti dan berpotensi muncul dalam perencanaan audit yang lebih terarah, audit yang lebih fokus dan pelaporan yang mengarahkan pada penghindaran, transferring maupun *accepting risk*.

Perkembangan audit berbasis risiko (*risk-based audit*) berkembang sejalan dengan pergeseran definisi pengendalian intern (*internal control*) terkini yang antara lain dikembangkan oleh COSO (*Commission of Sponsoring Organization*) sebagai berikut:

 BANK MALUKU <i>Satu Rumpun</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	<i>Hal.</i> 11
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

1.1. Proses yang dipengaruhi oleh Dewan Direksi, manajemen dan pegawai lainnya yang dirancang untuk memperoleh jaminan kepastian pencapaian tujuan:

- a. Efektifitas dan efisiensi operasi,
- b. Keandalan laporan keuangan, dan
- c. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan.

1.2. Pengendalian intern terdiri dari lima komponen yang saling berhubungan, yaitu:

- a. Lingkungan pengendalian,
- b. Penilaian risiko,
- c. Aktivitas pengendalian,
- d. Informasi dan komunikasi, dan
- e. Pemantauan.

1.3. Penilaian risiko yang terdiri dari :

- a. Identifikasi risiko meliputi pengujian terhadap faktor eksternal, seperti: perkembangan teknologi, persaingan dan perubahan ekonomi, dan faktor internal, seperti: kualitas pegawai, sifat aktivitas usaha dan karakter proses sistem informasi.
- b. Analisa risiko meliputi perkiraan signifikansi risiko dan penilaian kemungkinan terjadinya risiko, serta mempertimbangkan bagaimana pengelolaan risiko dilakukan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *risk assessment* sebagai komponen pengendalian intern (*internal control*) yang dilakukan dengan mengidentifikasikan faktor eksternal dan faktor internal, kemudian dianalisa dengan memperkirakan tingkat signifikansi risiko (*the significance of risk*) dan menilai tingkat kemungkinan risiko tersebut muncul/timbul (*likelihood of the risk occurring*).

Pada pengembangan awal *risk-based audit* dipergunakan dalam tahap perencanaan audit (cf Standar profesional internal audit dari *The Institute of Internal Auditing*).

 BANK MALUKU <i>Satu Melaka</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	<i>Hal.</i> 12
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

Perkembangan lebih terkini dipergunakan dalam pelaksanaan audit tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

2. Risiko

Merupakan tindakan atau kejadian yang menghambat pencapaian tujuan organisasi/perusahaan. Kategori risiko berbeda-beda tergantung kepada karakteristik industri dan jenis usaha suatu organisasi/perusahaan. Semakin kompleks karakter industri dan jenis usaha, semakin banyak pula kategori risiko yang harus dikelola oleh suatu organisasi/perusahaan.

Risiko-risiko yang dapat dijumpai dalam kegiatan sehari-hari suatu organisasi/perusahaan, yaitu: Risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan.

Agar tujuan organisasi/perusahaan tetap dapat tercapai dan tetap survive, diperlukan pengelolaan risiko (*risk management*) yang baik berupa identifikasi, analisa, pengukuran dan usaha-usaha untuk menghindari (*avoiding*), mentransfer (*transferring*), maupun menerima risiko yang memang harus diterima (*accepting and taking*) berbagai-kategori risiko tersebut.

3. Risk Assessment

Merupakan proses sistematis dengan mengidentifikasikan kemungkinan tercapai atau tidak tercapainya suatu kondisi atau kejadian berdasarkan *profesional judgement*. Proses penilaian risiko dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan pemahaman tentang organisasi/perusahaan dan sumber informasi lainnya untuk membentuk dasar *professional judgement* dalam mengembangkan *audit framework*, sehingga dapat diperoleh prioritas *auditable activities* berdasarkan tingkatan risiko aktivitas (dari yang berisiko tinggi ke risiko rendah).

Sumber data dalam proses penilaian risiko (*risk assessment process*) dapat diperoleh dari diskusi-diskusi antara Dewan Direksi, manajemen dan staf Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), pertimbangan penerapan peraturan dan hukum yang

 BANK MALUKU <i>Satu Maluku</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	<i>Hal.</i> 13
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

berlaku, analisa data keuangan dan operasi, review hasil audit sebelumnya dan trend ekonomi maupun industri sejenis.

4. Risk Factor

Merupakan kriteria yang dipergunakan untuk mengidentifikasi Risiko Bawaan (*rate of significant*) dan Frekuensi Kejadian Risiko (*likelihood of occurrence*) atau kejadian yang mengakibatkan tidak tercapainya sasaran, aktivitas, strategi, dan tujuan organisasi/perusahaan dari *auditable activities*.

Dari identifikasi *risk factor* dalam berbagai *auditable activities* diperoleh beraneka ragam *risk factor*, namun demikian jumlah *risk factor* yang dipergunakan harus dibatasi untuk mempermudah analisa dengan tetap menggambarkan *risk assessment* yang mencukupi dan komprehensif.

Risk Factor yang telah diidentifikasi kemudian dianalisa dengan melakukan pembobotan *rate of significant* dan *likelihood of occurrence* untuk mendapatkan *risk score* dan selanjutnya menentukan klasifikasi risiko (*risk classification*) dari masing-masing *auditable activities*.

Untuk menyamakan dasar *risk assessment* dan dengan mempertimbangkan kemudahan perolehan sumber data (*data source*), maka ditetapkan beberapa *risk factor* dan nilai tertimbang (akan diuraikan pada bab-bab selanjutnya).

5. SPI (Sistem Pengendalian Intern) merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan (*on going basis*), guna:

- 5.1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank.
- 5.2. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat.
- 5.3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
- 5.4. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian.
- 5.5. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

 BANK MALUKU <i>Satu Melipai</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	<i>Hal.</i> 14
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

Jadi pada dasarnya, pengendalian intern ialah usaha untuk mengendalikan setiap kegiatan agar dapat mencapai tujuan atau sasaran yang hendak dicapai oleh Bank berdasarkan ketentuan atau standar yang telah ditentukan.

Pengendalian intern meliputi susunan organisasi, semua cara-cara dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan untuk menjaga dan mengamankan harta miliknya, memeriksa kecermatan dan kebenaran data administrasi, meningkatkan efisiensi kerja serta mendorong dipatuhinya kebijakan yang ditetapkan oleh *top management* melalui Pimpinan, baik unit organisasi di Kantor Pusat, Cabang, Cabang Pembantu, maupun Kantor Kas.

 BANK MALUKU <i>Satu Rasa</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	<i>Hal.</i> 15
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

BAB III

KETENTUAN UMUM

A. PROSES PENYUSUNAN

Dalam rangka pelaksanaan Audit Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*), Bank wajib melakukan pendekatan risiko dengan cakupan:

1. PROFIL RISIKO (*RISK PROFILE*)

Penilaian terhadap risiko merupakan gabungan penilaian risiko inherent dan kualitas penerapan/pengawasan manajemen terhadap risiko yang dilakukan terhadap 9 (sembilan) elemen risiko, yaitu: *size* (ukuran), *Complexity* (kompleksitas), *Asset Quality* (Kualitas Aset), *Growth* (pertumbuhan), *Loss & Potential Loss* (Kerugian dan Kemungkinan Kerugian), *Internal Control* (Pengendalian Intern), *Previous Audit Findings* (Temuan Audit Yang Lalu), *Business Target Achievement* (Pencapaian Target Bisnis), dan Teknologi Informasi.

Kesembilan elemen risiko tersebut dikelompokkan kedalam 8 (delapan) risiko sesuai dengan Surat Edaran Nomor 13/23/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal: Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

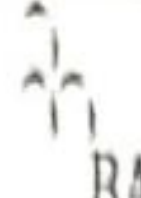
Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan Bank.

Agar tujuan organisasi/perusahaan tetap dapat tercapai dan tetap survive, diperlukan pengelolaan risiko (*risk management*) yang baik berupa identifikasi, analisa, pengukuran dan usaha-usaha untuk menghindari (*avoiding*), mentransfer (*transferring*), maupun menerima risiko yang memang harus diterima (*accepting and taking*) berbagai kategori risiko tersebut.

 BANK MALUKU <i>Solo Maluku</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	<i>Hal.</i> 16
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			
Secara terinci kesembilan elemen dimaksud yang diuraikan kedalam 8 risiko dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Risiko Kredit: i. Kualitas Aset: 1) Kolektibilitas pinjaman (tingkat kelancaran pinjaman), 2) Debitur Inti Kredit diluar Pihak Terkait dibandingkan dengan Total Kredit, 3) Kredit per Sektor Ekonomi dibandingkan dengan Total Kredit, 4) Kredit per Kategori portofolio dibandingkan dengan Total Kredit, 5) Aset dan TRA Kualitas Rendah dibandingkan dengan Total Aset dan TRA, 6) Aktiva Produktif dan TRA Bermasalah dibandingkan dengan Total Aset dan TRA, 7) Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan/bermasalah dibandingkan dengan Total Aktiva produktif, 8) Debitur Inti Kredit diluar Pihak Terkait dibandingkan dengan Total Kredit, 9) Agunan Yang Diambil Alih dibandingkan dengan Total Kredit, 10) Kredit Kualitas Rendah dibandingkan dengan Total Kredit, 11) Kredit Bermasalah dibandingkan dengan Total Kredit, 12) Kredit Bermasalah dikurangi CKPN Kredit Bermasalah dibandingkan dengan Total Kredit diTotal Kredit dikurangi CKPN Kredit Bermasalah, 13) CKPN atas kredit dibandingkan dengan Total Kredit, dan 14) Kualitas penanganan AP Bermasalah. c. Penilaian Jaminan, d. Kelengkapan Dokumen Kredit, e. Keamanan Dokumen Kredit,			

 BANK MALUKU <i>Sila Waspada</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	Hal. 17
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			
f. Besarnya ekspansi kredit pada periode tahun assessment dibandingkan dengan tahun lalu, g. Besarnya ekspansi dibandingkan dengan RBB, i. Aktiva Produktif Bermasalah/NPA dan Pembentukan PPAP: 1) Perkembangan Aktiva Produktif Bermasalah/<i>Non Performing Asset-Gross</i> (NPA) dibandingkan dengan Aktiva Produktif selama 12 bulan terakhir, dan 2) Tingkat kecukupan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang telah dibentuk dibandingkan dengan PPAP yang wajib dibentuk. j. Kinerja penanganan aktiva produktif (AP) bermasalah: 1) Kredit yang direstruktur dibandingkan dengan Total Kredit, 2) Kredit yang direstruktur lancar & DPK dibandingkan dengan Total Kredit, 3) Kredit bermasalah – PPAP dibandingkan dengan Total Kredit, 4) Jumlah jaminan kredit dibandingkan dengan plafon, dan 5) Jumlah jaminan kredit dibandingkan dengan outstanding. 2. Risiko Likuiditas: a. Jumlah penabung dibandingkan dengan tahun lalu, b. Jumlah giran dibandingkan dengan tahun lalu, c. Jumlah deposan dibandingkan dengan tahun lalu, d. Jumlah debitur dibandingkan dengan tahun lalu, e. Jumlah nominal tabungan dibanding tahun lalu, f. Jumlah nominal deposito dibanding tahun lalu, g. Jumlah nominal giro dibanding tahun lalu, h. Besarnya LDR (Loan to Deposit ratio), i. Besarnya rasio deposito terhdp dana pihak ketiga, j. Besarnya rasio tabungan terhdp dana pihak ketiga, dan			

 BANK MALUKU <i>Satu Meliputi</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	Hal. 18
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			
k. Besarnya rasio giro terhadap dana pihak ketiga. 3. Risiko Pasar: tidak ada pada Cabang. 4. Risiko Operasional: a. Sumber Daya Manusia: 1) Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia, dan 2) Kegagalan karena Faktor Manusia (<i>Human Error</i>). b. Teknologi Informasi dan Infrastruktur Pendukung: 1) Kompleksitas Teknologi Informasi, 2) Perubahan Teknologi, 3) Kerentanan Sistem TI terhadap ancaman dan serangan TI, 4) <i>Maturity</i> Sistem TI, 5) Kegagalan Sistem TI, 6) Keandalan Infrastruktur Pendukung, 7) <i>Security System TI</i>, 8) Kesesuaian Arah TI dan Integritas, 9) Pelayanan dan Dukungan, 10) Materialitas, 11) Kesesuaian dengan <i>User Requirements</i>, 12) <i>Service Level</i> , 13) Pelayanan dan Dukungan, dan 14) Respons time jalur komunikasi. c. Rasio Kerugian kegagalan sistem terhadap pendapatan operasional, d. Rasio jumlah transaksi error terhadap total transaksi terhadap pendapatan operasional, e. Rasio kerugian karena human error dan fraud terhadap pendapatan operasional, f. Rasio human <i>error</i> dan <i>fraud</i> terhadap total transaksi terhadap pendapatan operasional.			

 BANK MALUKU <i>Solo Medepai</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	<i>Hal.</i> 19
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			
g. Rasio kerugian karena <i>strategic failure</i> terhadap pendapatan operasional, h. Fraud: 1) <i>Fraud</i> Internal, dan 2) <i>Fraud</i> Eksternal. i. Kejadian Eksternal: 1) Frekuensi dan materialitas kejadian eksternal yang berdampak terhadap kegiatan operasional bank. j. Kelas Cabang, k. Jumlah Capem/Kantor Kas: 1. Jumlah Cabang Pembantu dan Kantor Kas, Payment Point dan ATM dalam pengelolaan dan pengawasannya. l. Jenis Transaksi Yang Dimiliki: 1) Jumlah transaksi yang dilakukan cabang, dan 2) Jenis transaksi yang dilakukan Cabang. m. Kesalahan operasional bukan karena Fraud: 1) <i>Write off</i>, dan 2) <i>Other Loss & Potential Loss</i>. n. Organisasi, manajemen dan operasional: 1) Kompetensi posisi kunci, 2) Kecukupan SDM untuk posisi kunci, 3) Lamanya terjadi perangkapan jabatan, tanpa atau dengan didukung nota dinas/SK Direksi, 4) <i>HRD Problems</i>, 5) <i>Potential Problem From Financial Data</i>. o. Temuan SKAI/Auditor : 1) Temuan-temuan SKAI/Auditor cabang dari audit yang dilakukan dalam operasional Cabang, 2) Kualitas Temuan (<i>Quality of finding</i>), dan			

 BANK MALUKU <i>Satu Rumpun</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	<i>Hal.</i> 20
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			
3) Jangka waktu dari audit terakhir. p. Business Target: 1) ROA; 2) NIM. 3) ROE, 4) BOPO, 5) Rasio <i>Business Volume Target</i> (total kredit, dana pihak ke-3, total aset) dengan RBB dan 6) Rasio <i>Business profitability</i> terhadap RBB. 5. Risiko Hukum: a. Faktor Litigasi: 1) Rasio besarnya nominal gugatan yang diajukan terhadap pendapatan operasional, 2) Rasio kerugian yang dialami oleh cabang terhadap pendapatan operasional, 3) Kemungkinan timbulnya gugatan: i. Kemungkinan timbulnya gugatan yang serupa karena adanya standar perjanjian yang sama, dan ii. Estimasi total kerugian yang mungkin timbul dibandingkan dengan modal bank (cabang) b. Faktor Kelemahan Perikatan: 1) Tidak terpenuhinya syarat sah nya perjanjian kredit, 2) Terdapat kelemahan klausula perjanjian dan/atau tidak terpenuhinya persyaratan yang telah disepakati., 3) Pemahaman para pihak terkait dengan perjanjian, terutama mengenai risiko-risiko yang ada dalam suatu transaksi yang kompleks dan menggunakan istilah-istilah yang sulit dipahami atau tidak lazim bagi masyarakat umum,			

 BANK MALUKU <i>Satu Malukani</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	<i>Hal.</i> 21
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			
4) Tidak dapat dilaksanakannya suatu perjanjian baik untuk keseluruhan maupun sebagian, 5) Keberadaan dokumen pendukung terkait perjanjian yang dilakukan oleh bank dengan pihak ketiga, 6) Pengkinian dan review dari penggunaan standard perjanjian oleh bank (cabang) dan/atau pihak independen, dan 7) Penggunaan pilihan hukum Indonesia. 6. Risiko Strategi : a. Pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB): 1) Rasio realisasi bisnis dengan RBB. b. Review terhadap independen unit pengelolaan AP Bermasalah (workout unit), dan c. Perubahan Organisasi. 7. Risiko Kepatuhan: a. Frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau <i>track record</i> kepatuhan bank: 1) Jenis dan frekuensi pelanggaran yang sama yang ditemukan setiap tahunnya dalam 3 tahun terakhir, dan 2) Signifikansi tindak lanjut bank atas temuan tersebut. b. Perilaku yang mendasari pelanggaran, c. Pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu, d. Kecukupan kebijakan dan prosedur terhadap Aktiva Produktif: 1) Kecukupan kebijakan dan prosedur terhadap Aktiva Produktif, dan 2) Sistem Kaji Ulang (review) internal terhadap Aktiva Produktif. e. Dokumentasi Aktiva Produktif, f. Quality Assurance Findings: 1) Kecukupan kebijakan dan prosedur, 2) Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, 3) Efektivitas pemisahan fungsi organisasi,			

 BANK MALUKU <i>Sila Malukani</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	<i>Hal.</i> 22
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

- 4) Efektivitas pengawasan operasional, dan
- 5) *Management Concern.*

8. Risiko Reputasi:

- a. Frekuensi, materialitas dan eksposur pemberitaan negatif Bank:
 - 1) Frekuensi dan materialitas pemberitaan negatif, dan
 - 2) Jenis media dan ruang lingkup pemberitaan negatif.
- b. Frekuensi dan materialitas keluhan nasabah:
 - 1) Frekuensi keluhan nasabah, dan
 - 2) Materialitas keluhan nasabah.

2. PENGENDALIAN INTERN

a. Pengertian

Pengendalian intern disebut juga sebagai pengendalian manajemen yaitu suatu istilah bagi pelaksanaan fungsi kontrol intern dalam manajemen.

Semula pengendalian intern digunakan oleh pemeriksa dari intern organisasi, sedangkan dari ekstern organisasi menamakannya pengendalian manajemen.

Pengendalian intern pada dasarnya adalah usaha untuk mengendalikan setiap kegiatan agar dapat mencapai tujuan atau sasaran yang hendak dicapai oleh suatu organisasi berdasarkan ketentuan atau standar yang telah ditentukan.

Pengendalian intern meliputi susunan organisasi, semua cara-cara dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan untuk menjaga dan mengamankan harta miliknya, memeriksa kecermatan dan kebenaran data administrasi, meningkatkan efisiensi kerja serta mendorong dipatuhinya kebijakan yang ditetapkan oleh *top management*.

Jadi konsep dasar Pengendalian Intern adalah :

- 1) Kegiatan pengendalian intern merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan manajemen secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan apa yang digariskan dalam fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan,

 BANK MALUKU <i>Saja Filasafah</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	<i>Hal.</i> 23
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

pelaksanaan dan pengendalian. Artinya adalah bahwa seorang manajer disamping melakukan perencanaan dan pelaksanaan juga melakukan pengendalian agar pekerjaannya mencapai sasaran sesuai dengan rencana.

- 2) Pengendalian intern berintegrasi dalam sistem dan prosedur setiap kegiatan atau aktivitas, sehingga setiap penyimpangan yang terjadi dapat dilakukan langkah perbaikan oleh unit organisasi yang bersangkutan. Agar pekerjaan bisa dilaksanakan, perlu ada pedoman kerja atau sistem dan prosedur yang dibakukan bank
- 3) Manajemen Bank memikul tanggung jawab penuh atas pelaksanaannya. Sesuai dengan fungsi manajemen diatas, maka apabila fungsi ini berjalan baik atau tidak berjalan dengan baik pada akhirnya manajemen Bank yang bertanggung jawab.
- 4) Kegiatan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), adalah dinamisor untuk lebih berfungsinya pengendalian pada setiap kegiatan atau aktivitas bisnis perbankan, karena dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan biasanya terjadi deviasi, oleh sebab itu Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), melakukan pengukuran terutama untuk mempertimbangkan apakah aspek pengendaliannya berjalan atau tidak. Dalam aktivitas ini Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), dapat memberikan rekomendasi atau saran yang konstruktif dan protektif untuk mendorong lebih berfungsinya pengendalian.

b. Fungsi Pengendalian Intern

Fungsi pengendalian intern sangat penting, karena peran yang diharapkan dari fungsi tersebut untuk membantu semua tingkat manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional Bank yang melibatkan dana dari masyarakat, oleh sebab itu ruang lingkup pengendalian intern meliputi juga aspek-aspek yang mampu menjamin keamanan dana yang disimpan oleh masyarakat dan pihak ketiga lainnya.

 BANK MALUKU <i>Sila Melipai</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	<i>Hal.</i> 24
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

c. Tujuan Pengendalian Intern

Pengendalian intern dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas dalam organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku supaya berdaya guna, hemat dan berhasil guna.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pengendalian intern sebagai berikut:

- 1) Penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan ekonomis.
- 2) Mendorong kelancaran pelaksanaan tugas dalam memberikan jasa pelayanan yang bermanfaat bagi penerima jasa baik intern maupun ekstern.
- 3) Mengamankan harta perusahaan dari berbagai risiko.
- 4) Mendorong dipatuhinya kebijakan, sistem dan prosedur secara konsekuen.

Disimpulkan bahwa pengendalian intern bertujuan untuk membantu pimpinan dalam mengendalikan semua kegiatan atau aktivitas agar sasaran dapat tercapai secara Ekonomis, Efisien, Efektif – Lancar Aman dan Tertib.

d. Manfaat Pengendalian Intern

- 1) Peningkatan prestasi pegawai

Dengan adanya pengendalian intern yang baik memungkinkan pegawai dapat menilai hasil kerjanya sendiri (*performance*), sehingga dapat memotivasi pegawai untuk meningkatkan prestasinya.

- 2) Perlindungan terhadap pegawai

Dengan adanya pengendalian intern yang baik, batas tanggung jawab pegawai menjadi jelas dan dapat mencegah niat untuk melakukan penyimpangan.

- 3) Perlindungan terhadap perusahaan

Dengan adanya pengendalian intern yang baik, dapat mengurangi bahkan menghilangkan hal-hal yang dapat merugikan organisasi, karena dapat mencegah dan mendeteksi terjadinya penyimpangan atau mengidentifikasi *risk management*.

 BANK MALUKU <i>Sila Melipai</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	<i>Hal.</i> 25
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

e. Sifat Pengendalian Intern

- 1) Imperatif (sangat *urgent* dan penting)
Artinya pengendalian intern sifatnya mutlak/keharusan untuk dilaksanakan.
- 2) Preventif (mencegah, menjaga, mewaspada, mengantisipasi)
Artinya sebelum penyimpangan terjadi, terlebih dahulu telah diperkirakan atau ditenggarai titik-titik rawan risiko, sehingga dapat dipersiapkan pencegahannya.
- 3) Repressif (menindak, melakukan tindakan)
Artinya apabila ada suatu penyimpangan, maka harus segera dilakukan langkah-langkah pencegahan agar dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, diantaranya menindak pegawai yang terlibat, memperbaiki kesalahan dan menyempurnakan prosedur.
- 4) Edukatif (mendidik, membiasakan)
Artinya menciptakan agar iklim pengawasan dapat terpelihara dengan baik (bersikap jujur, lugas, transparan, disiplin dan konsisten).
- 5) Rekomendatif (memberikan saran)
Artinya sebagai wujud partisipatif atau kepedulian terhadap suatu kegiatan.

f. Unsur-Unsur Pengendalian Intern

- 1) Organisasi
Pengendalian atas sistem organisasi yang berazaskan efektivitas dan efisiensi dengan menetapkan struktur yang tepat pada setiap fungsi masing-masing sesuai dengan job description, adanya penetapan kriteria/persyaratan jabatan, wewenang dan tanggung jawab yang jelas sehingga tidak seorangpun mengendalikan semua tahap dari suatu transaksi.
- 2) Kebijakan
Merupakan kiat atau *art* dalam menjalankan usaha yang harus diikuti dan diamankan oleh semua jajaran dalam organisasi antara lain *Corporate Plan*,

 BANK MALUKU <i>Satu Peluang</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	Hal. 26
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

Kebijakan Umum Direksi dan kebijakan lainnya (seperti perkreditan, kepegawaian dll). Jadi kebijakan ini bersifat mengharuskan, membimbing atau membatasi tindakan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.

3) Prosedur

Merupakan sarana operasional atau cara yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, termasuk yang dituangkan dalam sistem komputerisasi.

4) Personalia

Manajemen personalia ditujukan untuk menghasilkan pegawai yang memiliki kompetensi dan berprestasi yang tinggi yakni yang bermental baik, berkemampuan (*capable*) dan berdedikasi, termasuk didalamnya meliputi kegiatan penerimaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan karir pegawai yang jelas.

5) Perencanaan

Sebelum suatu usaha dimulai terlebih dahulu dibuat rencana/rancangan yang realistis atas dasar ketersediaan sumber daya, sehingga dapat dihindarkan timbulnya kegagalan yang tidak perlu dan setiap perencanaan akan selalu mengacu/mempedomani kebijakan perusahaan (termasuk misi, tujuan dan sasaran). Perencanaan ini penting artinya karena mengantisipasi masa yang akan datang dan karena merupakan basis dari fungsi manajemen yang lainnya, kemudian dijabarkan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran dalam rangka mencapai tujuan.

6) Akuntansi

Akuntansi merupakan metode pengendalian operasional dan finansial yang penting untuk berbagai kegiatan sumber dana dan sumber daya, sehingga harus diatur dengan tepat sesuai dengan kebutuhan dan standar akuntansi yang berlaku.

 BANK MALUKU <i>Sila Melipai</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	<i>Hal.</i> 27
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

7) Pelaporan

Yaitu sistem yang mendukung manajemen dalam mengendalikan operasinya, agar setiap saat dapat mengikuti perkembangan usaha atau peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu pelaporan diperlukan untuk menyajikan informasi yang mutakhir tentang perkembangan peristiwa, kemajuan, prestasi atau pencapaian tujuan.

8) Audit Intern

Audit intern yang independen menilai unsur-unsur pengendalian lainnya, dan memperkuat sistem pengendalian yang karena kondisi tertentu mungkin tidak mengandung saling uji secara otomatis seperti yang diharapkan. Audit intern dalam organisasi Bank dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), dan Unit Kontrol Intern (baik yang ada di Kantor Pusat maupun di Kantor-Kantor cabang).

g. Indikator keberhasilan

Pelaksanaan pengendalian intern di lingkungan Bank memerlukan komitmen dari semua pihak mengingat jajaran manajemen akan terlibat langsung, sebagai indikasi dari keberhasilan pelaksanaan pengendalian intern bisa dilihat, antara lain:

- 1) Menurunnya angka pengaduan atau keluhan nasabah.
- 2) Menurunnya angka penyelewengan, kebocoran dan berkurangnya kasus.
- 3) Berkurangnya kemacetan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 4) Berkurangnya frekuensi audit.
- 5) Meningkatnya keterampilan pegawai dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 6) Meningkatnya efisiensi pelayanan bank.
- 7) Meningkatnya disiplin kerja pegawai yang diimbangi dengan meningkatnya kegairahan, prestasi dan produktivitas kerja.
- 8) Dan akhirnya meningkatnya kesehatan bank secara keseluruhan.

 BANK MALUKU <i>Satu Rumpun</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	Hal. 28
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

h. Ruang lingkup pengendalian intern

Ruang lingkup pengendalian intern harus mencakup seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank yang secara langsung ataupun tidak langsung, diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat terselenggaranya secara baik untuk menjaga kepentingan Bank dan masyarakat. Dalam hubungan ini selain meliputi audit, penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern serta kualitas pelaksanaannya, juga mencakup segala aspek dan unsur dari organisasi Bank, sehingga mampu menunjang analisis yang optimal dalam membantu proses pengambilan keputusan oleh manajemen.

B. JENIS PENGAWASAN

Ada 4 (empat) faktor yang membedakan jenis pengawasan yaitu :

1. Subjek yang melakukan pengawasan

Berdasarkan subyek pengawasan menurut Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia cq. Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1989 , pengawasan terdiri atas :

2. Pengawasan melekat

Adalah bentuk pengawasan yang mengikat/menyatu (*inherent*) dengan manajemen, sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*through the system*) pada semua jenjang manajemen. Selain supervisi atasan terhadap bawahan juga *internal check* antara orang dengan orang, bagian dengan bagian.

3. Pengawasan fungsional

Adalah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau lembaga yang tugas pokoknya melakukan pengawasan, baik pengawasan yang dilakukan oleh pihak intern Bank MALUKU (Satuan Kerja Audit Intern – SKAI dan Kontrol Intern Cabang) maupun pihak ekstern (Bank Indonesia, ^{BP}BPK, Akuntan Publik, dll).

4. Cara (metode) melakukan pengawasan

a. Pengawasan langsung

 BANK MALUKU <i>Satu Peluang</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP Tanggal 31/12/2012	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	Hal. 29
NAMA BAB			
Merupakan pengawasan yang dilaksanakan ditempat kegiatan atau tempat kejadian berlangsung dengan mengadakan inspeksi dan audit setempat. b. Pengawasan tidak langsung Merupakan pengawasan yang dilakukan dengan cara memantau atau mengkaji laporan-laporan yang dibuat oleh unit organisasi, instansi lainnya dan masyarakat. 5. Waktu melakukan pengawasan a. Pengawasan yang dilakukan sebelum suatu kegiatan dimulai Pengawasan yang dilakukan sejak tahap perencanaan, dengan mengkaji atau mengevaluasi kelayakan (<i>feasibility</i>) aktivitas, persetujuan, otoritas proyek atau program, termasuk pada saat dilakukan pembangunan sistem (<i>system development</i>) di mana pengawasan ini lebih bersifat preventif yakni mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. b. Pengawasan selama kegiatan sedang berlangsung Pengawasan yang dilakukan pada saat kegiatan berlangsung, untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan tersebut telah sesuai dengan rencana. Dalam proses ini implementasi sistem diamati, bilamana diperlukan dilakukan perbaikan, pengembangan dan penyempurnaan. c. Pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan berlangsung Pengawasan untuk menilai apakah kegiatan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini bersifat represif yakni memperbaiki kesalahan yang telah terjadi. 6. Lingkup Pengawasan a. Audit Umum Audit umum adalah audit yang dilakukan secara rutin terhadap seluruh kegiatan atau aktivitas di unit organisasi Bank MALUKU. b. Audit Teknologi Informasi (TI)			

 BANK MALUKU <i>Satu Misi</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	Hal. 30
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

Audit Teknologi Informasi (TI) merupakan audit yang mencakup review dan evaluasi terhadap aspek-aspek sistem pemrosesan informasi secara otomatis termasuk yang berhubungan dengan pemrosesan non otomatis, dan interface yang ada di antara keduanya.

- c. Audit secara partial (sebagian) dari suatu objek, baik dilakukan secara lengkap maupun acak. Pengawasan ini disebut juga audit khusus, yaitu audit yang dilaksanakan di luar audit rutin (umum), yang biasanya dilakukan karena adanya indikasi kasus, baik yang dijumpai pada saat melakukan audit umum maupun informasi dari sumber lain.

7. Klasifikasi Risiko (*Risk Classification*)

Tingkat risiko diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan level/tingkat risiko:

1) High Risk

Aktivitas, unit atau transaksi yang mempunyai risiko bawaan (*level of significant*) yang tinggi, namun mempunyai frekuensi kejadian yang rendah (*likelihood of occurrence*) sehingga membutuhkan pengendalian intern yang kuat dan supervisi yang kuat di luar organisasi untuk meminimalkan *detection risk*.

2) Moderate to High Risk

Aktivitas, unit atau transaksi yang mempunyai risiko bawaan (*level of significant*) yang sedang dan mempunyai frekuensi kejadian yang sedang pula (*likelihood of occurrence*) sehingga membutuhkan pengendalian intern yang kuat dan supervisi yang cukup kuat di luar organisasi untuk meminimalkan *detection risk*.

 BANK MALUKU <i>Sila Melayu</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	<i>Hal.</i> 31
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

3) **Moderate Risk**

Aktivitas, unit atau transaksi yang mempunyai risiko bawaan (*level of significant*) yang rendah, namun mempunyai frekuensi kejadian yang tinggi (*likelihood of occurrence*) sehingga membutuhkan pengendalian intern yang mencukupi dan supervisi dari unit organisasi (normal) secara intensif untuk mengurangi detection risk.

4) **Low to Moderate Risk**

Aktivitas, unit atau transaksi yang mempunyai risiko bawaan (*level of significant*) yang sedang dan mempunyai frekuensi kejadian yang sedang pula (*likelihood of occurrence*) sehingga diperlukan pengendalian intern dan supervisi yang sedang.

5) **Low Risk**

Aktivitas, unit atau transaksi yang mempunyai risiko bawaan (*level of significant*) yang rendah dan mempunyai frekuensi kejadian yang rendah (*likelihood of occurrence*) sehingga hanya diperlukan pengendalian intern dan supervisi yang dibutuhkan rendah, bahkan tidak dibutuhkan karena tidak berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi.

b. **Risk Score**

Untuk melakukan *scoring auditable activities* dan mengaitkannya dengan masing-masing *risk factor* dapat dipergunakan dua metode, yaitu *systematic scoring* (secara sistematis) dan *unsystematic scoring* (mengandalkan kekuatan judgement auditor).

Untuk mempermudah dan menyamakan persepsi tentang scoring dalam kaitannya dengan *systematic scoring* dengan *risk range* untuk masing-masing *risk classification* sebagai berikut :

 BANK MALUKU <i>Solo Peduli</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	<i>Hal.</i> 32
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

<i>Risk Classification</i>	<i>Risk Score</i>
High Risk	$R > 4.5$
Moderate to High Risk	$3.5 < R \leq 4.5$
Moderate Risk	$2.5 < R \leq 3.5$
Low to Moderate Risk	$1.5 < R \leq 2.5$
Low Risk	$R \leq 1.5$

c. *Risk Factor*

Merupakan kriteria yang dipergunakan untuk mengidentifikasi *rate of significant* dan *likelihood of occurrence* atau kejadian yang mengakibatkan tidak tercapainya sasaran, aktivitas, strategi, dan tujuan perusahaan dan bagian perusahaan.

Dengan perkataan lain, *risk factor* diidentifikasi dari *auditable activities*.

Dari identifikasi *risk factor* dalam berbagai *auditable activities* diperoleh beraneka ragam *risk factor*, namun demikian jumlah *risk factor* yang dipergunakan harus dibatasi untuk mempermudah analisa dengan tetap menggambarkan *risk assessment* yang mencukupi dan komprehensif.

Risk Factor yang telah diidentifikasi kemudian dianalisa dengan pembobotan *rate of significant* dan *likelihood of occurrence* untuk mendapat *risk score* untuk menentukan klasifikasi risiko (*risk classification*) masing-masing *auditable activities*.

Untuk menyamakan dasar *risk assessment* dengan tujuan mempertimbangkan kemudahan perolehan sumber data (*data source*) maka ditetapkan beberapa *risk factor* dan nilai tertimbang sebagai berikut :

 BANK MALUKU <i>Solo Melapari</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	<i>Hal.</i> 33
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

RISK ASSESSMENT STRUCTURE

JENIS RISIKO	W (%)	SCORE	
		RATING	W x RATING
1. Risiko Kredit	20		
2. Risiko Likuiditas	15		
3. Risiko Operasional	15		
4. Risiko Hukum	15		
5. Risiko Strategi	15		
6. Risiko Kepatuhan	10		
7. Risiko Reputasi	10		
<i>Total</i>	100		
RISK LEVEL			

HASIL ASSESSMENT	L / L-M / M / M-H / H
------------------	-----------------------

Kriteria Risiko (*Risk Criteria*)

Analisa risiko (*risk analysis*) dari *auditable activities* dan *risk factor* dapat langsung menggunakan *professional judgement* dengan mendasarkan definisi masing-masing klasifikasi risiko dan *risk range*-nya, namun untuk menyamakan dasar analisa risiko, dipergunakan kriteria *risk factor* untuk masing-masing *risk classification*.

C. PRINSIP-PRINSIP PENGAWASAN.

Prinsip yang dianut dalam sistem pengawasan yang efektif mencakup 10 unsur berikut ini:

1. Ketepatan waktu.

Pengawasan yang dilakukan pada waktu yang tepat hasilnya akan lebih baik dibandingkan dengan pengawasan yang terlambat dilakukan, apalagi kalau sudah kadaluwarsa mengakibatkan penanganan masalah akan menjadi lebih rumit.

 BANK MALUKU <i>Solo Maluku</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	Hal. 34
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

2. Kecermatan, ketelitian.

Kecermatan dapat dihindari atau memperkecil kemungkinan timbulnya kesalahan, ketidak-tepatan penanganan masalah, karena itu kecerobohan atau kekurang-cermatan dalam mengumpulkan fakta, data dan informasi harus dicegah.

3. Mempertimbangkan manfaat dan biaya.

Apabila pengawasan dilakukan secara terus menerus dan konsisten dapat mencegah timbulnya biaya yang lebih besar akibat keharusan melakukan audit yang lebih intensif. Oleh karenanya itu besarnya biaya menjadi relatif bila diukur dengan manfaat yang diperoleh.

4. Mudah dimengerti.

Prosedur pengawasan dan hasil yang ingin dicapai harus lugas, tegas, jelas, transparan dan pasti, sehingga dapat mudah dimengerti oleh setiap orang yang terlibat maupun pihak yang berkepentingan dengan pengawasan.

5. Luwes, lentur.

Pengawasan harus berpedoman pada prosedur, namun pengawasan dapat dilakukan tanpa harus melalui prosedur yang kaku dan formal. Jika pengawasan sudah menjadi kebiasaan dan membudaya, maka tidak banyak diperlukan penekanan atau pemaksaan dalam pelaksanaannya.

6. Kriteria yang wajar.

Standar atau kriteria yang digunakan dalam sistem pengawasan harus masuk akal dan dapat dilaksanakan. Jika standar/kriteria tersebut berlebihan niscaya akan mengurangi daya motivasinya, karena itu sistem harus merupakan tantangan untuk membuat setiap orang berkeinginan mencapai kinerja yang lebih baik.

7. Kriteria ganda.

Ada kalanya kriteria ditetapkan oleh dua pihak, yakni manajer dan bawahannya atau biasa disebut *bottom-up/top down* untuk mencari apa yang dianggap wajar

 BANK MALUKU <i>Sila Melupa</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	<i>Hal.</i> 35
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

untuk menetapkan kriteria bagi masing-masing pihak. Ini dapat mengurangi standar tunggal yang sempit.

8. Penempatan yang strategis.

Adakalanya tidak seluruh fungsi pengawasan perlu dilakukan secara lengkap atau sempurna karena berbagai keterbatasan seperti waktu, tenaga dan biaya. Karena itu pengawasan ditempatkan pada bagian-bagian yang harus diprioritaskan sehingga dapat mencakup kegiatan, saat dan operasi yang dipandang rawan (kritis).

9. Pemberian tekanan pada pengecualian.

Artinya manajer hanya akan menangani setiap pengecualian (hal-hal yang tidak normatif) yang mungkin terjadi, misalnya dalam hal pemberian wewenang yang dibatasi oleh suatu jumlah. Oleh karenanya diatas jumlah yang ditetapkan tersebut, harus dimintakan persetujuan pemberi wewenang atau atasannya. Hal ini dilakukan karena keterbatasan, sehingga penempatan pengawasan oleh para manajer harus dilakukan pada bidang-bidang strategis saja. Hal ini tidak berarti membebaskan tugas manajer dari fungsi kontrol yang harus dijalankan.

10. Tindakan perbaikan.

Jika terjadi penyimpangan atau perbedaan dengan standar, yaitu bila suatu masalah tidak sesuai dengan kebijakan atau prosedur yang berlaku, perbaikannya harus segera dilakukan. Perbaikan ini dilakukan untuk mencegah semakin berlarutnya kesalahan yang terjadi serta berisiko yang dapat timbul karenanya.

 BANK MALUKU <i>Satu Maluku</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	Hal. 36
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

BAB IV
AUDIT INTERN

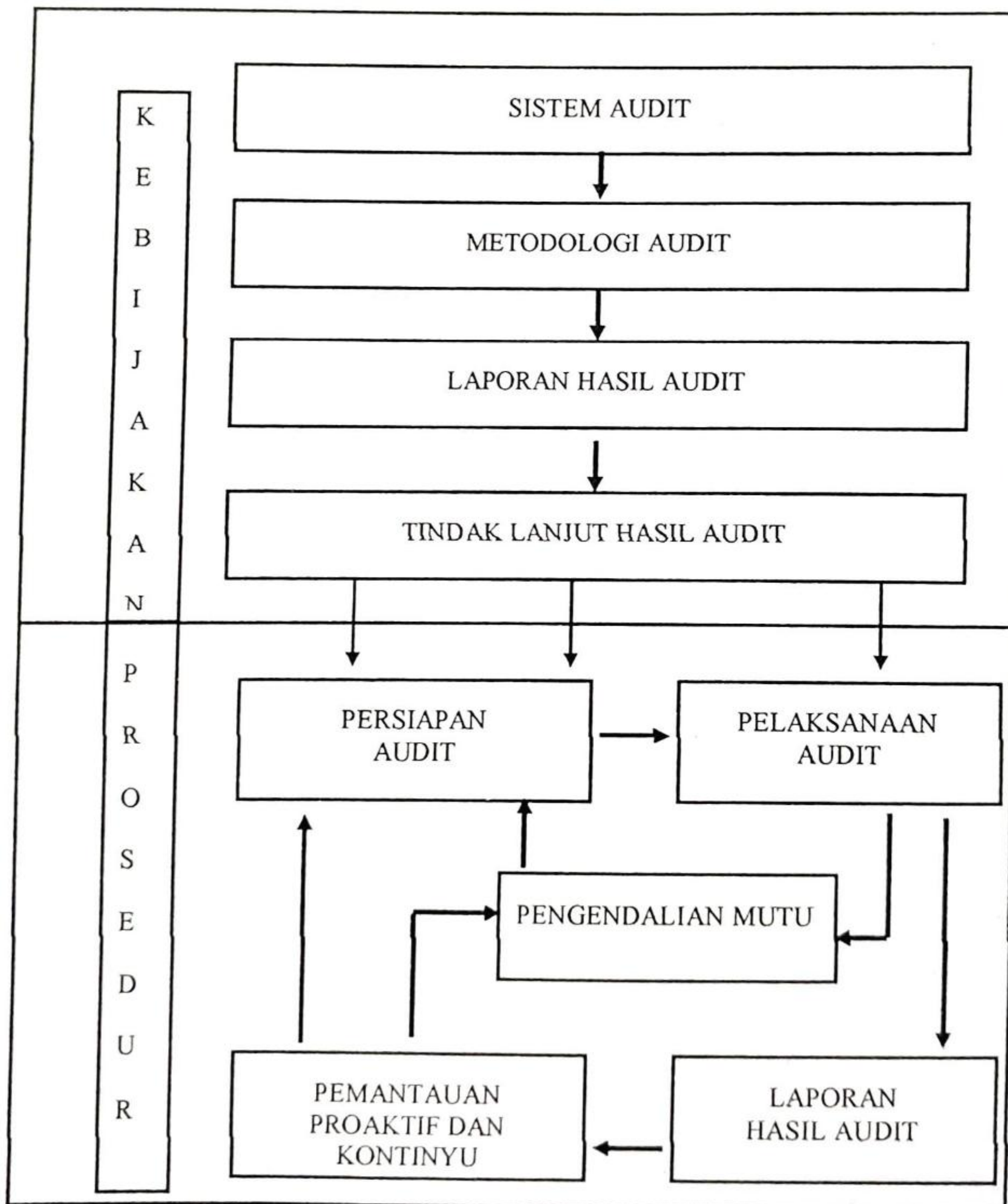
A. PERBEDAAN PENDEKATAN AUDIT INTERNAL DAN EKSTERNAL

AUDIT INTERNAL	AUDIT EKSTERNAL
Menentukan profil risiko dan membuat PKAT atas dasar profil risiko (diurut dari Cabang yang mempunyai risiko tertinggi s/d terendah.	Tidak melakukan penentuan profil risiko.
Meneliti sumber ² data berkaitan dengan cabang yang akan diaudit.	Melakukan survey pendahuluan ke bank/cabang bank yang akan diaudit (dengan membuat Internal Control Questionnaires = ICQ).
Membuat Laporan Audit Pendahuluan berdasarkan data di atas, sekaligus menentukan tim audit, jumlah hari pemeriksaan, serta anggaran waktu dan biaya. Program Audit sudah distandardisir.	Kembali ketempat dan membuat Program Audit serta Laporan Audit Pendahuluan berdasarkan data yang ditemukan, sekaligus menentukan tim audit, jumlah hari pemeriksaan dan anggaran waktu & biaya.
Melakukan audit a/d Program Audit.	Melakukan audit a/d Program Audit.
Melakukan diskusi hasil audit.	Melakukan diskusi hasil audit.
Membuat laporan hasil audit.	Membuat laporan hasil audit.
Melakukan pemantauan dan membuat laporan hasil pemantauan.	-

 BANK MALUKU <i>Satu Maluku</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	<i>Hal.</i> 37
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

B. METODE AUDIT

1. Model Sistem Audit



 BANK MALUKU <i>Solo Melipai</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	Hal. 38
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

C. SARANA AUDIT

Agar audit dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka pelaksanaannya harus menggunakan sarana audit yang ditetapkan, yaitu :

1. Program Audit

Program Audit untuk Cabang berikut aktivitasnya serta Program Audit untuk Kantor Pusat diuraikan pada lampiran.

2. Kertas Kerja Audit (KKA)

Form/bentuk KKA beserta pengisiannya terlampir.

3. *Exception Reports*

Sejak Komputer digunakan dalam transaksi perbankan, transaksi yang dapat ditangani tumbuh menjadi sedemikian banyak, pada sebuah Bank yang besar bisa mencapai ratusan transaksi bahkan ribuan transaksi per-harinya.

Transaksi yang terakumulasi dalam Database Perbankan tidak saja berasal dari data yang diinput oleh para teller atau oleh petugas *Back office*, tetapi data tersebut mungkin berasal dari transaksi remote yang berasal dari ATM atau dari Bank-Bank lain melalui sistem dari RTGS dan bahkan oleh para nasabah sendiri melalui tele Banking.

Risiko yang timbul atas meningkatnya transaksi akan meningkat juga, dan senantiasa harus diteliti serta dilakukan audit atasnya.

Interogasi data untuk keperluan audit terhadap data yang terakumulasi dalam database yang sedemikian banyaknya, tidak mungkin lagi dilakukan secara manual tetapi harus dilakukan dengan komputer dengan bantuan sebuah aplikasi yang ditujukan untuk melakukan penelusuran data yang memungkinkan kesalahan-kesalahan terdeteksi dengan mudah dan cepat serta sedini mungkin.

Branch Internal Control Support System adalah suatu sistem yang mampu menelusuri *database record* dalam jumlah yang besar dengan Cepat dan Tepat.

 BANK MALUKU <i>Sila Melipat</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	Hal. 39
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

BICSS (*Branch Internal Control Support System*) adalah aplikasi yang ditujukan sebagai alat bantu pemeriksaan Audit/Kontrol Intern dengan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) atau *Computer Assisted Audit Tehniques* (CAAT's) BICSS Membantu Auditor dalam melakukan interogasi data, baik secara berkala maupun secara mendadak untuk melakukan proses pengurutan, pemisahan, pengklasifikasian dan penggabungan File Master (Tabungan, Deposito, Giro, Pinjaman, User), File Transaksi (Historical Transaksi Harian), File Parameter (Biaya, Bunga, Wewenang User), sehingga kesalahan-kesalahan transaksi dan penyimpangan kepatuhan dapat terdeteksi dalam bentuk laporan khusus (*exception reports*) secara terinci dan terpisah antara lain:

➤ **Data Pinjaman (Loan):**

- 1) Laporan Bunga Pinjaman dibawah Limit,
- 2) Laporan Pengenaan Bunga di luar ketentuan yang berlaku (di atas atau di bawah bunga yang ditentukan),
- 3) Laporan Pinjaman Jatuh Tempo yang belum diperpanjang,
- 4) Laporan Kolektibiliti Murni,
- 5) Laporan Pinjaman Overdraft,
- 6) Laporan Debitur Dominan yang mungkin diperlukan untuk pengukuran target ekspansi kredit atas debitur-debitur tertentu,
- 7) Dan lain sebagainya

➤ **Data Giro:**

- 1) Laporan Saldo Minimum dibawah limit,
- 2) Laporan Bunga diatas limit,
- 3) Dan lain sebagainya

➤ **Tabungan:**

- 1) Saldo Minimum dibawah limit,
- 2) Laporan Bunga diatas limit,

 BANK MALUKU <i>Solo Mediap</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	Hal. 40
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

- 3) Laporan Penabung Pasif (lama tidak bermutasi),
- 4) Dan lain sebagainya

➤ **Data Deposito:**

- 1) Laporan Bunga diatas limit,
- 2) Laporan Cadangan Bunga,
- 3) Laporan Deposito Sudah Jatuh Tempo Belum Diperpanjang,
- 4) Dan lain sebagainya

➤ **Data Neraca:**

- 1) Laporan Posisi Gabungan Cabang,
- 2) Laporan Perbandingan Neraca,
- 3) Laporan Rekening Antar Kantor,
- 4) Laporan Perbandingan Laba Rugi,
- 5) Dan lain sebagainya

Laporan-laporan di atas dapat dikembangkan sesuai kebutuhan atau permintaan User.

Berdasarkan data-data di atas, Tim Audit akan dapat membuat preaudit dengan analisis yang lebih tajam dan lebih menghemat penggunaan waktu pada saat melakukan audit di cabang, karena auditor tidak perlu membuka berkas-berkas cabang yang berhubungan dengan obyek yang dicari.

Dengan kemampuan melakukan proses pengurutan, pemisahan, pengklasifikasian dan penggabungan File Master (Tabungan, Deposito, Giro, Pinjaman, User), File Transaksi (Historical Transaksi Harian), File Parameter (Biaya, Bunga, Wewenang User), BICSS dapat dikembangkan menjadi :

- *Report center* yang mampu menerbitkan **berbagai sajian laporan** baik untuk manajemen maupun untuk kepentingan pihak ketiga.

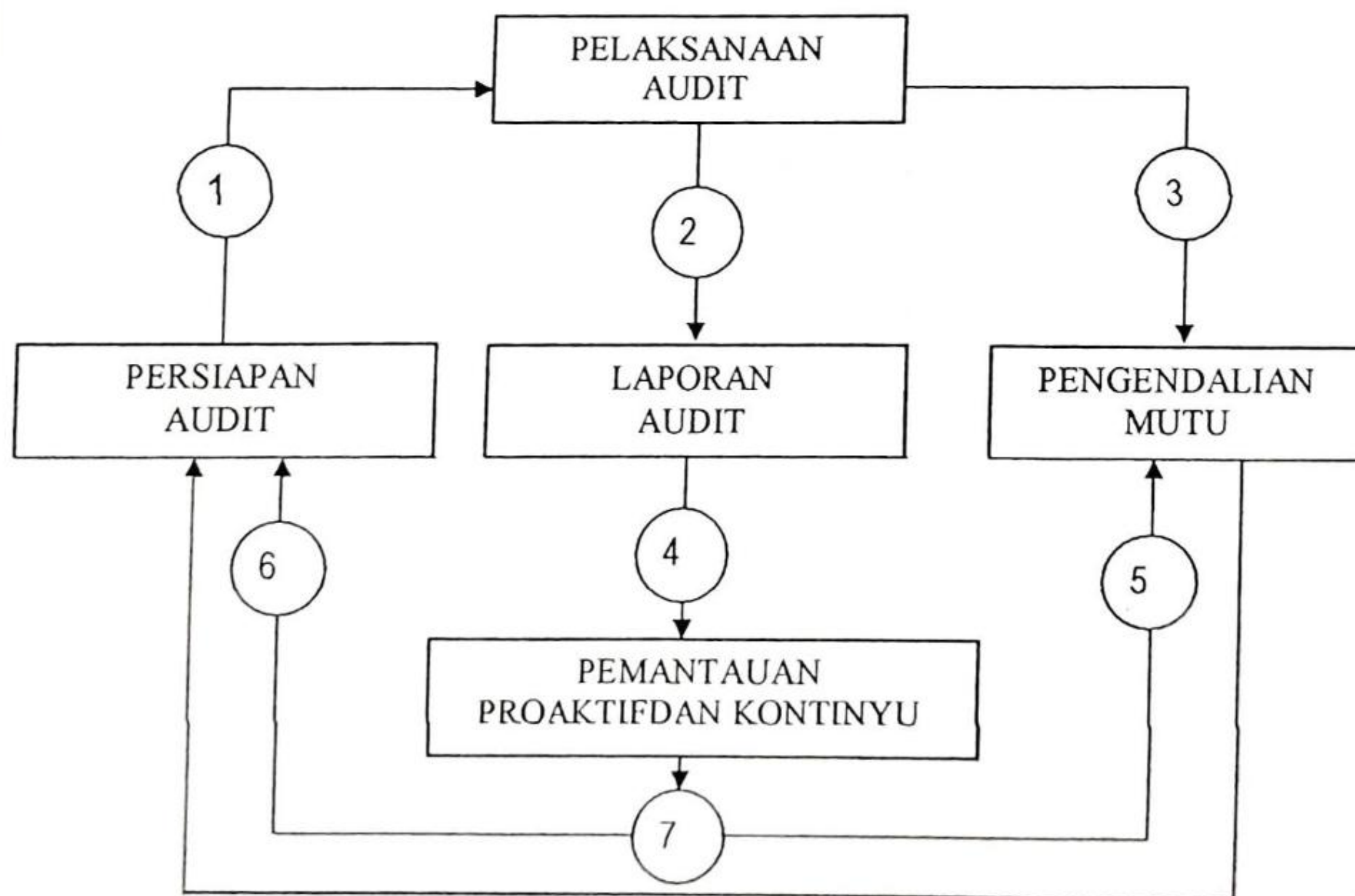
 BANK MALUKU <i>Sila Rileksi</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	<i>Hal.</i> 41
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

- Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang memberi informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan, dalam bentuk sajian yang diinginkan dengan filter data sesuai kebutuhan.
- Sistem rekonsiliasi rekening antar kantor.
- Sistem perhitungan ratio keuangan dlsb.

Bahkan secara lebih luas dapat dikembangkan menjadi *Data Ware House*

D. PROSES KEGIATAN AUDIT

Proses kegiatan audit dapat digambarkan sebagai berikut :



 BANK MALUKU <i>Sate Malapari</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	<i>Hal.</i> 42
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

BAB V

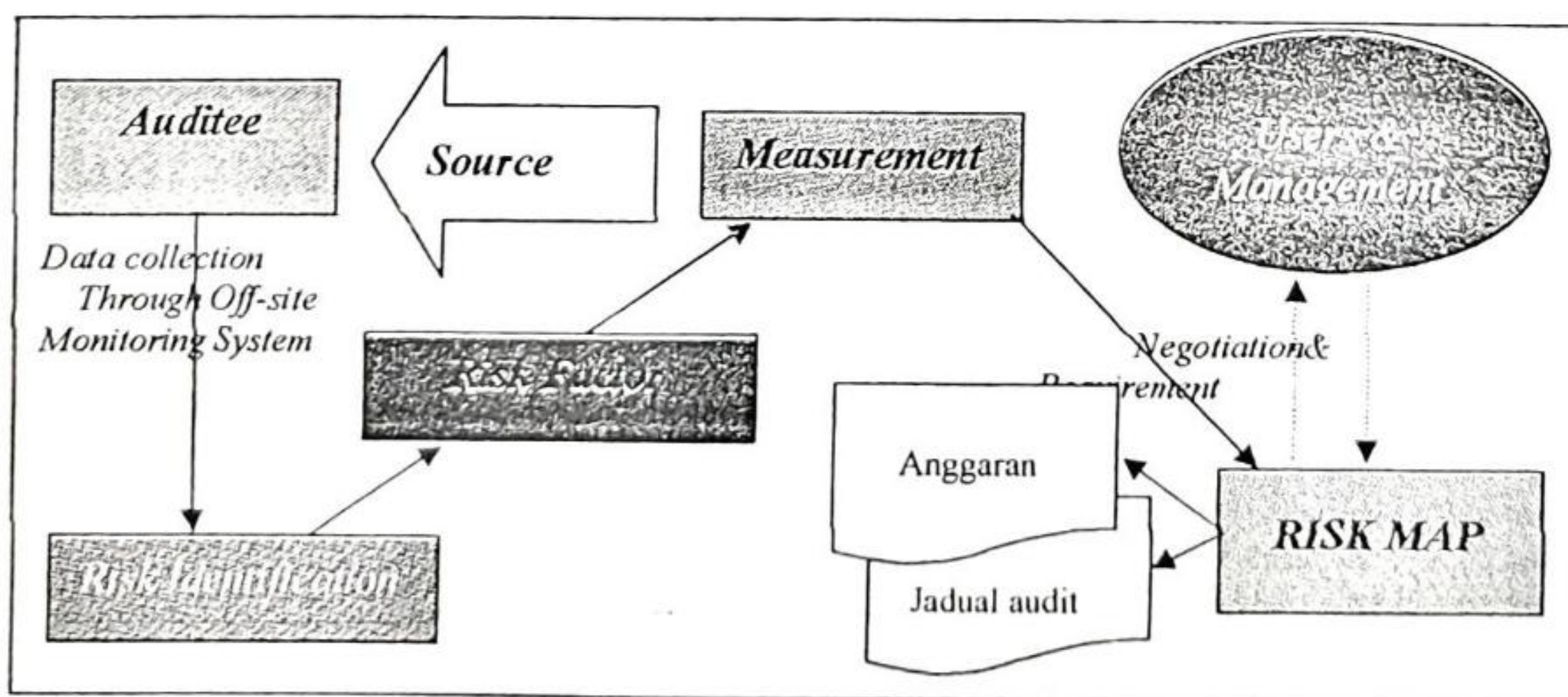
PERSIAPAN AUDIT

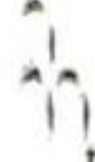
A. PERENCANAAN

Dengan adanya perubahan konsep pelaksanaan Audit dari “*at all cost*” menjadi “*risk based*”, dalam tahapan proses perencanaan, *Risk Assessment* Pengkajian Risiko mendapatkan porsi terbesar untuk dilaksanakan sehingga pelaksanaan audit khususnya *on site audit* tidak lagi dilaksanakan 100%, tetapi lebih difokuskan pada Obyek Audit yang mengandung risiko tinggi.

Berdasarkan hal di atas, maka penyusunan rencana kegiatan audit yang selama ini hanya didasarkan pada ketersediaan sumber daya audit (waktu, biaya, dan tenaga auditor) serta hasil audit sebelumnya, selanjutnya audit lebih difokuskan pada obyek audit yang mengandung risiko lebih tinggi untuk menetapkan skala prioritas pelaksanaan audit dengan batasan waktu dan tenaga audit (sumber daya audit).

Skema Proses Perencanaan & Pengkajian Risiko :



 BANK MALUKU <i>Satu Melayu</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	<i>Hal.</i> 43
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

B. Sources /Sumber Data untuk Pengkajian Risiko

Sources/Sumber Data untuk Pengkajian Risiko ada dasarnya secara umum sama dengan *off-site monitoring*, karena pelaksanaannya juga didasarkan kepada laporan pemantauan triwulanan, yaitu :

1. General Audit (Audit Umum)

- a. Laporan Profil Risiko dari Satuan Kerja Manajemen Risiko,
- b. Hasil off-site monitoring,
- c. Hasil audit yang lalu,
- d. Hasil audit eksternal (jika ada),
- e. Business Plan dan Kaji Ulang,
- f. Laporan Aktivitas Cabang,
- g. Laporan Kasus,
- h. Laporan Auditor Cabang,
- i. Kebijakan dan Peraturan yang terkait dengan *auditable activities*,
- j. Hasil CAAT's (Hasil Audit Berbantuan Komputer, jika sudah ada) : Exception Reports,
- k. Laporan Keuangan, dan
- l. Laporan Profitabilitas dari Divisi Perencanaan dan Keuangan.
- m. Laporan dari Divisi Teknologi Informasi.

2. Audit TI (jika sudah dilakukan)

- a. Business Plan Kantor Pusat (Divisi Teknologi Informasi),
- b. Laporan Komite Teknologi,
- c. Hasil Pertemuan Komite Teknologi,
- d. Laporan User Requirement,
- e. Laporan Tes (*Internal & User Acceptance Test*),
- f. Laporan Permasalahan, dan
- g. Laporan Perbaikan program.

 BANK MALUKU <i>Satya Melayani</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	<i>Hal.</i> 44
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

C. Proses Pengkajian Risiko (*Risk Assessment*)

Proses Pengkajian Risiko (*Risk Assessment*) dalam tahapan perencanaan audit dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tahap *Off-site Monitoring*

- a. Masing-masing auditor mengumpulkan data/sources pemantauan, khususnya sehubungan dengan auditee pantauannya, yang pelaksanaannya sesuai dengan jadwal dan dibuatkan Laporan Pemantauan Triwulanan.
- b. Auditor pemantau melakukan analisis terhadap data/sources tersebut untuk mengidentifikasi adanya risiko pada auditee pantauannya. Pelaksanaan analisis tersebut didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Audit sebagai data pendukung pelaksanaan *Risk Assessment*/Pengkajian Risiko.
- c. Risiko yang telah diidentifikasi dikelompokkan dalam Risk Factor yang telah ditetapkan, kemudian hasilnya dituangkan kedalam **Laporan Hasil Pemantauan** untuk dilakukan "*Measurement*" berupa pemberian score berdasarkan "*Risk Range*" dan pembobotan untuk menetapkan "*Risk Classification*" untuk auditee tersebut.
- d. **Laporan Hasil Pemantauan** disampaikan kepada KepalaSKAI untuk dilakukan review terhadap pelaksanaan Pengkajian Risiko tersebut dan diberikan disposisi.
- e. Khusus untuk auditee cabang-cabang, berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan yang telah di-review oleh KepalaSKAI tersebut, *risk range* per *risk factor*-nya diinput oleh Auditor bersangkutan dalam "*Aplikasi Scoring System*" (bila sudah menggunakan sistem komputer) sebagai bahan pemrosesan *Mapping Risk*, kalau belum menggunakan sistem komputer, dimasukkan kedalam **Kartu Sistem Scoring** secara manual sebagai kartu monitoring Cabang-cabang. Data olahan komputer dilampirkan bersama dengan Laporan Hasil Pemantauan.

 BANK MALUKU <i>Satu Rasa</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	<i>Hal.</i> 45
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

2. Tahapan Risk Mapping

- a. Berdasarkan hasil olahan komputer dari "*Aplikasi Risk Assessment*" berupa *Risk Map* yang mencantumkan hasil *risk assessment* dari masing-masing auditee secara berurutan berdasarkan *Risk Classification*-nya, maka ditetapkan auditee-auditee yang mendapat prioritas untuk dilaksanakan *On-site Audit* (*High Risk*, *Moderate to High Risk*, *Moderate Risk* dan *Low to Moderate Risk*) dan auditee yang cukup dilaksanakan *Off-site Audit* (*Low Risk*) pada tahun audit.
- b. Prioritas *On-site Audit* berdasarkan pendekatan audit berbasis risiko memiliki 2 (dua) arti khusus yang dikelompokkan pada jenis auditee-nya yaitu:
 - 1). Auditee berupa cabang-cabang
 Karena dianggap memiliki karakteristik aktivitas operasional dan bisnis yang sama, maka *on-site audit* terhadap cabang-cabang diperlakukan sebagai sampel secara keseluruhan Bank MALUKU. Dengan pendekatan audit berbasis risiko ini, pelaksanaan *on-site audit* hanya diprioritaskan kepada cabang-cabang yang diidentifikasi memiliki risiko menengah dan tinggi saja. Sedangkan yang memiliki risiko rendah cukup dilaksanakan *off-site audit*. Makin kompleks dan makin tinggi risiko yang ada pada suatu cabang, alokasi waktunya akan lebih banyak.
 - 2). Auditee berupa unit-unit di Kantor Pusat
 Masing-masing auditee memiliki karakteristik aktivitas operasional dan bisnis yang berbeda/spesifik, maka terhadap seluruh auditee tetap dilaksanakan *on-site audit* pada tahun audit bersangkutan.
 Dengan pendekatan audit berbasis risiko, masing-masing auditee mendapatkan porsi alokasi waktu *on-site audit* berdasarkan ranking/urutan *risk classification*-nya.

 BANK MALUKU <i>Satu Maluku</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	Hal. 46
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

3). Auditee berupa Divisi Teknologi Informasi

Mengingat bahwa auditee berupa Divisi Teknologi Informasi tidak hanya unit-unitnya saja tetapi termasuk aplikasinya, dengan pendekatan audit berbasis risiko untuk audit aplikasi, prioritas pelaksanaan dan alokasi waktunya didasarkan kepada ranking/urutan *risk classification*-nya (pelaksanaan *on-site audit* hanya diprioritaskan kepada aplikasi yang diidentifikasi memiliki risiko tinggi). Yang memiliki risiko rendah cukup dilaksanakan *off-site audit*.

3. Tahap *Negotiation* dan *Requirement*

Hasil Risk Assessment berupa Risk Map sebelum difinalkan sebagai Program Kerja Audit Tahunan harus dinegosiasikan kepada Direksi dengan maksud untuk menyamakan arah/misi audit dengan konsep *Risk Based Audit* dengan bentuk menampung/meminta masukan, khususnya informasi yang bersifat penting sebagai bahan finalisasi Program Kerja Audit Tahunan (PKAT).

D. Perencanaan Audit dengan Pendekatan Berbasis Risiko

Hasil *Risk Map* yang telah dinegosiasikan kepada Direksi pada tahapan ini diformalkan menjadi Program Kerja Audit Tahunan, khususnya berupa Jadwal Audit, alokasi waktu, serta anggaran biayanya.

Program kerja audit dalam bentuk Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) merupakan wewenang dari Ketua Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) untuk menetapkan.

Program Kerja Audit Tahunan ini disampaikan kepada Direktur Utama dan Komite Audit untuk mendapatkan persetujuan.

1. Frekuensi Audit

Semakin rendah *risk level* (*moderate risk*) audit dapat dilakukan dengan *on-site audit* dengan frekuensi yang lebih rendah dibandingkan dengan *risk level* yang tinggi (*high risk*).

 BANK MALUKU <i>Saja Melaprei</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	Hal. 47
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

Risk Level	Frekuensi Audit
<i>Low risk</i>	Tidak diperiksa (maksimum 2 tahun), atau diperiksa hanya aktivitas ² yang berisiko tinggi saja
<i>Low to Moderate dan Moderate risk</i>	Setahun sekali
<i>Moderate to High dan High risk</i>	6 bulan sekali atau 9 bulan sekali

2. Waktu Audit

Waktu audit ditetapkan berdasarkan klasifikasi risiko masing-masing auditee.

Standar waktu audit didasarkan kepada klasifikasi risiko sebagai berikut :

Auditee	Low*	Low to Moderate	Moderate	Moderate to High	High
Kantor Cabang Utama	6 hk	7 hk	8 hk	9 hk	10 hk
Cabang Kelas I	3 hk	4 hk	5 hk	6 hk	7 hk
Cabang Kelas II	3 hk	4 hk	5 hk	6 hk	7 hk
Cabang Kelas III	3 hk	4 hk	5 hk	6 hk	7 hk
Cabang Pembantu 1 (Capem)	3 hk	4 hk	5 hk	6 hk	7 hk
Cabang Pembantu 2 (Capem)	2 hk	3 hk	3 hk	4 hk	4 hk
Kantor Kas	1 hk	2 hk	2 hk	3 hk	3 hk
Payment Point	1 hk	2 hk	2 hk	3 hk	3 hk

Catatan: Jumlah hari pemeriksaan, tergantung kepada kebijakan SKAI Bank MALUKU

(untuk Cabang luar kota, tidak termasuk hari perjalanan)

* Untuk aktivitas yang berisiko tinggi

 BANK MALUKU <i>Saja Melayani</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	Hal. 48
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

Contoh: Jika Kantor Cabang Kelas I mempunyai 2 Cabang Pembantu dan 2 Kantor Kas, maka jumlah hari pemeriksaan menjadi sebagai berikut:

Auditee	Low*	Low to Moderate	Moderate	Moderate to High	High
Kantor Cabang Kls I	4 hk	5 hk	6 hk	7 hk	8 hk
2 Cabang Pembantu	4 hk	5 hk	6 hk	7 hk	8 hk
2 Kantor Kas	2 hk	3 hk	4 hk	5 hk	6 hk
Jumlah hari pemeriksaan	10 hk	13 hk	16 hk	19 hk	22 hk

Catatan: Jumlah hari kerja di atas tergantung kebijakan SKAI Bank MALUKU. Demikian pula untuk pemeriksaan cabang-cabang lain dengan kelas-kelas yang berbeda.

Untuk Kantor Pusat (Divisi) diperlukan waktu audit 12 (dua belas) hari kerja. Standar audit di atas dapat dilakukan perubahan/penyesuaian jika dari hasil *risk assessment* terdapat ketidak-efektifan perencanaan audit. Cabang dengan klasifikasi *low risk* dan *moderate risk* dapat dilakukan *on-site audit* dengan tetap melakukan *off-site monitoring*. Sedang Cabang dengan klasifikasi *Moderate to high risk* dan *high risk*, tetap dilakukan *on-site audit* dengan frekuensi yang lebih tinggi.

Langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam tahap perencanaan, meliputi :

1. Penentuan Objek yang diperiksa dan jadual audit

Penentuan objek yang diaudit dan jadual kegiatan audit agar berpedoman pada Program Kerja Audit Tahunan yang telah disetujui oleh Direktur Utama, apabila ada perubahan sehingga tidak sesuai dengan PKAT, maka rencana objek dan jadual kegiatan audit tersebut agar dilaporkan kepada Direktur Utama disertai dengan pertimbangannya dan alasan yang kuat.

 BANK MALUKU <i>Sila Melaprei</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	Hal. 49
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

2. Menetapkan Tim Audit

- a. Penetapan penugasan audit adalah pemberitahuan kepada auditor sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam PKAT.
- b. Penetapan penugasan kepada tim audit disampaikan oleh Ketua Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

Susunan tim audit terdiri dari Kepala dan anggota tim audit. Ketua tim dapat merangkap Ketua diskusi, kecuali ditetapkan lain.

- c. Jumlah tim audit yang ditugaskan disesuaikan dengan volume dan kompleksitas objek yang akan diperiksa, dengan maksud agar :
 - 1). Tim audit mampu memeriksa seluruh kegiatan pada unit yang diperiksa.
 - 2). Terdapat keseimbangan antara tim audit dengan kegiatan atau unit yang akan diaudit.

Jumlah tenaga auditor untuk masing-masing Divisi dan Cabang ditentukan sebagai berikut:

Auditee	Jumlah Auditor
Kantor Pusat (Divisi)	2 orang
Kantor Cabang Utama- Ambon	6 orang
Kantor Cabang Ternate	4 orang
Kantor Cabang Utama Jakarta	3 orang
Cabang Kelas I	3 orang
Cabang Kelas II	3 orang
Cabang Kelas III	3 orang
Cabang Pembantu 1 (Capem)	2 orang
Cabang Pembantu 2 (Capem)	2 orang
Kantor Kas	2 orang
Payment Point	2 orang

Catatan: Termasuk Ketua Tim.

- d. Susunan tim audit sudah ditunjuk atau ditetapkan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum kegiatan audit dimulai, dengan maksud agar:
 - 1). Tim audit mempunyai waktu yang cukup untuk persiapan audit.

 BANK MALUKU <i>Solo Maluku</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	Hal. 50
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

- 2). Ketua Tim dapat mengevaluasi kemungkinan adanya perubahan yang mendasar terhadap susunan tim audit dimaksud.
- e. Jumlah tim audit disesuaikan dengan jumlah Auditor yang tercantum dalam PKAT tahun berjalan, apabila pada saat penetapan/penunjukkan tim audit terdapat Auditor yang berhalangan dan tidak dapat dihindari, dapat ditunjuk Auditor penggantinya.
- f. Personalia formasi tim audit diusahakan **tidak boleh sama** dengan personalia formasi tim audit sebelumnya. Seorang Auditor dapat ditugaskan melakukan audit pada unit organisasi (*auditee*) yang sama sebanyak 2 (dua) kali audit berturut-turut dan hanya satu Auditor dalam tim audit dimaksud.
- g. Penetapan tugas setiap anggota tim berdasarkan kemampuan dan keahlian masing-masing, khusus dibidang manajerial sebaiknya dilakukan oleh Ketua tim.

3. Penetapan Kriteria Ketua Tim Audit

Auditor yang ditunjuk sebagai Ketua tim harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Menguasai teknik, sistem dan prosedur audit, memiliki pengetahuan dan kompetensi yang cukup terhadap seluruh kegiatan unit yang diperiksa.
- b. Memiliki kemampuan dalam memimpin tim audit.
- c. Apabila Auditor pertama kali ditunjuk sebagai Ketua tim, maka Ketua diskusi dilakukan oleh Ketua Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
- d. Memiliki pertimbangan (*judgement*) yang baik.
- e. Mempunyai pengalaman yang cukup dalam audit.

 BANK MALUKU <i>Seti Melayani</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	<i>Hal.</i> 51
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

4. Penunjukan Ketua tim diatur sebagai berikut :

Auditee	Ketua Tim (minimal)	Ketua Diskusi (Kepala SKAI)
- Capem/Ktr.Kas	- Senior Auditor	- Senior Auditor
- Cabang Kls III	- Senior Auditor	- Senior Auditor
- Cabang Kls II	- Senior Auditor	- Senior Auditor
- Cabang Kls I	- Senior Auditor	- KepalaSKAI
- Cabang Utama	- Senior Auditor	- KepalaSKAI
- Ktr.Pusat(Divisi)	- Sr.Auditor/Kepala SKAI	- Kepala SKAI

5. Metode pendekatan Auditor intern.

Auditor intern harus mampu menggunakan metode-metode pendekatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan audit, agar pelaksanaan audit dapat berlangsung secara efektif dan efisiensi.

Metode pendekatan tersebut dapat berbeda antara satu Auditor dengan Auditor lainnya, namun sekurang-kurangnya auditor intern perlu memperhatikan aspek-aspek teknis seperti cara dan penetapan sampling, teknik pengujian yang akan dilakukan, minimal bukti audit yang diperlukan dan cara mendapatkannya, serta memperhatikan azas materialitas.

6. Pengumpulan dan Pengkajian Data/Informasi.

Semua data/informasi penting serta relevan mengenai unit yang akan diperiksa perlu dikumpulkan dan dikaji oleh tim audit untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang memerlukan perhatian dalam audit, meliputi :

a. Informasi dari Satuan Kerja Audit Intern:

- 1). Laporan Hasil Audit berikut pengarahan/petunjuk Direktur Utama.
- 2). Temuan Hasil Audit berikut Daftar Temuan Administratif.
- 3). Perkembangan tindak lanjut hasil audit.
- 4). Surat menyurat yang berkaitan dengan hasil audit.

 BANK MALUKU <i>Satu Melipai</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	<i>Hal.</i> 52
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

- 5). Catatan-catatan yang ada pada Kertas Kerja Audit.
- 6). Hasil audit yang dilakukan pihak ekstern (jika ada).
- 7). Copy laporan hasil audit kasus/permasalahan yang dilakukan oleh unit yang akan diperiksa (selama periode audit), jika ada.
- 8). Copy Laporan hasil audit Kontrol Intern.
- 9). Data/Informasi lainnya.
- b. Data/informasi dari unit lain :
 - 1) Neraca dan Laba/Rugi berikut lampiran.
 - 2) Laporan profitabilitas dan laporan aktivitas keuangan lainnya.
 - 3) Business Plan serta Rencana Kerja dan Anggaran.
 - 4) Surat menyurat atau informasi lainnya.
- c. Data/informasi ekstern :
 - 1). Copy Laporan hasil audit Bank Indonesia, BPK, Akuntan Publik dan lain-lain (jika ada).
- d. Hal-hal yang perlu dikaji dari sumber data/informasi di atas sebagai berikut:
 - 1). Copy Laporan hasil audit Bank Indonesia,BPK, Akuntan Publik dan lain-lain (jika ada).
 - 2). Mereviu dan meneliti hasil audit sebelumnya, termasuk di dalamnya hasil audit yang dilakukan pihak ekstern maupun hasil audit yang dilakukan oleh Kontrol Intern.
 - 3). Temuan-temuan yang bersifat prinsipil dari hasil audit intern.
 - 4). Perkembangan tindak lanjut hasil audit yang belum selesai.
 - 5). Mengevaluasi laporan hasil audit kasus (jika ada).
 - 6). Laporan keuangan (mengevaluasi Neraca, Laba/Rugi, laporan profitabilitas dan laporan keuangan lainnya, serta mencatat pos-pos yang perlu mendapat perhatian dalam audit).

 BANK MALUKU <i>Satu Maluku</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	<i>Hal.</i> 53
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			
7). Laporan Sistem Informasi Manajemen (berdasarkan laporan SIM terakhir, kredit dan non kredit), dievaluasi dan dibandingkan dengan posisi sebelumnya untuk melihat perkembangannya.			
7. Persiapan Audit. a. Data atau informasi tersebut di atas yang telah dikaji, diidentifikasi dan dianalisis dituangkan dalam bentuk laporan persiapan audit. b. Sistematika Laporan Persiapan Audit dapat dilihat pada <i>lampiran</i>. c. Penetapan rencana waktu audit. 1). Tim audit harus menetapkan lamanya waktu audit yang akan dilakukan, mulai dari tanggal persiapan audit sampai dengan tanggal laporan hasil audit. Lamanya waktu audit tersebut dirinci dalam bentuk jadual kegiatan audit masing masing anggota tim audit. 2). Penetapan rencana lama waktu audit didasarkan pada : ♦ Ruang lingkup audit. ♦ Permasalahan yang telah diidentifikasi. ♦ Jumlah tim audit. ♦ PKAT tahun berjalan. 3). Contoh form rencana waktu audit dapat dilihat pada <i>lampiran</i>. 4). Setelah tim audit kembali ke tempat, realisasi waktu audit dibandingkan dengan rencana waktu audit yang telah ditetapkan. d. Penetapan rencana anggaran biaya audit. 1). Untuk audit terhadap unit yang lokasinya tidak sekota dengan Satuan Kerja Audit Intern, tim audit harus menetapkan prakiraan besarnya biaya audit yang komponennya terdiri dari biaya perjalanan dinas, biaya akomodasi dan biaya transportasi. 2). Dalam menyusun prakiraan besarnya biaya audit adalah prakiraan anggaran biaya audit berdasarkan PKAT tahun berjalan, meliputi :			

 BANK MALUKU <i>Solo Mediasi</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	Hal. 54
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

- ♦ Jumlah hari perjalanan dinas sejak tanggal keberangkatan sampai dengan tanggal kembali.
- ♦ Jumlah formasi tim audit berikut komposisi level/peringkat.
- ♦ Jenis transportasi dan biaya yang direncanakan.

Contoh form rencana anggaran audit dapat dilihat pada *lampiran*.

- 3). Setelah tim audit kembali ke tempat, realisasi biaya audit dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan.
- e. Laporan persiapan audit, rencana waktu audit dan rencana anggaran biaya audit ditandatangani oleh Kepala tim audit dan disampaikan kepada Ketua Satuan Kerja Audit Intern untuk mendapatkan rekomendasi (persetujuan serta pengarahan).
- f. Persiapan audit lainnya.

Setelah laporan persiapan audit disetujui oleh Ketua Satuan Kerja Audit Intern, maka berturut-turut disiapkan :

1). **Surat tugas.**

Setiap tim audit yang melakukan audit pada suatu unit organisasi harus membawa surat tugas.

Surat tugas tersebut ditujukan langsung kepada unit yang akan diperiksa dan harus secara tegas menyebutkan :

- ♦ Susunan tim audit.
- ♦ Sifat audit (umum/khusus).
- ♦ Sasaran audit.
- ♦ Jangka waktu audit.
- ♦ Kewenangan Ketua tim memimpin diskusi dan menandatangani Temuan Hasil Audit. Jika Ketua tim tidak memimpin diskusi, agar disebutkan bahwa Kepala diskusi akan datang kemudian.

Contoh surat tugas audit dapat dilihat pada *lampiran*.

 BANK MALUKU <i>Solo Malapua</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	<i>Hal.</i> 55
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

2). **Surat Perjalanan Dinas.**

Surat Perjalanan Dinas untuk masing-masing anggota tim audit yang akan melakukan perjalanan dinas cfm. BPP Kepegawaian yang berlaku.

3). **Sarana audit** yang perlu dipersiapkan adalah Kertas Kerja Audit, alat tulis menulis dan lain-lain.

4). **Akomodasi dan Transportasi.**

g. Tim audit diperkenankan mengambil biaya perjalanan dinas, untuk menghindari pengambilan persekot di unit yang diperiksa. Jumlah persekot perjalanan dinas disesuaikan dengan jumlah hari perjalanan yang ditetapkan.

h. Bila selama berjalannya audit ditemukan kasus, Ketua Tim wajib melaporkan kepada Ketua Satuan Kerja Audit Intern untuk memastikan apakah tim tersebut perlu melanjutkan audit khusus setelah audit umum, atau Ketua Satuan Kerja Audit Intern menunjuk tim lainnya untuk melakukan audit khusus.

E. Risk Assessment Structure

Catatan :

- Apabila telah lebih atau sama dengan 2 tahun tidak diaudit, risiko unit tersebut secara otomatis berubah menjadi High Risk dengan mengabaikan kondisi yang lainnya.
- Apabila terjadi fraud, maka hasil assessment per jenis aktivitas menjadi High Risk.
- Apabila rating audit terakhir “buruk”, maka hasil assessment adalah High Risk.

Penghitungan Level Risiko

Setelah dibuatkan matriks risiko, SKAI dapat menghitung *Risk Level* dari tiap-tiap unit *auditee* dengan cara sebagai berikut:

 BANK MALUKU <i>Sada Melampai</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	Hal. 56
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

JENIS RISIKO	W (%)	SCORE	
		RATING	W x RATING
1. Risiko Kredit	20		
2. Risiko Likuiditas	15		
3. Risiko Operasional	15		
4. Risiko Hukum	15		
5. Risiko Strategi	15		
6. Risiko Kepatuhan	10		
7. Risiko Reputasi	20		
T o t a l	100		
R I S K L E V E L			

HASIL ASSESSMENT	
------------------	--

Sumber-sumber yang dapat dipertanggung-jawabkan untuk melakukan Risk Assessment, antara lain:

Sources/Data Sumber untuk Pengkajian Risiko:

1. Laporan Profil Risiko dari Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko
2. Hasil audit yang lalu,
3. Hasil audit eksternal (jika ada),
4. Business Plan dan Kaji Ulang,
5. Laporan Aktivitas,
6. Laporan Kasus,
7. Laporan Kontrol Intern,
8. Kebijakan dan Peraturan yang terkait dengan *auditable activities*,
9. Hasil Audit Berbantuan Komputer (jika sudah ada),
10. Laporan Keuangan (Neraca dan Laba/Rugi),
11. Laporan Profitabilitas dari Divisi Teknologi Informasi, dan
12. Proses Pengkajian Risiko (*Risk Assessment*).
13. Laporan pengkajian risiko dari Satuan Kerja Manajemen Risik

 BANK MALUKU <i>Solo Rispet</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	<i>Hal.</i> 57
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

Sumber data lain yang dapat mendukung Pengkajian Risiko:

1. File-file yang berhubungan dengan aktivitas kredit (pengadministrasian, pengusulan, pemutusan, pengikatan jaminan, pemasangan asuransi, dan sebagainya).
2. Tindak Lanjut Hasil Audit Tahun Lalu.
3. Disposisi Divisi terkait atas hasil audit tahun lalu.
4. Hasil Audit Kontrol Intern Bank Tahun Lalu.

F. Penilaian Terhadap Profil Risiko

a. Penilaian Terhadap Profil Risiko melalui Parameter Risiko Inherent dan Kualitas Penerapan manajemen Risiko

- **Lihat lampiran tentang matriks Risiko**

Catatan:

Mengingat sesuai PBI dan SEBI yang baru, tingkat risiko diubah dari 3 level menjadi 5 level, maka uraian tentang parameter risiko dilakukan perubahan.

Sebagian dari data diambil dari Laporan Risk Assessment yang dibuat oleh Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Selebihnya diambil dari sumber-sumber data yang diterima oleh SKAI.

Nilai yang diperoleh dapat menggambarkan tingkat risiko yang ada di Bank (High = 5, Moderate to High = 4, Moderate = 3, Low to Moderate Risk = 2, dan Low Risk = 1).

Sumber-sumber yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian dan pemberian angka, antara lain:

1. Laporan Neraca dan Laba-Rugi tahun lalu.

 BANK MALUKU <i>Solo Medika</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	Hal. 58
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

2. File-file yang berhubungan dengan aktivitas kredit (pengadministrasian, pengusulan, pemutusan, pengikatan jaminan, pemasangan asuransi, dan sebagainya).
3. Tindak Lanjut Hasil Audit Tahun Lalu.
4. Disposisi Divisi terkait atas hasil audit tahun lalu.
5. Hasil Audit Kontrol Intern Bank Tahun Lalu.

Masing-masing aktivitas yang akan dinilai dapat dihitung dengan menggunakan kolom-kolom sebagaimana terlihat dibawah, tetapi untuk setiap risk factor yang berkaitan dengan profitabilitas hanya diisi pada satu kolom saja (*Low, Low to Moderate, Moderate, Moderate to High, atau High risk*).

Kemudian angka-angkanya diambil untuk diisikan pada formulir di bawah ini, sehingga hasilnya seperti contoh di bawah ini.

JENIS RISIKO	W (%)	SCORE	
		RATING	W x RATING
1. Risiko Kredit	20	3	4,5
2. Risiko Likuiditas	15	4	2,0
3. Risiko Operasional	15	2	3,0
4. Risiko Hukum	15	5	5,0
5. Risiko Strategi	15	4	6,0
6. Risiko Kepatuhan	10	3	4,5
7. Risiko Reputasi	20	3	4,5
T o t a l	100	3	3,0
R I S K L E V E L			35.5

HASIL ASSESSMENT	Moderate to High Risk
------------------	------------------------------

Catatan:

Pada dasarnya pembuatan profil risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko, namun mengingat SKAI juga berkepentingan dengan hasil penilaian profil risiko cabang, maka SKAI juga berwenang melakukan perubahan-perubahan atau

 BANK MALUKU <i>Sada Malukani</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	Hal. 59
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

penyempurnaan melalui system penilaian profil risiko pada terminal yang ada di ruangan SKAI.

G. Program Kerja Audit Tahunan (PKAT)

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) wajib membuat rencana kegiatan audit yang menyeluruh terhadap unit-unit yang akan diaudit.

Perencanaan tersebut tertuang dalam Program Kerja Audit Tahunan dan Anggaran. Program Kerja Audit Tahunan dan Anggaran merupakan salah satu alat pengendalian manajemen terhadap audit Bank dalam satu tahun takwim dan disesuaikan dengan rencana dan anggaran yang ditetapkan.

Untuk mendukung pelaksanaan Program Kerja Audit Tahunan, maka perlu adanya anggaran biaya yang penyusunannya dibuat secara rinci untuk setiap unit yang diaudit. Program ini disusun berdasarkan kebijakan tahunan yang ditetapkan oleh Direktur Utama, dalam program ini dituangkan rencana-rencana kegiatan audit secara rinci:

1. Unit yang diaudit (Auditee)

Unit yang diaudit meliputi seluruh unit organisasi Bank dan auditnya di lakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

2. Sasaran Audit

a. Sasaran audit pada dasarnya meliputi :

➤ Audit Keuangan dan Ketaatan

Penilaian atas laporan keuangan dan kegiatan usaha yang dijalankan oleh unit organisasi Bank.

- ♦ Penilaian atas pengamanan kekayaan Bank.
- ♦ Penilaian atas ketaatan terhadap kebijakan, sistem dan prosedur yang berlaku (intern dan ekstern) atas seluruh kegiatan bisnis perbankan.

➤ Audit Bidang Operasional

 BANK MALUKU <i>Sada Malukani</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	Hal. 60
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

- ♦ Penilaian atas kelancaran dan peningkatan pelayanan (*service level*) pada masyarakat.
- ♦ Penilaian atas peningkatan daya guna dan hasil guna (termasuk penggunaan Teknologi Sistem Informasi).
- ♦ Penilaian atas pencapaian sasaran (*Business Plan*)
- Audit Bidang Manajemen
 - ♦ Penilaian atas pengelolaan risiko (*risk management*).
 - ♦ Penilaian atas pelaksanaan kewajiban pimpinan dalam bidang manajemen (termasuk pembinaan kepada pegawai).
 - ♦ Penilaian atas perilaku pimpinan dalam menciptakan suasana lingkungan kantor yang kondusif.
- b. Selain sasaran audit sebagaimana butir 2.a diatas, terdapat juga sasaran audit yang bersifat khusus, seperti audit kasus manipulasi dan kecurangan lainnya, karena sifatnya yang khusus, maka sasaran audit ini tidak dimasukkan dalam Program Kerja Audit Tahunan.
- c. Penentuan sasaran audit selama satu tahun disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) maupun Kebijakan Direksi.

3. Jadwal dan Lama Audit didasarkan atas :

- a. Waktu audit tahun yang lalu
- b. Potensi kerugian dan atau risiko
- c. Kompleksitas objek audit
- d. Permintaan Manajemen
- e. Perubahan dalam operasi perbankan (sistem dan prosedur kerja)

4. Staf Audit

Penugasan staf audit didasarkan pada pertimbangan :

- a. Keseimbangan dalam jumlah penugasan.

 BANK MALUKU <i>Satu Maluku</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	Hal. 61
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

- b. Kelonggaran waktu yang cukup diantara penugasan yang satu dengan penugasan berikutnya.
- c. Waktu untuk keperluan lain-lain seperti program pendidikan, cuti dan lain-lain

5. Bentuk, cara pengisian dan prosedur pembuatan PKAT

- a. Bentuk dan susunan form PKAT terdiri Formulir PKAT I, Formulir PKAT II, Formulir PKAT III dan ikhtisar PKAT.
- b. Cara pengisian masing-masing formulir, dapat dilihat pada *lampiran*.
- c. Formulir :
 - Form PKAT I
Diisi dengan menitikberatkan pada segi unit yang diaudit (auditee).
 - Form PKAT II
Diisi dengan menitikberatkan pada segi frekwensi audit dari masing-masing auditor.
 - Form PKAT III
Merupakan rangkuman dari form. PKAT I dan PKAT II yang memberikan gambaran rinci mengenai auditor, hari audit dan hari Audit.
 - Ikhtisar PKAT
Diisi perbandingan jumlah unit yang diaudit auditor dan alokasi penggunaan hari audit.
- d. Prosedur pembuatan PKAT
 - PKAT ditandatangani oleh Ketua Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
 - Disampaikan paling lambat akhir bulan Nopember tahun berjalan.
 - Dimintakan persetujuan Direktur Utama, selambat-lambatnya akhir tahun berjalan.

6. Anggaran biaya audit

- a. Penyusunan usulan anggaran biaya audit mengacu pada ketentuan yang berlaku.

 BANK MALUKU <i>Satu Melapae</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	Hal. 62
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

- b. Anggaran biaya audit disusun berdasarkan PKAT dan kebijakan audit yang ditetapkan oleh Direktur Utama untuk tahun bersangkutan.
 - c. Usulan anggaran biaya audit termasuk anggaran biaya lainnya untuk disampaikan kepada Direktur Utama.
 - d. Anggaran biaya audit termasuk dalam mata anggaran biaya kantor sub mata anggaran biaya perjalanan dinas.
 - e. Biaya audit terdiri dari :
 - Biaya transportasi
 - Lumpsum
 - Penyesuaian-penyesuaian karena kemungkinan adanya kenaikan biaya.
- Pemberian uang perjalan dinas dilakukan sekaligus pada saat tim audit akan berangkat ke Cabang dan diatur menurut ketentuan yang berlaku.

 BANK MALUKU <i>Solo Malukese</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	<i>Hal.</i> 63
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

BAB VI

PELAKSANAAN AUDIT

A. TAHAP PELAKSANAAN

Kertas Kerja Audit yang standar untuk digunakan oleh Auditor ialah :

a. Program Audit (Umum)

Program Audit (Umum) berisi tujuan audit dan langkah-langkah prosedur audit secara umum. Penggunaannya sejak persiapan audit untuk menentukan prosedur audit yang akan dilakukan oleh Auditor dan telah disetujui oleh Ketua Tim dan Ketua Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan bentuknya sudah *pre-printed*.

Prosedur Audit yang ada dalam Program Audit sesuai jenis pengujiannya, yaitu:

- Pengujian Ketaatan
- Pengujian Kebenaran/Akurasi

Secara rinci Program Audit Cabang diuraikan berdasarkan aktivitas yang ada, demikian pula dengan Program Audit Kantor Pusat (Divisi) - terlampir.

b. Lembar Pengujian

Lembar pengujian adalah bagian dari KKA yaitu KKA-2 dan KKA-3.

KKA-2 merupakan lembar pengujian untuk proses ketaatan/kepatuhan auditee terhadap peraturan yang berlaku, sedangkan KKA-3 adalah lembar pengujian terhadap kebenaran hasil perhitungan, baik yang dilakukan oleh system aplikasi computer maupun perhitungan manual, misalnya untuk perhitungan bunga kredit, bunga tabungan, jasa giro, bunga deposito, dan lain sebagainya.

Lembar Pengujian ini digunakan untuk mendokumentasikan proses pengujian yang lebih bersifat rinci (kelanjutan dari Program Audit).

Lembar Pengujian ini formatnya fleksibel sesuai dengan jenis pengujiannya, yaitu sebagai berikut :

 BANK MALUKU <i>Sada Hikmah</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	<i>Hal.</i> 64
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

- Berbentuk Narasi/Free Format untuk pengujian ketaatan tanpa sampel dan penyajian data tambahan untuk pengujian lainnya. Pengujian ini dituangkan dalam lembar pengujian secara bebas.
- Untuk pengujian ketaatan yang membutuhkan sampel. Format ini telah *pre-printed* yang telah disiapkan pada saat persiapan audit. Pengujian inipun dituangkan dalam Lembar Pengujian.
- Berbentuk kolom-kolom untuk pengujian kebenaran (tes akurasi untuk angka-angka).
- Copy dokumen juga merupakan Kertas Kerja Audit, khususnya Lembar Pengujian sebagai data pendukung pengujian selama memenuhi kriteria sebagai KKA, yaitu dilengkapi dengan sistem indeks/referensi/*tick mark*.

c. Exception Reports

Sebetulnya exception reports digunakan pada saat persiapan audit sebagai alat untuk mempermudah Auditor pada saat melakukan audit di lapangan.

d. Audit Check List

Audit Check List merupakan alat kontrol bagi Tim Audit dan atasannya untuk meyakinkan bahwa seluruh tahapan audit, yaitu : Persiapan, Pelaksanaan, Pelaporan, dan *Filing* telah dilaksanakan dan di-supervisi (lihat halaman 34).

Seluruh Kertas Kerja Audit (KKA) dan Program Audit harus di-review oleh Ketua Tim untuk memastikan bahwa seluruh prosedur audit telah dilaksanakan secara memadai dalam proses pengujian, bukti bahwa Kertas Kerja Audit (KKA) telah di-review Ketua Tim harus dicantumkan dalam Kertas Kerja pada tempat yang telah disediakan, kecuali Audit Check List (karena diisi oleh Ketua Tim).

Kertas Kerja Audit (KKA) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Dapat mendukung Laporan Hasil Audit.
- Kesimpulan atau dapat menggambarkan tercapai atau tidaknya tujuan audit.
- Mendukung bila terdapat kasus (fraud).

 BANK MALUKU <i>Sila Melayani</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	<i>Hal.</i> 65
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

- Menjadi salah satu parameter penilaian kinerja Auditor.
- Bermanfaat bagi pengembangan profesional untuk staf Audit Intern.
- Menjadi dasar evaluasi dalam rangka program pengendalian mutu audit intern.
- Bermanfaat dalam proses perencanaan.
- Memungkinkan untuk dikaji oleh pihak ketiga.

Selain kertas kerja audit di atas ada beberapa kesepakatan diantara Auditor mengenai istilah-istilah dibawah ini yang harus dipatuhi, antara lain:

a. Tickmark

Penggunaan tanda-tanda pengujian (*tickmark*) diperlukan dalam setiap tahapan pengujian yang dituangkan dalam Kertas Kerja Audit. Tanda-tanda pengujian harus dilengkapi dengan keterangan pengujian yang dilakukjan, bila mungkin digunakan warna-warna yang berbeda untuk setiap jenis tanda pengujian. Intinya, penggunaan *tickmark* harus mudah dipahami oleh pihak lain, khususnya bagi pihak lain yang melakukan review.

Contoh tickmark:

V = Sesuai

X = Tidak Sesuai

NA = Not Applicable (tidak berlaku = TB)

b. Subsequent Event

Subsequent Event disini didefinisikan sebagai peristiwa yang terjadi setelah tanggal periode audit, namun dalam masa pelaksanaan *on-site audit*, yang berisiko material ataupun non material, perlu pengungkapan pada laporan. Pelaporannya diklasidfikasikan menurut jenis aktivitasnya.

 BANK MALUKU <i>Solo Malukani</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	Hal. 66
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

c. Produk Tim Audit

Hasi dari proses audit secara keseluruhan yang merupakan produk dari Tim Audit dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Dibuat di Unit Auditee ialah yang disebut Rincian Hasil Audit, terdiri dari:

1). Hasil Audit Bersifat Prinsip Temuan Hasil Audit (THA).

Merupakan temuan audit yang sifatnya prinsip dan harus dimasukkan kedalam Temuan Hasil Audit dan didiskusikan pada saat diskusi akhir.

2). Hasil Audit Bersifat Administratif Temuan Administratif (TA).

Merupakan temuan audit yang bersifat teknis administratif atau temuan audit tidak material (kelalaian) yang sudah diperbaiki selama tim audit berada di cabang ybs.

b. Dibuat di kantor Divisi Audit Intern, terdiri dari :

1). *Resume* (khusus Audit Cabang).

2). Laporan Hasil Audit (kecuali audit cabang).

Khusus audit Cabang, produk Tim Audit ialah "**Hasil Audit**" yang terdiri dari: Resume dan Rincian Hasil Audit yang kemudian disampaikan kepada Pengelola Analisis Laporan untuk dibuatkan Laporan Hasil Audit (LHA) Cabang yang disampaikan kepada Direksi.

b. Perubahan Fungsi Audit

Perubahan fungsi audit yang dimaksudkan disini ialah perubahan fungsi audit sistem komputer yang menggunakan CAAT's (*Computer Assisted Audit Technique*) yang sebagian dialihkan kepada Audit Umum, dengan pembatasan :

a. Audit Umum : - *Test Transaction & Balance*
- *Procedure Review & Analysis*

c. TI/EDP Audit : -Uji Ketaatan atas Pengendalian Umum TI/Sistem Komputer.

1). Uji Ketaatan atas Pengendalian Aplikasi

2). *Penetration Test*

 BANK MALUKU <i>Solo Malukia</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	<i>Hal.</i> 67
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

d. Kehadiran Tim Audit

Audit tidak lagi dilakukan secara *surprised audit*. Secara formal rencana kedatangan Tim Audit ke tempat Auditee diberitahukan kepada Auditee secara formal beberapa hari sebelumnya.

Hal ini dimaksudkan untuk meminta kepada Auditee, khususnya manajemen Auditee guna mempersiapkan data-data yang diperlukan untuk melakukan *risk assessment* pada saat persiapan dan pada saat hari pertama *on-site audit*. Pada hari pertama Tim Audit (terutama Kepala Tim) melakukan *risk assessment* untuk mengevaluasi *audit focus* yang telah ditetapkan saat persiapan, yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara dengan :

- Manajemen Auditee,
- Para Penyelia/Supervisor di Cabang,
- Auditor Cabang, dan
- Lainnya yang dianggap dapat memberikan masukan/informasi.

Uraian mengenai kehadiran Tim Audit tersebut di atas tidak berlaku bagi pelaksanaan Audit Khusus (jika terjadi kasus). Oleh karenanya terhadap Audit Khusus masih diperlukan *Surprised Audit*.

a. Selama berlangsungnya audit, tim Audit harus dapat menjaga sikap dan penampilan, seperti :

- Berkomunikasi secara baik dan sopan dengan pimpinan dan staff unit yang diperiksa terutama dalam mengemukakan temuan hasil audit.
- Menjaga kewajaran penampilan diri antara lain cara berpakaian, gaya bicara, nada suara dan tingkah laku.
- Bertindak dengan penuh integritas dan objektif sesuai dengan standar audit dan kode etik auditor intern.
- Mengkomunikasikan permasalahan yang memerlukan penjelasan dengan penyelia atau staff yang membidangnya termasuk Auditor Cabang.

 BANK MALUKU <i>Satu Misi</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	Hal. 68
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

- Menghindarkan perdebatan yang berlarut-larut.

e. Peninjauan ke Tempat Usaha Debitur

- Jika menurut pertimbangan Audit berdasarkan hasil audit perkreditan, dipandang perlu untuk melakukan peninjauan ke tempat usaha debitur, antara lain karena terdapat pemberian kredit yang ditengarai adanya penyimpangan yang mengarah pada manipulasi (kasus).
- Data atau informasi kondisi debitur yang digunakan sebagai dasar analisa pemberian kredit, diragukan kebenarannya.
- Peninjauan ketempat usaha debitur dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Sebelum kunjungan dilakukan agar pemeriksa membuat catatan tentang rencana peninjauan dengan memberikan alasan sebagai dasar perlunya dilakukan peninjauan.
 - Catatan tersebut supaya diajukan kepada Ketua Tim untuk dimintakan persetujuan Ketua Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan dipergunakan sebagai dokumentasi audit.
 - Hasil peninjauan supaya dibuatkan Berita Acara dan diketahui oleh Kepala unit yang diperiksa.
 - Hasil peninjauan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

B. TEMUAN AUDIT

- Temuan Audit** adalah himpunan dan sintesa informasi mengenai suatu kegiatan, organisasi, kondisi atau hal-hal lainnya yang telah dianalisis, dinilai dan diperkirakan akan menarik/berguna untuk pejabat yang berwenang atau unit lainnya.
- Temuan Audit harus bersifat objektif dan mengungkapkan keberhasilan serta penyimpangan atau permasalahan secara jelas dan didukung dengan bukti-bukti

 BANK MALUKU <i>Satu Melampaui</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	Hal. 69
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

yang cukup, kompeten dan relevan, sehingga diperoleh data atau informasi sebagai dasar yang layak untuk menyusun laporan.

a. Bukti yang cukup

Bukti yang cukup adalah bukti yang berdasarkan fakta dan dari segi jumlah memenuhi keperluan. Untuk menentukan cukupnya bukti dapat digunakan metode statistik atau berdasarkan pertimbangan profesional.

b. Bukti yang kompeten

Bukti yang kompeten adalah bukti yang berkaitan dengan kualitas bukti, yakni bukti yang kuat dan dapat diandalkan. Beberapa faktor yang mempengaruhi dapat dipercaya tidaknya suatu bukti, ialah :

- Sumber bukti

Bukti yang berasal dari sumber yang independen (misalnya: Kepolisian, Kejaksaan, dsb) lebih dapat dipercaya daripada bukti yang dibuat oleh unit yang diperiksa. Bukti yang dibuat dan diedarkan kepada pihak ketiga lebih kuat dari pada bukti intern yang dipakai sendiri.

- Cara memperoleh bukti

Bukti yang diperoleh secara langsung melalui inspeksi, observasi, tanya jawab lebih dapat dipercaya dari pada bukti yang diperoleh secara tidak langsung.

- Bukti dokumen asli

Bukti berupa dokumen asli lebih dapat dipercaya dari pada foto-copy atau tembusan.

c. Bukti yang relevan

Bukti yang relevan adalah bukti yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dijumpai dan diperlukan untuk memperkuat hasil audit. Relevansi bukti menunjukkan adanya hubungan yang logis antara informasi dengan permasalahan.

 BANK MALUKU <i>Sila Melayu</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP Tanggal 31/12/2012	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	Hal. 70
NAMA BAB			

d. Jenis-jenis bukti

- Bukti fisik yang diperoleh melalui pengukuran dan perhitungan fisik, pemotretan, atau dapat juga berupa Berita Acara audit fisik, foto, bagan, peta dan sebagainya.
- Bukti kesaksian yang diperoleh melalui tanya jawab tertulis atau pernyataan dari pihak yang bersangkutan dengan permasalahan.
- Bukti dokumen seperti surat kontrak, foto copy dari catatan keuangan serta dokumen-dokumen lainnya.
- Bukti analisis yang merupakan hasil olahan berbagai informasi yang diperoleh Tim Audit.

3. Sebab-sebab terjadi penyimpangan/pelanggaran

Dilihat dari sebab-sebab terjadinya penyimpangan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) bagian, yaitu :

a. **Kekeliruan (*errors*)**

Kekeliruan adalah kesalahan yang tidak disengaja dalam melaksanakan tugas, sehingga mempengaruhi mutu pekerjaan, karena:

- Ketidaktahuan.
- Kurangnya pengetahuan pegawai.
- Kecerobohan.
- Kelalaian pegawai.
- Lemahnya penyeliaan

b. **Penyimpangan/pelanggaran yang disengaja (*irregularities*)**

- Merupakan tindak penyimpangan atau pelanggaran yang disengaja untuk tujuan tertentu.
- Penyimpangan/pelanggaran secara sengaja dan dengan itikad tidak baik, sehingga dapat merugikan Bank. Penyimpangan atau pelanggaran tersebut dapat terjadi, karena :

 BANK MALUKU <i>Solo Maluku</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	Hal. 71
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			
♦ Kesadaran dari si pelaku untuk melakukan penyimpangan/ pelanggaran. ♦ Dengan niat dan maksud yang telah diperhitungkan terlebih dahulu ♦ Dengan pengetahuan dan pengertian bahwa perbuatannya itu secara normatif dilarang oleh ketentuan atau peraturan bank. ♦ Ketentuan/peraturan yang berlaku tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisinya, baik karena faktor intern maupun faktor ekstern.			
4. Sikap auditor terhadap temuan Berdasarkan penelitian audit dari segi sebab dan akibat sebagaimana tersebut di atas, maka sikap yang harus diambil oleh tim audit terhadap hasil audit, ialah : a. Terhadap permasalahan yang menimbulkan kerugian atau secara potensial dapat menimbulkan kerugian agar diteliti secara lebih mendalam. Apabila terdapat indikasi adanya kecurangan atau kasus, tim audit segera melaporkan kepada Ketua Satuan Kerja Audit Intern untuk dapat dilakukan penyidikan. b. Penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi hanya sekali-sekali dan semata-mata karena kekeliruan atau kekhilapan dan dapat segera diperbaiki, sehingga secara moriil/materiil tidak merugikan bank (temuan yang bersifat administratif), agar segera diberitahukan kepada Kepala unit yang diperiksa (Auditee) untuk dilakukan tindak perbaikannya. Selanjutnya permasalahan tersebut dapat dianggap selesai, dimasukkan dalam Hasil Audit yang bersitat administratif. c. Walaupun penyimpangan atau pelanggaran yang bersifat administratif tetapi terjadinya berulang-ulang, maka atas temuan tsb dimasukan dalam Hasil Audit yang bersifat prinsip. d. Peraturan atau ketentuan yang tidak sesuai. Permasalahan yang disebabkan karena ketentuan atau peraturan yang tidak sesuai dengan kondisi, agar dievaluasi dan dilaporkan ke Kantor Pusat			

 BANK MALUKU <i>Solo Maluk</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	<i>Hal.</i> 72
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

(Divisi) yang membidangi peraturan atau ketentuan dimaksud untuk dievaluasi lebih lanjut.

5. Hasil Audit (prinsip dan administratif)

- a. Setelah selesai melaksanakan audit, tim pemeriksa segera menyusun daftar Hasil Audit (HA) dan sebaiknya sebelum menyusun daftar temuan hasil audit agar dikonsultasikan terlebih dahulu ke unit yang periksa dalam rangka mengklarifikasikan temuan dimaksud.

- b. Temuan audit dikelompokkan ke dalam :

- Temuan audit yang bersifat prinsipil

Temuan yang bersifat prinsipil ialah suatu pelanggaran terhadap kebijakan, sistem dan prosedur yang berlaku, di mana menurut pertimbangan (*judgement*) pemeriksa, pelanggaran tersebut mengandung risiko (berpotensi mengandung risiko) yang *significant*, yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank baik secara materiil maupun immateriil.

Penyimpangan/pelanggaran tersebut memiliki sifat :

- ♦ Nilainya berpengaruh pada keuangan (*equity*).
- ♦ Prinsip (bobot pelanggaran), mempengaruhi sasaran Bank.
- ♦ Berdampak pada aset Bank.
- ♦ Penyelesaiannya memerlukan waktu relatif lama dan melibatkan pihak lain.
- ♦ Menyangkut citra Bank.

Contoh temuan audit yang bersifat prinsipil antara lain :

- ♦ Tidak dilaksanakannya satu proses kontrol (pengendalian) pada suatu kegiatan.
- ♦ Pos-pos terbuka yang cukup lama belum diselesaikan.
- ♦ Terjadinya selisih antara catatan intra dan ekstra yang relatif besar.
- ♦ Tindakan pelanggaran dengan itikad tidak baik (manipulasi).

 BANK MALUKU <i>Solo Maluku</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	Hal. 73
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

- ♦ Realisasi yang belum mencapai sasaran atau target.
- ♦ Pelanggaran yang sifatnya berulang-ulang.

Temuan yang bersifat prinsipil dituangkan ke dalam Hasil Audit (prinsip) untuk kemudian dibicarakan dengan Kepala unit organisasi yang diperiksa dalam suatu forum “diskusi”.

- Temuan audit yang bersifat administratif

Temuan yang bersifat administratif adalah suatu pelanggaran/permasalahan terhadap kebijakan, sistem dan prosedur yang berlaku, di mana menurut pertimbangan (*judgement*) pemeriksa, pelanggaran tersebut tidak mengandung risiko (tidak berpotensi mengandung risiko) dan penyelesaiannya dapat dilakukan segera oleh unit yang diperiksa.

Temuan audit yang bersifat administratif dituangkan dalam Hasil Audit (administratif). Temuan Administratif tersebut tidak didiskusikan, namun tetap harus mendapat perhatian dan perbaikan dari unit yang diperiksa.

c. Susunan Temuan Hasil Audit

- Cover Temuan Hasil Audit berlogo BankMALUKU.
- Formulir data auditee/auditor.
- Hasil Audit (Prinsip dan Administratif).
- Lampiran (jika perlu).

d. Penyampaian Hasil Audit (Prinsip dan Administratif).

Temuan Hasil Audit (Prinsip dan Administratif) disampaikan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan diskusi, sehingga unit yang diperiksa mempunyai waktu yang cukup untuk mempelajari dan menjelaskan permasalahan yang dikemukakan oleh pemeriksa.

 BANK MALUKU <i>Sata Melaprei</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	Hal. 74
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

C. DISKUSI AUDIT

1. Tim pemeriksa diwajibkan untuk membicarakan temuan-temuan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Hasil Audit, dengan Kepala unit yang diperiksa dalam suatu forum diskusi. Diskusi merupakan forum pertemuan antara tim pemeriksa dengan Kepala unit yang diperiksa untuk mengkonfirmasi dan meminta penjelasan mengenai temuan pemeriksaan serta menentukan tindak lanjut yang akan diambil untuk memperbaiki penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi.

2. Pelaksanaan Diskusi

- a. Peserta Diskusi

- Unit yang diperiksa
Kepala unit (kepala unit kerja) yang diperiksa (Pemimpin Cabang) dan Kontrol Intern Cabang wajib mengikuti forum diskusi, disertai dengan pejabat-pejabat lainnya yang dianggap perlu hadir.
- Unit yang memeriksa (seluruh anggota tim audit).
- Kepala Diskusi

Diskusi dipimpin oleh Kepala tim audit (kepala SKAI) atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

- b. Tanggapan atau penjelasan atas Hasil Audit :

- Harus diberikan oleh Kepala unit yang diperiksa dan relevan dengan temuan tersebut, sehingga permasalahannya dapat diketahu dengan jelas.
- Penjelasan dari Kepala Unit yang diperiksa dicatat dalam kolom penjelasan pada Hasil Audit.
- Untuk tindakan perbaikan yang memerlukan waktu penyelesaian, supaya ditetapkan batas waktu penyelesaiannya.
- Jika terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam diskusi, agar ditampung untuk kemudian dimintakan petunjuk penyelesaian kepada kantor Pusat (Divisi yang membidangi) atau kepada Direksi.

 BANK MALUKU <i>Satu Maluku</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP Tanggal 31/12/2012	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	<i>Hal.</i> 75
NAMA BAB			
- Dalam diskusi, Kepala diskusi tidak diperkenankan memberikan petunjuk atau instruksi tanpa didasarkan pada ketentuan atau peraturan yang berlaku. c. Materi Diskusi Materi yang didiskusikan dibatasi hanya pada permasalahan-permasalahan yang tergolong sebagai penyimpangan prinsipil atau material yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. d. Waktu Diskusi Diskusi harus sudah dilaksanakan paling lambat keesokan harinya, setelah Hasil Audit diserahkan dan dilakukan pada hari kerja. Dalam hal kondisi tertentu, diskusi dapat dilakukan pada hari libur. e. Penandatanganan Hasil Audit Hasil Audit yang telah didiskusikan harus ditandatangani oleh : - Kepala tim, apabila bertindak sebagai Kepala diskusi. - Kepala tim dan Kepala diskusi, jika Kepala Tim tidak bertindak sebagai Kepala diskusi. - Kepala unit yang diperiksa.			

 BANK MALUKU <i>Sada Melapa</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	<i>Hal.</i> 76
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

BAB VII

LAPORAN HASIL AUDIT

LAPORAN KEPADA PIHAK INTERN DAN EKSTERN

1. Tahap terakhir dari rangkaian pelaksanaan audit, adalah **penyampaian Laporan Hasil Audit**. Tahap ini merupakan tahapan yang penting karena secara langsung menentukan tercapai tidaknya tujuan dari suatu penugasan audit dan sebagai media bagi Auditor bahwa penugasan audit telah dilaksanakan.
2. **Pelaporan intern Satuan Kerja Audit Intern** terdiri dari :
 - a. *Hasil Audit*, merupakan laporan hasil audit Cabang per Auditee yang disampaikan oleh Tim Audit kepada Auditor pengelola cabang bersangkutan.
 - b. *Laporan Hasil Pemantauan*, merupakan laporan triwulanan yang disampaikan oleh Auditor pengelola cabang yang menjadi pantauannya kepada atasannya sebagai sarana penginformasian kondisi auditee pentauannya.
 - c. *Laporan Peta Risiko* semesteran, dibuat oleh Satuan Kerja Audit Intern sebagai hasil Risk Assessment pemantauan Auditee yang disampaikan kepada pengelola Analisa Laporan sebagai bahan pembuatan Laporan Kaji Ulang.
3. **Pelaporan ekstern Satuan Kerja Audit Intern** terdiri dari :
 - a. *Laporan kaji Ulang* semesteran yang disampaikan oleh Satuan Kerja Audit Intern kepada Direktur Utama, diantaranya menginformasikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1). Realisasi dari Business Plan/Rencana Audit Tahunan Satuan Kerja Audit Intern.
 - 2). Peta Risiko Bank sesuai Hasil Audit.
 - 3). Pencapaian Business Bank sebagai hasil audit.

 BANK MALUKU <i>Solo Malaka</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	Hal. 77
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

b. *Hasil Audit*, merupakan laporan hasil audit Cabang per auditee yang disampaikan oleh Satuan Kerja Audit Intern kepada Auditee yang bersangkutan dan Divisi terkait.

c. *Laporan Hasil Audit*, merupakan laporan hasil audit yang disampaikan kepada auditee, Direktur Utama, Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan:

- 1). Per auditee, untuk audit Kantor Pusat.
- 2). Per periodik untuk audit Cabang.

4. Penyusunan laporan mengandung unsur :

- a. Kondisi atau kenyataan yang terjadi.
- b. Ketentuan atau kriteria yang harus dipenuhi.
- c. Sebab-sebab terjadinya penyimpangan.
- d. Akibat yang timbul dari penyimpangan.
- e. Rekomendasi (Saran).

Laporan dari Satuan Kerja Audit Intern, pada saat dilaporkan kepada Direksi, hal-hal yang dilaporkan tidak disampaikan kepada Auditee. Hal ini tidak adil, karena auditee tidak tahu apa hal-hal yang dilaporkan kepada Direksi

Dengan sistem baru ini, hal-hal yang dilaporkan kepada Direksi juga disampaikan kepada auditee.

Laporan Peta Risiko dan Laporan Kaji Ulang, format dan mekanisme pelaporannya akan dikembangkan oleh Auditor yang mengelola/memantau cabang bersangkutan.

Satuan Kerja Audit Intern wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia tentang pelaksanaan fungsi audit intern sebagaimana diatur dalam pasal 13 cfm.

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 1/6/PBI/1999 tanggal 20-09-1999 :

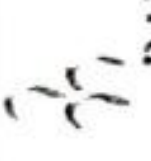
- a. Laporan pengangkatan atau pemberhentian Ketua Satuan Kerja Audit Intern yang disertai dengan pertimbangan dan alasan pengangkatan atau pemberhentian.

 BANK MALUKU <i>Solo Malaka</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	<i>Hal.</i> 78
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

- b. Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia.
- c. Laporan Khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan hidup usaha bank.
- d. Laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang memuat pendapat tentang hasil kerja Satuan Kerja Audit Intern dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank dan PBI tentang Sistem Pengendalian Intern Bank, serta perbaikan yang mungkin dilakukan.

Khusus butir b, laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit, pelaksanaannya sebagai berikut :

- 1). Dibuat dan disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah bulan laporan.
- 2). Disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas/Komisaris, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.

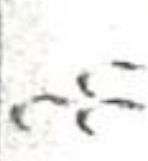
 BANK MALUKU <i>Sila Sibipai</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	
	Tanggal 31/12/2012	Hal. 79	
NAMA BAB			

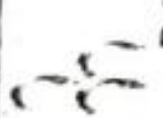
LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. PROFIL RISIKO CABANG

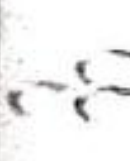
1. RISIKO KREDIT

No	Uraian	Low	Low-Moderate	Moderate	Moderate-High	High	Score
		R ≤ 1.5 (Nilai 1)	1.5 < R ≤ 2.5 (Nilai 2)	2.5 < R ≤ 3.5 (Nilai 3)	3.5 < R ≤ 4.5 (Nilai 4)	R > 4.5 (Nilai 5)	
1.	Kualitas Aset	Kolektibilitas pinjaman = 100%	Kolektibilitas pinjaman = 99%	Kolektibilitas pinjaman = 98%	Kolektibilitas pinjaman = 97%	Kolektibilitas pinjaman < 97%	0
	a. Kolektibilitas pinjaman (tingkat kelancaran pinjaman)						
	b. Kredit kepd debitur inti dibandingkan dengan Total Kredit	Kredit kepd debitur inti sdh sesuai dengan ketentuan BI (msh dlm batas toleransi)	Kredit kepd debitur inti lebih besar dari ketentuan BI (5% > batas toleransi)	Kredit kepd debitur inti lebih besar dari ketentuan BI (10% > batas toleransi)	Kredit kepd debitur inti lebih besar dari ketentuan BI (15% > batas toleransi)	Kredit kepd debitur inti lebih besar dari ketentuan BI (20% > batas toleransi)	0
	c. Kredit Per Sektor Ekonomi dibandingkan	Kredit per sektor ekonomi sdh sesuai dengan ketentuan BI (msh	Kredit per sektor ekonomi lebih besar dari ketentuan BI	Kredit per sektor ekonomi lebih besar dari ketentuan BI	Kredit per sektor ekonomi lebih besar dari ketentuan BI	Kredit per sektor ekonomi lebih besar dari	0

 BANK MALUKU <i>Sila Wapda</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP		BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP)		Hal. 80	
	Tanggal 31/12/2012		AUDIT BERBASIS RISIKO			
NAMA BAB						

 BANK NALUKU <i>Sila Waspada</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP		BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO		Hal. 81	
	Tanggal 31/12/2012					
NAMA BAB						

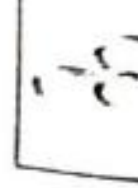
		Total Aset dan TRA					
	g.	Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan/ bermasalah dibandingkan dengan Total Aktiva produktif	Rasio sangat rendah atau sangat tidak signifikan (dibawah 1%).	Rasio rendah atau tidak signifikan (antara 1 sd 3%).	Rasio moderat, atau rasio berkisar antara 4% sampai dengan 6%.	Rasio relatif tinggi, atau di atas rasio berkisar 6% sd 7%.	Rasio sangat tinggi atau diatas 7%
	h.	Debitur Inti Kredit diluar Pihak Terkait dibandingkan dengan Total Kredit	Diversifikasi kredit sangat merata atau jumlah kredit dari debitur inti dibandingkan total kredit sangat tidak signifikan (dibawah 5%).	Diversifikasi kredit cukup merata atau rasio berkisar antara 5% sd 10%.	Diversifikasi kredit cukup merata atau rasio berkisar antara 10% sd 20%.	Diversifikasi kredit kurang merata atau jumlah kredit dari debitur inti dibandingkan dengan total kredit cukup signifikan (21% - 30%).	Diversifikasi kredit tidak merata atau jumlah kredit dari debitur inti dibandingkan dengan total kredit sangat signifikan (didas 30%).
							0
							0

 BANK MALUKU <i>Sila Sila</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP		BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO			Hal. 82		
	Tanggal 31/12/2012							
NAMA BAB								
	h.	Agunan Yang Diambil Alih dibandingkan dengan Total Kredit	Rasio sangat rendah atau sangat tidak signifikan atau rasio berkisar antara 0% - <1%	Rasio rendah atau tidak signifikan atau rasio berkisar antara 1% - <3%	Rasio moderat, atau rasio berkisar antara 3% - <6%	Rasio 82relative tinggi, atau rasio berkisar antara 6 - <10%	Rasio sangat tinggi, atau di atas 10%	0
	i.	Kredit Kualitas Rendah dibandingkan dengan Total Kredit	Rasio sangat rendah atau sangat tidak signifikan atau rasio berkisar antara 0% - <1%	Rasio rendah atau tidak signifikan atau rasio berkisar antara 1% - <3%	Rasio moderat, atau rasio berkisar antara 3% - 5%	Rasio 82relative tinggi, atau rasio antara 5% - <7%	Rasio sangat tinggi, atau di atas 10%	0
	j.	Kredit Bermasalah dibandingkan dengan Total Kredit	Kredit Bermasalah dibandingkan dgn Total Kredit, rendah sekali (mendekati nol)	Kredit Bermasalah dibandingkan dgn Total Kredit cukup besar (1% - 2%)	Kredit Bermasalah dibandingkan dgn Total Kredit, agak besar (2% - 3%)	Kredit Bermasalah dibandingkan dgn Total Kredit, besar (3% - 4%)	Kredit Bermasalah dibandingkan dgn Total Kredit, besar sekali (4% - 5%)	0
	k.	Kredit Bermasalah dikurangi CKPN Kredit Bermasalah dibandingkan dengan Total	Perkembangan rasio sangat rendah (dibawah 3%)	Perkembangan rasio rendah atau rasio berkisar antara 3% - <5%	Perkembangan rasio moderat atau rasio berkisar antara 5% - <8%	Perkembangan rasio cukup tinggi atau rasio berkisar antara 8% - <10%	Perkembangan rasio tinggi (diatas 10%)	0

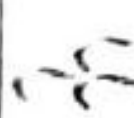
 BANK MALUKU <i>Solo & Papua</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP		BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP)		Hal. 83		
	Tanggal 31/12/2012		AUDIT BERBASIS RISIKO				
NAMA BAB							
		Kredit di Total Kredit dikurangi CKPN Kredit Bermasalah	CKPN atas kredit dibandingkan dengan Total Kredit, sangat memadai	CKPN atas kredit dibandingkan dengan Total Kredit, cukup memadai	CKPN atas kredit dibandingkan dengan Total Kredit, kurang memadai	CKPN atas kredit dibandingkan dengan Total Kredit, sangat tidak memadai	0
	l.	CKPN atas kredit dibandingkan dengan Total Kredit	CKPN atas kredit dibandingkan dengan Total Kredit, sangat memadai	CKPN atas kredit dibandingkan dengan Total Kredit, cukup memadai	CKPN atas kredit dibandingkan dengan Total Kredit, kurang memadai	CKPN atas kredit dibandingkan dengan Total Kredit, sangat tidak memadai	0
	m.	Kualitas penanganan AP Bermasalah.	Kualitas penanganan AP Bermasalah, baik (antara 91% - 95% ditangani)	Kualitas penanganan AP Bermasalah, cukup baik (antara 86% - 90%)	Kualitas penanganan AP Bermasalah, kurang baik (antara 80% - 85%)	Kualitas penanganan AP Bermasalah, tidak baik (dibawah 81%)	0
Rata-rata Kualitas Aset							0

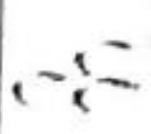
 BANK MALUKU <i>Sila Sila</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP Tanggal 31/12/2012	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	Hal. 84
	NAMA BAB		

2.	Penilaian Jaminan		Dari sampling berkas kredit, tidak ditemukan kesalahan dalam perhitungan jaminan	Dari sampling berkas kredit, ditemukan kesalahan perhitungan jaminan	Dari sampling berkas kredit, ditemukan 4%-5% terjadi kesalahan perhitungan jaminan	0
3.	Kelengkapan Berkas Kredit		Dari sampling berkas kredit, kelengkapan berkas/file kredit memadai (100% lengkap)	Dari sampling berkas kredit, kurang dari 1% berkas tidak lengkap	Dari sampling berkas kredit, kurang dari 4-5% berkas tidak lengkap	0
4.	Keamanan Berkas Kredit		Dari sampling berkas kredit, keamanan berkas/ file kredit memadai karena disimpan dalam strong room tahan api	Dari sampling berkas kredit, kurang dari 1% berkas tidak aman	Dari sampling berkas kredit, kurang dari 4-5% berkas tidak aman	0

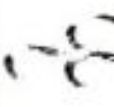
 BANK MALUKU <i>Sila Sasipat</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP Tanggal 31/12/2012	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	Hal. 86
NAMA BAB			

	bulan terakhir						
b. Tingkat kecukupan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang telah dibentuk dibandingkan dengan PPAP yang wajib dibentuk	PPAP yang dibentuk secara signifikan lebih tinggi dari PPAP yang wajib dibentuk (kurang 1% diatas PPAP yang diwajibkan).	PPAP yang di bentuk cukup tinggi dari PPAP yang wajib dibentuk (1% sd 2% diatas PPAP yang diwajibkan).	PPAP yang di bentuk cukup tinggi dari PPAP yang wajib dibentuk (3 sd 4% diatas PPAP yang diwajibkan).	PPAP yang di bentuk tinggi dibanding PPAP yang wajib dibentuk (5% - 6% diatas PPAP yang diwajibkan).	PPAP yang dibentuk secara signifikan jauh lebih besar! dibandingkan dengan PPAP yang wajib dibentuk (didas 6%).	0	0
	Rata-rata Aktiva Produktif Bermasalah/NPA dan Pembentukan PPAP						0

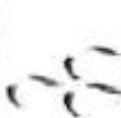
 BANK MALUKU <i>Sila Sila</i>		SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP		BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP)				Hal. 87	
		Tanggal 31/12/2012		AUDIT BERBASIS RISIKO					
NAMA BAB									
8.	Kinerja penanganan aktiva produktif (AP) bermasalah	a.	Kredit yang direstruktur dibandingkan dengan Total Kredit.	Tidak ada kredit yang direstruktur, sehingga dibandingkan dengan Total Kredit mendekati 0%.	Ada beberapa kredit yang direstruktur, namun nilainya dibawah 3%	Cukup banyak kredit yang direstruktur, namun nilainya dibawah 4%	Banyak kredit yang direstruktur, namun nilainya dibawah 5%	Kkredit yang direstruktur sangat banyak dan nilainya diatas 5%	
		b.	Kredit yang direstruktur lancar & DPK dibandingkan dengan Total Kredit.	Kredit yang direstruktur lancar dan DPK sangat sedikit (dibawah 3%)	Kredit yang direstruktur lancar dan DPK agak banyak (3% - 5%)	Kredit yang direstruktur lancar dan DPK cukup banyak (5% - 7%)	Kredit yang direstruktur lancar dan DPK banyak (7% - 10%)	Kredit yang direstruktur lancar dan DPK sangat banyak (diatas 10%)	0
		c.	Kredit bermasalah – PPAP dibandingkan dengan Total Kredit.	Kredit bermasalah - PPAP dibandingkan dengan Total Kredit sangat kecil (dibawah 3%)	Kredit bermasalah - PPAP dibandingkan dengan Total Kredit kecil (3% - 5%)	Kredit bermasalah - PPAP dibandingkan dengan Total Kredit cukup kecil (5% - 7%)	Kredit bermasalah - PPAP dibandingkan dengan Total Kredit besar (7% - 10%)	Kredit bermasalah - PPAP dibandingkan dengan Total Kredit sangat besar (diatas 10%)	0

 BANK MALUKU <i>Sila Malukud</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP		BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP)				Hal. 88
	Tanggal 31/12/2012		AUDIT BERBASIS RISIKO				
NAMA BAB							

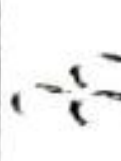
	d.	Jumlah jaminan kredit dibandingkan dengan plafon	Jumlah jaminan kredit meng-cover seluruh plafon pinjaman yang ada (100% keatas)	Jumlah jaminan kredit meng-cover jumlah pinjaman yang ada hanya (95%)	Jumlah jaminan kredit meng-cover jumlah pinjaman yang ada (90%)	Jumlah jaminan kredit kurang meng-cover jumlah plafon pinjaman yang ada (85%)	Jumlah jaminan kredit kurang meng-cover plafon pinjaman yang ada (dibawah 85%)	0
	e.	Jumlah jaminan kredit dibandingkan dengan outstanding	Jumlah jaminan kredit meng-cover seluruh outstanding pinjaman yang ada (diatas 100%)	Jumlah jaminan kredit meng-cover seluruh outstanding pinjaman yang ada hanya (95%)	Jumlah jaminan kredit kurang meng-cover seluruh outstanding pinjaman yang ada (90%)	Jumlah jaminan kredit kurang meng-cover seluruh outstanding pinjaman yang ada (85%)	Jumlah jaminan kredit kurang meng-cover seluruh outstanding pinjaman yang ada (dibawah 85%)	0
Rata-rata Kinerja penanganan aktiva produktif (AP) bermasalah								
								0
Rata-rata Risiko Kredit								
								0

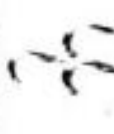
 BANK MALUKU <i>Sila Malukupa</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO		Hal. 89	
	Tanggal 31/12/2012				
NAMA BAB					

2. RISIKO LIKUIDITAS							
No	Uraian	Low	Low-Moderate	Moderate	Moderate-High	High	
		R < 1.5 (Nilai 1)	1.5 < R ≤ 2.5 (Nilai 2)	2.5 < R ≤ 3.5 (Nilai 3)	3.5 < R ≤ 4.5 (Nilai 4)	R > 4.5 (Nilai 5)	
1.	Jumlah penabung dibandingkan dengan tahun lalu.	Realisasi ekspansi penabung di atas 120% dari tahun lalu	Realisasi ekspansi penabung sekitar 115% sampai 120% dari tahun lalu	Realisasi ekspansi penabung sekitar 110% sampai 115% dari tahun lalu2	Realisasi ekspansi penabung sekitar 105% sampai dengan 110% dari periode tahun lalu	Realisasi ekspansi penabung tidak melebihi 105% dari periode tahun lalu	0
2.	Jumlah giran dibandingkan dengan tahun lalu.	Realisasi ekspansi giran di atas 120% dari tahun lalu	Realisasi ekspansi giran sekitar 115% sampai 120% dari tahun lalu	Realisasi ekspansi giran sekitar 110% sampai 115% dari tahun lalu2	Realisasi ekspansi giran sekitar 105% sampai dengan 110% dari periode tahun lalu	Realisasi ekspansi giran tidak melebihi 105% dari periode tahun lalu	0
3.	Jumlah depasan dibandingkan dengan tahun lalu.	Realisasi ekspansi depasan di atas 120% dari tahun lalu	Realisasi ekspansi depasan sekitar 115% sampai 120% dari tahun lalu	Realisasi ekspansi depasan sekitar 110% sampai 115% dari tahun lalu2	Realisasi ekspansi depasan sekitar 105% sampai dengan 110% dari periode tahun lalu	Realisasi ekspansi depasan tidak melebihi 105% dari periode tahun lalu	0

 BANK MALUKU <i>Sila Miliq</i>		SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP Tanggal 31/12/2012	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO		Hal. 90	
NAMA BAB						

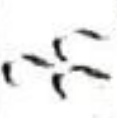
4.	Jumlah debitor dibandingkan dengan tahun lalu.		Realisasi ekspansi debitor sampai 105% atau dibawah 100% dari tahun lalu	Realisasi ekspansi debitor sekitar 105% sampai 110% dari tahun lalu	Realisasi ekspansi debitor 110% sampai 115% dari tahun lalu2	Realisasi ekspansi debitor 115% sampai 120% dari tahun lalu	Realisasi ekspansi debitor di atas 120% dari tahun lalu	0
5.	Jumlah nominal tabungan dibandingkan tahun lalu		Realisasi ekspansi kredit di atas 120% dari tahun lalu	Realisasi ekspansi kredit sekitar 115% sampai 120% dari tahun lalu	Realisasi ekspansi kredit 110% sampai 115% dari tahun lalu2	Realisasi ekspansi kredit 105% sampai dengan 110% dari periode tahun lalu	Realisasi ekspansi kredit tidak melebihi 105% dari periode tahun lalu	0
6.	Jumlah nominal deposito dibandingkan tahun lalu		Realisasi ekspansi kredit di atas 120% dari tahun lalu	Realisasi ekspansi kredit sekitar 115% sampai 120% dari tahun lalu	Realisasi ekspansi kredit 110% sampai 115% dari tahun lalu2	Realisasi ekspansi kredit 105% sampai dengan 110% dari periode tahun lalu	Realisasi ekspansi kredit tidak melebihi 105% dari periode tahun lalu	0
7.	Jumlah nominal giro dibandingkan tahun lalu		Realisasi ekspansi kredit di atas 120% dari tahun lalu	Realisasi ekspansi kredit sekitar 115% sampai 120% dari tahun lalu	Realisasi ekspansi kredit 110% sampai 115% dari tahun lalu2	Realisasi ekspansi kredit 105% sampai dengan 110% dari periode tahun lalu	Realisasi ekspansi kredit tidak melebihi 105% dari periode tahun lalu	0

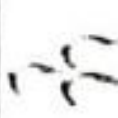
 BANK MALUKU <i>Sila Bina</i>		SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP		BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO			Hal. 91		
		Tanggal 31/12/2012							
NAMA BAB									
8.	Besarnya LDR (<i>Loan to Deposit ratio</i>)		LDR < 39,04%	LDR berkisar 39,04% s/d 45%	LDR berkisar 45% s/d ≤ 60%	LDR berkisar 60% s/d 70%	LDR > 80%	0	
9.	Besarnya rasio deposito terhdp dana pihak ketiga		Rasio kurang dari 10%	Rasio antara 10% s/d 12,5%	Rasio antara 12,5% s/d 15%	Rasio antara 15% s/d 17,5%	Rasio diatas 20%	0	
10.	Besarnya rasio tabungan terhdp dana pihak ketiga		Rasio kurang dari 20%	Rasio antara 20% s/d 25%	Rasio antara 25% s/d 30%	Rasio antara 30% s/d 35%	Rasio diatas 35%	0	
11.	Besarnya rasio giro terhadap dana pihak ketiga		Rasio kurang dari 20%	Rasio antara 20% s/d 25%	Rasio antara 25% s/d 30%	Rasio antara 30% s/d 35%	Rasio diatas 35%	0	
				Rata-rata Risiko Likuiditas					0

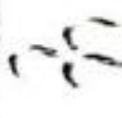
 BANK MALUKU <i>Sila Wipai</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO		Hal. 92
	Tanggal 31/12/2012			
NAMA BAB				

3. RISIKO OPERASIONAL

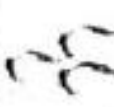
No	Uraian	Low	Low-Moderate	Moderate	Moderate-High	High	Score
		$R < 1.5$ (Nilai 1)	$1.5 < R \leq 2.5$ (Nilai 2)	$2.5 < R \leq 3.5$ (Nilai 3)	$3.5 < R \leq 4.5$ (Nilai 4)	$R > 4.5$ (Nilai 5)	
1.	a Sumber Daya Manusia Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia.	Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia sangat baik dan dilakukan sesuai dengan teori-teori yang berlaku (100% sesuai)	Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia baik dan dilakukan sesuai dengan teori-teori yang berlaku (95%)	Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia cukup baik dan dilakukan sesuai dengan teori-teori yang berlaku (90%)	Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia kurang baik dan belum dilakukan sesuai dengan teori-teori yang berlaku (85%)	Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia sangat tidak baik dan tidak dilakukan sesuai dengan teori-teori yang berlaku (dibawah 85%)	0
	b Kegagalan karena Faktor Manusia (Human Error)	Kegagalan karena Faktor Manusia (Human Error) tidak pernah terjadi, karena semua SDM sudah diberikan pelatihan sesuai dengan	Kegagalan karena Faktor Manusia (Human Error) sekali-sekali pernah terjadi, walaupun semua SDM sudah diberikan pelatihan sesuai	Kegagalan karena Faktor Manusia (Human Error) cukup sering terjadi, walaupun semua SDM sudah diberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan masing-masing	Kegagalan karena Faktor Manusia (Human Error) sering terjadi, walaupun semua SDM sudah diberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan masing-masing	Kegagalan karena Faktor Manusia (Human Error) sangat sering terjadi, karena hampir semua SDM tidak diberikan pelatihan sesuai dengan	

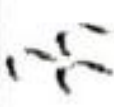
 BANK MALUKU <i>Sila Sila</i>		SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP		BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO			Hal. 93		
Tanggal 31/12/2012									
NAMA BAB									
		Rata-rata Sumber Daya Manusia							
				kebutuhan masing-masing (100%)	dengan kebutuhan masing-masing (95%)	(90%)	(85%)	kebutuhan masing-masing (dibawah 85%)	
								0	
2.	Teknologi Informasi dan Infrastruktur Pendukung	a	Kompleksitas Teknologi Informasi	Teknologi Informasi yang digunakan, sangat sesuai dengan kebutuhan Bank dan sangat <i>friendly</i> (100% sesuai dan <i>friendly</i>)	Teknologi Informasi yang digunakan, sesuai dengan kebutuhan Bank dan <i>friendly</i> (95% sesuai dan <i>friendly</i>)	Teknologi Informasi yang digunakan, cukup sesuai dengan kebutuhan Bank dan cukup <i>friendly</i> (90% sesuai dan <i>friendly</i>)	Teknologi Informasi yang digunakan, kurang sesuai dengan kebutuhan Bank dan agak rumit/kurang <i>friendly</i> (85% sesuai dan <i>friendly</i>)	Teknologi Informasi yang digunakan, tidak sesuai dengan kebutuhan Bank dan sangat rumit/tidak <i>friendly</i> (dibawah 85%)	0
		b	Perubahan Teknologi	Perubahan dilakukan diatas 4 tahun sekali	Perubahan dilakukan 3 tahun sekali	Perubahan dilakukan 2 tahun sekali	Perubahan dilakukan 1 tahun sekali	Perubahan dilakukan dibawah 1 tahun	0
		c	Kerentanan Sistem TI terhadap ancaman dan	Sistem TI yang digunakan sangat solid	Sistem TI yang digunakan solid dan sistem sekuriti/keaman	Sistem TI yang digunakan cukup solid dan sistem sekuriti/keamanan	Sistem TI yang digunakan kurang solid dan sistem sekuriti/keamanan	Sistem TI yang digunakan sangat tidak solid dan sistem sekuriti/	0

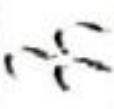
 BANK MALUKU <i>Sila Bina</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO			Hal. 94	
	Tanggal 31/12/2012					
NAMA BAB						
	serangan TI	dan sistem sekuriti/keaman nan sangat baik, sehingga ancaman dan serangan ter- hadap TI tidak pernah terjadi (100% aman)	-an baik, sehingga ancaman dan serangan terhadap TI tidak pernah terjadi (keamanan 95%)	cukup baik, sehingga ancaman dan serangan ter- hadap TI hanya sekali-sekali terjadi (keamanan 90%)	kurang baik, sehingga ancaman dan serangan ter- hadap TI sewaktu- waktu bisa terjadi (Keamanan 85%)	keamanan sangat tidak baik, sehingga ancaman dan serangan terhadap TI sering terjadi (keamanan dibawah 85%)
	d Maturity Sistem TI	Sistem TI yang digunakan sangat baik dan mempunyai jaminan maturity yang sangat baik, sehingga bisa bertahan untuk jangka waktu lama karena dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman dengan sedikit upgrading	Sistem TI yang digunakan baik dan mempunyai jaminan maturity yang baik pula, sehingga bisa bertahan untuk jangka waktu lama karena dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman dengan sedikit upgrading	Sistem TI yang digunakan cukup baik dan mempunyai jaminan maturity yang cukup baik pula, sehingga bisa bertahan untuk jangka waktu lama karena dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman walaupun perlu upgrading yang cukup banyak (=80%)	Sistem TI yang digunakan kurang baik dgn mempunyai jaminan maturity yang juga kurang baik, sehingga untuk bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama harus dilakukan perubahan/up- grading yang cukup besar (=70%)	Sistem TI yang digunakan sangat tidak baik dan tidak mempun- yai jaminan maturity yang yang baik, sehingga tidak bisa bertahan untuk jangka waktu lama, walaupun dilakukan perubahan/upgra ding secara besar-besaran, biaya sangat
0						

 BANK MALUKU <i>Sila Zuhdi</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO		Hal. 95
	Tanggal 31/12/2012			
NAMA BAB				

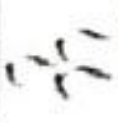
		zaman (=100%)	(=90%)			mahal (<70%)	
e	Kegagalan Sistem TI	Kegagalan sistem tidak pernah terjadi, karena penerapannya sudah mengikuti System Development Life Cycle yang baik (100% sukses)	Kegagalan sistem kadang-kadang terjadi, walaupun penerapannya sudah mengikuti System Development Life Cycle yang baik (Tingkat kesuksesan 95%)	Kegagalan sistem cukup sering terjadi, karena penerapannya tidak sepenuhnya mengikuti System Development Life Cycle yang baik (Tingkat kesuksesan 90%)	Kegagalan sistem sering terjadi, karena penerapannya tidak mengikuti System Development Life Cycle yang baik (Tingkat kesuksesan 85%)	Kegagalan sistem sangat sering terjadi, karena penerapannya tidak mengikuti System Development Life Cycle yang baik (Tingkat kesuksesan dibawah 85%)	0
f	Keandalan Infrastruktur Pendukung	Keandalan Infrastruktur Pendukung sangat baik, sehingga tidak pernah terjadi gangguan terhadap operasi Sistem TI yang ada	Keandalan Infrastruktur Pendukung baik, walaupun sekali-sekali pernah terjadi gangguan terhadap operasi Sistem TI yang ada (Tingkat	Keandalan Infrastruktur Pendukung cukup baik, sehingga cukup terjadi gangguan terhadap operasi Sistem TI yang ada (Tingkat keandalan 90%)	Keandalan Infrastruktur Pendukung kurang baik, sehingga sering terjadi gangguan terhadap operasi Sistem TI yang ada (Tingkat keandalan 85%)	Keandalan Infrastruktur Pendukung sangat tidak baik, sehingga sangat sering terjadi gangguan terhadap operasi Sistem TI yang ada (Tingkat	0

 BANK MALUKU <i>Sila Malukupa</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP		BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO		Hal. 96
	Tanggal 31/12/2012				
NAMA BAB					
			(Tingkat keandalan 100%)	keandalan 95%)	keandalan dibawah 85%)
	g	Security System TI	Keamanan fisik dan non- fisik sangat memadai (100% aman)	Keamanan fisik dan non-fisik memadai (95% aman)	Keamanan fisik dan non-fisik cukup memadai (90% aman)
				Keamanan fisik dan non-fisik kurang memadai (85% aman)	Keamanan fisik dan non-fisik sangat tidak memadai (dibawah 85%)
					0

 BANK MALUKU <i>Sila Kibaja</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP		BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO				Hal. 97
	Tanggal 31/12/2012						
NAMA BAB							
	h	Kesesuaian Arah TI dan Integritas	TI yang diimplementasi- kan telah sesuai dengan perkembangan bank dan integritasnya tinggi dengan sistem lainnya (100% sesuai dengan arah dan integritas)	TI yang diimplementasi- kan telah sesuai dengan perkembangan bank namun masih ada sedikit ketidak sesuaian dengan sistem lainnya (hanya 96% dengan kesesuaian arah dan integritas).	TI yang diimplementasi- kan hampir sesuai dengan perkembangan bank walaupun masih banyak ketidak sesuaian dengan sistem lainnya (hanya 91% sd 95% dengan kesesuaian arah dan integritas).	TI yang diimplementasi- kan mendekati sesuai dengan perkembangan bank, namun banyak sekali ketidak-sesuaian dengan sistem lainnya (hanya 85% sd 90% dengan kesesuaian arah dan integritas).	0
	i	Pelayanan dan Dukungan	Pelayanan kepada nasabah sangat tinggi ditambah dengan dukungan sistem yang prima (tidak ada komplain = 100%)	Pelayanan kepada nasabah tinggi, walaupun masih terdapat kelemahan pada dukungan sistem, kadang- kadang ada komplain = 91% sd 99%).	Pelayanan kepada nasabah cukup tinggi walaupun masih terdapat kelemahan- kelemahan pada dukungan sistem (acapkali ada komplain = 81% sd 90%)	Pelayanan kepada nasabah kurang ditambah dengan dukungan sistem juga kurang (seringkali ada komplain = 71% sd 80%)	0

 BANK MALUKU <i>Sila Sila</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP Tanggal 31/12/2012		BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO		Hal. 98
	NAMA BAB				

j	Materialitas	Implementasi TI sangat menguntungkan bagi bank (mendatangkan keuntungan diatas 10 milyar).	Implementasi TI menguntungkan bagi bank (mendatangkan keuntungan diatas 8 sd 10 milyar)	Implementasi TI menguntungkan bagi bank (mendatangkan keuntungan diatas 6 sd 8 milyar)	Implementasi TI menguntungkan bagi bank (mendatangkan keuntungan diatas 4 sd 6 milyar)	Implementasi TI menguntungkan bagi bank (mendatangkan keuntungan dibawah milyar)	0
k	Kesesuaian dengan User Requirements	Implementasi TI sangat sesuai dengan keinginan user (tidak ada kendala = 100% sesuai).	Implementasi TI sesuai dengan keinginan user, walaupun ada sedikit kendala (96 % sd 99%).	Implementasi TI masih sesuai dengan keinginan user, walaupun masih ada kendala (91% sd 95%).	Implementasi TI kurang sesuai dengan keinginan user, karena masih banyak kendala (85% sd 90%).	Implementasi TI sangat tidak sesuai dengan keinginan user (terlalu banyak kendala) --> dibawah 85%.	0
l	Service Level	Pencapaian tingkat service level telah sesuai dengan rencana (100%).	Pencapaian tingkat service level hampir sesuai dengan rencana (95%).	Pencapaian tingkat service level belum sesuai dengan rencana (90%).	Pencapaian tingkat service level tidak sesuai dengan rencana (85%).	Pencapaian tingkat service level jauh dibawah rencana (<85%).	0

BANK MALUKU <i>Sila Bekerja</i>		SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP		BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO			Hal. 99	
		Tanggal 31/12/2012						
NAMA BAB								
	m	Pelayanan dan Dukungan	Pelayanan kepada nasabah sangat tinggi ditambah dengan dukungan sistem yang prima (tidak ada komplain = 100%)	Pelayanan kepada nasabah walaupun masih terdapat kelemahan pada dukungan sistem, kadang-kadang ada komplain = 91% sd 99%).	Pelayanan kepada nasabah cukup tinggi walaupun masih terdapat kelemahan-dukungan pada dukungan sistem (acapkali ada komplain = 81% sd 90%)	Pelayanan kepada nasabah kurang ditambah dengan dukungan sistem juga kurang (seringkali ada komplain = 71% sd 80%)	Pelayanan kepada nasabah lemah (sangat sering terjadi komplain = dibawah 70%)	0
	n	Respons time jalur komunikasi	Respons time jalur komunikasi sangat cepat (dibawah 500ms)	Respons time jalur komunikasi cepat (500ms sd 1200ms)	Respons time jalur komunikasi cukup cepat (1201ms sd 1800ms)	Respons time jalur komunikasi kurang cepat/agak lambat (1801ms - 2300ms)	Respons time jalur komunikasi lambat (diatas 2300ms)	0
	o	Rasio kerugian kegagalan system terhadap pendapatan operasional	Rasio 0- 20 %	Rasio 21 – 40 %	Rasio 41 -60 %	Rasio 61 -80 %	Rasio 81 –lebih dari 100%	0

 BANK MALUKU <i>Solo Kibapari</i>		SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP		BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO			Hal. 100	
		Tanggal 31/12/2012						
NAMA BAB								
	p	Rasio jumlah transaksi error terhadap total transaksi terhadap pendapatan operasional	Rasio 0- 20 %	Rasio 21 – 40 %	Rasio 41 -60 %	Rasio 61 -80 %	Rasio 81 –lebih dari 100%	0
	q	Rasio kerugian karena human error & Fraud terhadap pendapatan operasional	Rasio 0- 20 %	Rasio 21 – 40 %	Rasio 41 -60 %	Rasio 61 -80 %	Rasio 81 –lebih dari 100%	0
	r	Rasio human error & fraud thd total transaksi terhadap pendapatan operasional	Rasio 0- 20 %	Rasio 21 – 40 %	Rasio 41 -60 %	Rasio 61 -80 %	Rasio 81 –lebih dari 100%	0
	s	Rasio kerugian	Rasio 0- 20 %	Rasio 21 – 40 %	Rasio 41 -60 %	Rasio 61 -80 %	Rasio 81 –lebih dari 100%	0

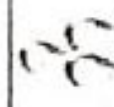
NAMA BAB

Rata-rata Teknologi Informasi dan Infrastruktur Pendukung				0			
			karena strategic failure terhadap pendapatan operasional				
3.	Fraud	a	Tidak pernah terjadi fraud internal, karena semua SDM yang ada sudah diuji loyalitasnya terhadap Bank (Tingkat kejadian 0%)	Sekali-kali terjadi fraud internal, walaupun semua tenaga SDM yang ada sudah diuji loyalitasnya terhadap Bank, namun tidak material/tidak merugikan Bank (Tingkat kejadian 1% - <3%))	Agak sering terjadi fraud internal, walaupun semua SDM yang ada sudah diuji loyalitasnya terhadap Bank, dan kerugian terhadap Bank cukup material/ cukup merugikan Bank (Tingkat kejadian 3% - <5%)	Sering terjadi fraud internal, walaupun semua SDM yang ada sudah diuji loyalitasnya terhadap Bank dan tingkat kerugian cukup besar (Tingkat kejadian 5% - 7%)	Sangat sering terjadi fraud internal, karena semua SDM yang ada tidak pernah diuji loyalitasnya terhadap Bank (Tingkat kejadian diatas 7%)
		b.	Fraud	Sekali-kali	Agak sering	Sering terjadi	Sering terjadi

BANK MALUKU <i>Sisa Sahipai</i>		SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP Tanggal 31/12/2012		BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO		Hal. 102	
NAMA BAB							
		Eksternal	terjadi fraud eksternal, karena semua sistem yang ada sudah diuji keamanannya (Tingkat kejadian 0%)	terjadi fraud eksternal, walaupun semua sistem yang ada sudah diuji keamanannya (Tingkat kejadian 1% - <3%)	terjadi fraud eksternal, walaupun semua sistem yang ada sudah diukur keamanannya (Tingkat kejadian 3% - <5%)	fraud eksternal, walaupun semua sistem yang ada sudah diuji keamanannya (Tingkat kejadian 5% - <7%)	fraud eksternal, walaupun semua sistem yang ada sudah diuji keamanannya (Tingkat kejadian diatas 7%)
				Rata-rata Fraud			
				0			
4.	Kejadian Eksternal	Frekuensi dan materialitas kejadian eksternal yang berdampak terhadap kegiatan operasional bank.	Frekuensi dan materialitas kejadian eksternal yang berdampak terhadap kegiatan operasional bank, tidak pernah terjadi (Tingkat kejadian 0%)	Frekuensi dan materialitas kejadian eksternal yang berdampak terhadap kegiatan operasional bank, sekali-kali terjadi (Tingkat kejadian 1% - <3%)	Frekuensi dan materialitas kejadian eksternal yang berdampak terhadap kegiatan operasional bank, sering terjadi (Tingkat kejadian 3% - <5%)	Frekuensi dan materialitas kejadian eksternal yang berdampak terhadap kegiatan operasional bank, sangat sering terjadi (Tingkat kejadian 5% - <7%)	0

NAMA BAB

Rata-rata Kejadian Eksternal									0
5.	Kelas Cabang		Cabang Pembantu KLS 2 (incl. Kantor Kas, Payment Point)	Cabang Kelas D/Capem kls 1, Ktr Kas, Payment Point)	Cabang Kelas C (incl. Capem Kls 2, Ktr Kas, Payment point)	Cabang Kelas B (incl. Capem kls 1 dan kls 2, Payment point, Ktr Kas)	Cabang Utama (incl. Capem Kls 1, Ktr Kas, Paymentpoint)	0	
6.	Jumlah Capem/Ktr Kas:	Jumlah Cabang Pembantu dan Kantor Kas, Payment point dan ATM dalam pengelolaan dan pengawasannya	Jumlah Capem + Ktr Kas + Payment Point + ATM antara 1 sd 2 bh	Jumlah Capem + Ktr Kas + Payment Point + ATM antara 3 sd 4 buah	Jumlah Capem + Ktr Kas + Payment Point + ATM antara 5 sd 6 buah	Jumlah Capem + Ktr Kas + Payment Point + ATM antara 7 sd 8 buah	Jumlah Capem + Ktr Kas + Payment Point + ATM diatas 8 buah	0	
7.	Jenis Transaksi Yang Dimiliki	a	Jumlah transaksi yang dilakukan cabang	Jumlah transaksi (vouchers) standar bagi Cabang sekelasnya	Jumlah transaksi (vouchers) lebih banyak bagi Cabang sekelasnya (diatas 10%)	Jumlah transaksi (vouchers) lebih banyak bagi Cabang sekelasnya (diatas 20%)	Jumlah transaksi (vouchers) lebih banyak bagi Cabang sekelasnya (diatas 30%)	Jumlah transaksi (vouchers) sangat banyak bagi Cabang sekelasnya (diatas 40%)	0

 BANK MALUKU <i>Sila Bakti</i>		SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP		BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO			Hal. 104	
Tanggal 31/12/2012								
NAMA BAB								

Rata-rata Risiko Operasional								
		b	Jenis transaksi yang dilakukan Cabang	Transaksi yang dilakukan standar bagi Cab sekelasnya (minimal 8 jenis transaksi)	Transaksi yang dilakukan minimum 8 jenis transaksi.	Transaksi yang dilakukan minimum 9 jenis transaksi.	Transaksi yang dilakukan minimum 10 jenis transaksi.	Transaksi yang dilakukan diatas 10 jenis transaksi.
								0
8.	Kesalahan operasional bukan karena Fraud	a	Write off	Tidak ada hapus buku	Hapus buku kurang dari 1 % dari total pinjaman	Hapus buku kurang dari 1,5% dari total pinjaman	Hapus buku kurang dari 1,5 - 2 % dari total pinjaman	Hapus buku di atas 2 % dari total pinjaman
		b	Other Loss & Potential Loss	Loss atau potensi kerugian lainnya tidak pernah terjadi karena kelalaian atau penyebab lainnya, tetapi bukan karena fraud.	Loss atau potensi kerugian kadang-kadang terjadi karena kelalaian atau penyebab lainnya, tetapi bukan karena fraud (1 kali dan/atau nilai dibawah 50jt)	Loss atau potensi kerugian kadang-kadang terjadi karena kelalaian atau penyebab lainnya, tetapi bukan karena fraud (2 kali dan/atau nilai 50jt sd 100jt).	Loss atau potensi kerugian lainnya sering terjadi karena kelalaian atau penyebab lainnya, tetapi bukan karena fraud (3 kali dan/atau nilai 101jt sd 500jt)	Loss atau potensi kerugian lainnya sangat sering terjadi karena kelalaian atau penyebab lainnya dan kadang-kadang karena fraud (didas 3 kali dan/atau nilai diatas 500jt)
								0

NAMA BAB

Rata-rata kesalahan Operasional bukan karena Fraud										0
9.	Organisasi, manajemen dan operasional	a	Kompetensi posisi kunci	Seluruh posisi kunci telah diduduki oleh pejabat sesuai kompetensi (100%)	Hampir seluruh posisi kunci telah diduduki oleh pejabat sesuai kompetensi (90%)	Hampir seluruh posisi kunci telah diduduki oleh pejabat sesuai kompetensi (85%)	Hampir seluruh posisi kunci telah diduduki oleh pejabat sesuai kompetensi (80%)	Banyak sekali posisi kunci yang tidak diduduki oleh pejabat sesuai kompetensi (dibawah 80%)	0	
		b	Kecukupan SDM untuk posisi kunci.	Sesuai dengan kebutuhan (100%)	Belum sesuai seluruhnya (95%)	Belum sesuai seluruhnya (90%)	Belum sesuai seluruhnya (85%)	Belum sesuai seluruhnya (dibawah 85%)	0	
		c	Lamanya terjadi perangkapan jabatan, tanpa atau dengan didukung nota dinas/SK Direksi	Tidak terjadi perangkapan jabatan	Kadang-kadang terjadi perangkapan jabatan, namun bukan pada jabatan yang berisiko dengan waktu sampai dengan 3 bulan	Sering terjadi perangkapan jabatan, namun bukan pada jabatan yang berisiko dengan waktu sampai dengan 6 bulan	Sering terjadi perangkapan jabatan dan terjadi pada posisi yang berisiko diatas 1 tahun	Sering terjadi perangkapan jabatan dan terjadi pada posisi yang berisiko diatas 1 tahun	0	

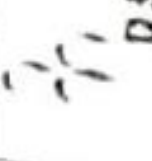
	d		Tidak ada permasalahan SDM, baik dari sisi kompetensi, track record, disiplin, jumlah dan lain-lain	Ada permasalahan SDM, baik dari sisi kompetensi, track record, disiplin, jumlah dan lain-lain (kurang dr 1% total pegawai)	Ada permasalahan SDM dari sisi kompetensi, namun bukan dalam hal track record, disiplin, jumlah dan lain-lain (1% sd 2% dari total pegawai)	Ada permasalahan SDM, baik dari sisi kompetensi, maupun track record, disiplin, jumlah dan lain-lain (3% sd 4% dari total pegawai)	Ada permasalahan SDM, baik dari sisi kompetensi, track record, disiplin, jumlah dan lain-lain (diatas 4% dari total pegawai)	0	
	e	Potential Problem From Financial Data	Penggunaan rekening sementara jarang sekali dilakukan, karena transaksi sudah jelas, bila terjadi hanya 1-5 hari	Penggunaan rekening sementara seringkali dilakukan, namun selalu diselesaikan 6-10 hari	Penggunaan rekening sementara seringkali dilakukan, namun selalu diselesaikan 11-15 hari	Penggunaan rekening sementara seringkali dilakukan, namun selalu diselesaikan 16-30 hari	Penggunaan rekening sementara seringkali dilakukan, namun penyelesaiannya diatas 1 bulan	0	
Rata-rata Organisasi, manajemen dan operasional									0

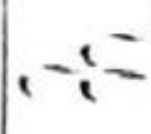
BANK MALUKU <i>Sila Waspada</i>		SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP		BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO				Hal. 107	
		Tanggal 31/12/2012							
NAMA BAB									

10.	Temuan SKAI/Auditor	a	Temuan- temuan SKAI/Auditor r cabang dari audit yang dilakukan dalam operasional Bank	Permasalahan yang ditemukan sedikit dan tidak krusial (dibawah 15)	Ditemukan cukup banyak permasalahan, namun krusial/ material (16 sd 20)	Permasalahan yang ditemukan banyak, namun tidak krusial/ material (21 sd 35)	Sering Ditemukan permasalahan, dan krusial/ material (36 sd 50)	Ditemukan banyak permasalahan dan bersifat krusial/ material (diatas 50)	0
		b	Kualitas Temuan (<i>Quality of finding</i>)	Permasalahan krusial dari hasil pemeriksaan sebelumnya, selalu dilakukan tindak- lanjutnya (100%)	Permasalahan krusial dari hasil pemeriksaan sebelumnya, hampir semua dilakukan tindak-lanjutnya (80%-99%)	Permasalahan krusial dari hasil pemeriksaan sebelumnya, dilakukan tindak- lanjutnya, namun ada hal-hal yang belum dilakukan. (70%-79%)	Permasalahan krusial dari hasil pemeriksaan sebelumnya dilakukan tindak- lanjutnya, namun masih banyak yang belum dilakukan penyelesaiannya (50%-69%)	Permasalahan krusial dari hasil pemeriksaan sebelumnya belum dilakukan tindak-lanjutnya, karena ketidakmampuan cabang (dibawah 50%)	0
		c	Jangka waktu dari audit terakhir	0 - 6 bulan	6 - 12 bulan	13 - 18 bulan	19 - 23 bulan	24 bulan keatas	0

NAMA BAB

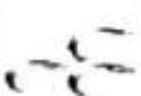
		Rata-rata Temuan Auditor							0
11.	Business Target	a	ROA	ROA diatas 15%	ROA berkisar antara 10% s/d 15%	ROA berkisar antara 5% s/d 10%	ROA berkisar antara 1,40% s/d 5%	ROA < 1,40%	0
		b	NIM	NIM diatas 20%	NIM berkisar antara 15% s/d 20%	NIM berkisar antara 10% s/d 15%	NIM berkisar antara 7,8% s/d 10%	NIM < 7,79%	0
		c	ROE	ROE diatas 30%	ROE berkisar antara 25% s/d 30%	ROE berkisar antara 20% s/d 25%	ROE berkisar antara 18,46% s/d 20%	ROE < 18,46%	0
		d	BOPO	BOPO < 5%	BOPO berkisar antara 5% s/d 10%	BOPO berkisar antara 10% s/d 15%	BOPO berkisar antara 15% s/d 18,46%	BOPO > 87,23%	0
		e	Rasio Business Volume Target (total kredit, dana pihak ke-3, total aset) dengan RBB	Pencapaian target volume bisnis seluruhnya melebihi target(diatas 100%).	Pencapaian target volume bisnis sesuai dengan target (=100%)	Pencapaian target volume bisnis belum seluruhnya dapat dicapai, karena masih terdapat sedikit hambatan (90%).	Pencapaian target volume bisnis belum seluruhnya dapat dicapai, karena masih ada beberapa hal yang menghambat (85%)	Pencapaian target volume bisnis tidak dapat dicapai, karena banyaknya kendala (<85%).	0

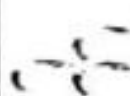
 BANK MALUKU <i>Sila Bina</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP		BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP)				Hal. 109	
	Tanggal 31/12/2012		AUDIT BERBASIS RISIKO					
NAMA BAB								
		f <i>Rasio Business profitability dengan RBB</i>	Pencapaian target profitabilitas diatas (100%).	Pencapaian target profitabilitas bisnis hampir seluruhnya dapat dicapai (=100%).	Pencapaian target profitabilitas bisnis belum seluruhnya dapat dicapai (95%).	Pencapaian target profitabilitas bisnis belum dapat dicapai sesuai target (90%).	Target profitabilitas bisnis tidak dapat dicapai (<90%).	
			Rata-rata Business Target					0
			Rata-rata Risiko Operasional					0

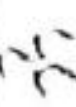
 BANK MALUKU <i>Sila Balahe</i>		SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP Tanggal 31/12/2012	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO		Hal. 110
NAMA BAB					

4. RISIKO HUKUM

No	Faktor Litigasi	Uraian	Low	Low-Moderate	Moderate	Moderate-High	High	Score
			R < 1.5 (Nilai 1)	1.5 < R < 2.5 (Nilai 2)	2.5 < R < 3.5 (Nilai 3)	3.5 < R < 4.5 (Nilai 4)	R > 4.5 (Nilai 5)	
1.	a	Rasio besarnya nominal gugatan yang diajukan terhadap pendapatan operasional	Rasio 0- 20 %	Rasio 21 – 40 %	Rasio 41 -60 %	Rasio 61 -80 %	Rasio 81 – lebih dari 100%	0
	b	Rasio kerugian yang dialami oleh cabang terhadap pendapatan operasional	Rasio 0- 20 %	Rasio 21 – 40 %	Rasio 41 - 60 %	Rasio 61 - 80 %	Rasio 81 – lebih dari 100%	0
	d	Kemungkinan timbulnya gugatan :						

 BANK MALUKU <i>Sila Wajape</i>		SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP Tanggal 31/12/2012		BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO		Hal. 111			
NAMA BAB									
		d1	Kemungkin-an timbulnya gugatan yang serupa karena adanya standar perjanjian yang sama	Tidak ada	Kemungkinan kecil ada (1%- 5%)	Kemungkinan ada cukup besar (5% - 10%)	Kemungkinan ada besar (10% - 15%)	Kemungkinan sangat besar (diatas 15%)	
		d2	Estimasi total kerugian yang mungkin timbul dibandingkan dengan modal bank	Rasio 0 - 20%	Rasio 21 - 40%	Rasio 41 - 60%	Rasio 61 - 80%	Rasio 81 - lebih dari 100%	0
2.	Faktor Kelemahan Perikatan	a	Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian kredit.	Semua persyaratan syahnya perjanjian kredit telah terpenuhi (100%)	Hampir semua persyaratan syahnya perjanjian kredit telah terpenuhi (mendekati 100%)	Hampir semua persyaratan syahnya perjanjian kredit telah terpenuhi kecuali ada beberapa klausul yang belum (sd 95%)	Sebagian persyaratan syahnya perjanjian kredit telah terpenuhi dan sebagian lainnya belum (sd 90%)	Hampir semua persyaratan syahnya perjanjian kredit tidak terpenuhi (dibawah 90%)	0
		b	Terdapat kelemahan	Tidak ada kelemahan	Hampir tidak ada kelemahan	Kelemahan klausula perjanjian	Kelemahan klausula perjanjian	Banyak sekali kelemahan	0

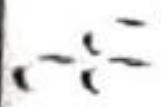
 BANK MALUKU <i>Sila Berpacu</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	Hal. 112			
	Tanggal 31/12/2012					
NAMA BAB						
		klausula perjanjian dan/atau tidak terpenuhinya persyaratan yang telah disepakati.	klausula perjanjian, semua persyaratan telah disepakati (0%)	klausula perjanjian, semua persyaratan telah disepakati beberapa hal tapi tidak prinsip (mendekat: 100%)	jian banyak, belum semua persyaratan telah disepakati dan prinsip (sd 90%)	klausula perjanjian, semua persyaratan belum/ tidak disepakati (dibawah 90%)
	c	Pemahaman para pihak terkait dengan perjanjian, terutama mengenai risiko-risiko yang ada dalam suatu transaksi yang kompleks dan menggunakan istilah-istilah yang sulit dipahami atau tidak lazim bagi masyarakat umum.	sangat paham (tidak terdapat pertanyaan dari para pihak pada saat penandatanganan perjanjian)	paham (terdapat 1-2 pertanyaan dari para pihak)	cukup paham (terdapat 3-4 pertanyaan dari para pihak)	tidak paham (lebih dari 6 pertanyaan dari para pihak)
						0

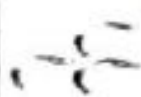
 BANK MALUKU <i>Solo Bina</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP		BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO		Hal. 114
	Tanggal 31/12/2012				
NAMA BAB					
Rata-rata Risiko Hukum					0

 BANK MALUKU <i>Satya Bhakti</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	Hal. 115
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

5. RISIKO STRATEGI

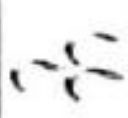
No	Uraian	Low	Low-Moderate	Moderate	Moderate-High	High	Score
		R < 1 (Nilai 1)	1 < R ≤ 2 (Nilai 2)	2 < R ≤ 3 (Nilai 3)	3 < R ≤ 4 (Nilai 4)	R > 4 (Nilai 5)	
1.	Pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB)	Realisasi RBB melampaui RBB (diatas 100%)	Realisasi RBB sesuai dengan RBB (100%)	Realisasi RBB hampir mencapai RBB (95%)	Realisasi RBB mendekati RBB (90%)	Realisasi RBB jauh dari pencapaian RBB (dibawah 90%)	0
Rata-rata Pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB)							
2.	Review terhadap independen unit pengelolaan AP Bermasalah (workout unit)	Kinerja sangat baik dengan hasil realisasi yang sangat signifikan (100% ditangani). Perubahan dilakukan diatas 4 tahun sekali	Kinerja baik dan hasil realisasi yang signifikan (antara 91% - 95% ditangani).	Kinerja cukup baik dan hasil realisasi yang cukup signifikan (antara 86% - 90%).	Kinerja kurang baik dan hasil realisasi yang kurang signifikan (antara 80% - 85%).	Kinerja tidak baik dan hasil realisasi tidak signifikan (dibawah 81%).	0
3.	Perubahan Organisasi	Perubahan dilakukan diatas 4 tahun sekali	Perubahan dilakukan 3 tahun sekali	Perubahan dilakukan 2 tahun sekali	Perubahan dilakukan 1 tahun sekali	Perubahan dilakukan dibawah 1 tahun	0
Rata-rata review dan perubahan organisasi							
							0

 BANK MALUKU <i>Sila Kalsepa</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	Hal. 116
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			
		Rata-rata Risiko Strategi	
			0

 BANK MALUKU <i>Sila Zikir</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	Hal. 117
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

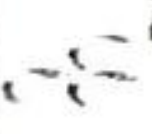
6. RISIKO KEPATUHAN

No		Uraian	Low	Low-Moderate	Moderate	Moderate-High	High	Score
			R ≤ 1.5 (Nilai 1)	1.5 < R ≤ 2.5 (Nilai 2)	2.5 < R ≤ 3.5 (Nilai 3)	3.5 < R ≤ 4.5 (Nilai 4)	R > 4.5 (Nilai 5)	
1.	Frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau <i>track record</i> kepatuhan bank	a Jenis dan frekuensi pelanggaran yang sama yang ditemukan setiap tahunnya dalam 3 tahun terakhir.	Tidak pernah terjadi pelanggaran dalam 3 tahun terakhir (0%)	Sekali-kali terjadi pelanggaran dalam 3 tahun terakhir, walaupun jenis dan jumlahnya pelanggaran dibawah 1%	Cukup sering terjadi pelanggaran dalam 3 tahun terakhir dengan jenis dan frekuensi yang cukup banyak (1% - <3%)	Sering terjadi pelanggaran dalam 3 tahun terakhir dengan jenis dan frekuensi pelanggaran yang banyak (>3% - <5%)	Sangat sering terjadi pelanggaran dalam 3 tahun terakhir dengan jenis dan frekuensi yang sangat banyak (diatas 5%)	0

 BANK MALUKU <i>Sesuai</i>		SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP		BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO		Hal. 118	
		Tanggal 31/12/2012					
NAMA BAB							
b				Signifikansi tindak lanjut bank atas temuan tersebut.		Tidak pernah dilakukan tindak lanjut bank atas temuan, karena tidak pernah ada temuan atas pemeriksaan (0%)	
						Sekali-sekali dilakukan tindak lanjut bank atas temuan, walaupun temuan atas pemeriksaan hanya ber-sifat administratif (dibawah 1%)	
						Pernah dilakukan tindak lanjut bank atas temuan, karena ada beberapa temuan atas pemeriksaan namun tidak merugikan Bank (1% - <3%)	
						Sering dilakukan tindak lanjut bank atas temuan, walaupun ada beberapa yang belum dapat dilakukan tindak lanjutnya karena cukup material (3% - <5%)	
						Sangat sering dilakukan tindak lanjut bank atas temuan, karena pemeriksaan sangat banyak dan material (diatas 5%)	
						0	
Rata-rata Frekuensi Pelanggaran Yang Dilakukan atau Track Record Kepatuhan Bank						0	
2.		Perilaku yang mendasari pelanggaran	Dalam hal ini dilihat adalah perilaku yang mendasari terjadinya pelanggaran terutama apakah hal ini merupakan suatu kesalahan yang dikarenakan kelalaian atau suatu perbuatan	Tidak pernah dilakukan pelanggaran, baik karena kelalaian maupun kesengajaan (0%)	Kadang-kadang terjadi pelanggaran, namun merupakan pelanggaran karena ketidaksengajaan / kelalaian (dibawah 1%)	Cukup sering terjadi pelanggaran dan pelanggaran dilakukan karena ketidaksengajaan / kelalaian (1% - <3%)	Sering terjadi pelanggaran dan pelanggaran, baik dilakukan karena ketidaksengajaan / kelalaian maupun karena kesengajaan (diatas 5%)
							0

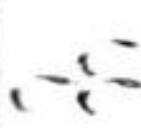
Rata-rata Perilaku Yang Mendasari Pelanggaran

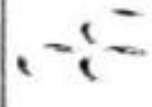
Rata-rata Pelanggaran Terhadap Ketentuan atas Transaksi Keuangan Tertentu

 BANK MALUKU <i>Solo Solopé</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	Hal. 120					
	Tanggal 31/12/2012							
NAMA BAB								
		kebijakan dan prosedur tersedia).	Kebijakan dan Prosedur yang diwajibkan).	dari kewajiban Kebijakan dan Prosedur yang diwajibkan).	Kebijakan dan Prosedur yang diwajibkan).	kewajiban Kebijakan dan Prosedur yang diwajibkan).		
	b	Sistem Kaji Ulang (review) internal terhadap Aktiva Produktif	Sangat memadai, komprehensif, dilaksanakan secara berkala dan konsisten oleh pihak (unit kerja) yang independen (dilakukan setiap 6 bulan)	Memadai, Komprehensif, dilak sanakan secara berkala dan cukup konsisten oleh pihak (unit kerja) yang independen (dilakukan setiap 9 bulan)	Cukup memadai, cukup komprehensif, dilaksanakan secara berkala oleh pihak (unit kerja) yang independen (dilakukan setiap 12 bulan)	Kurang memadai, kurang komprehensif, tidak dilaksanakan secara berkala oleh pihak (unit kerja) yang kurang independen (dilakukan setiap 15 bulan).	Tidak memadai, tidak komprehensif, tidak dilaksanakan secara berkala oleh pihak (unit kerja) yang tidak independen (dilakukan diatas 15 bulan sekali dan kadang-kadang 24 bulan sekali)	0
Rata-rata Kecukupan kebijakan dan prosedur terhadap Aktiva Produktif							0	
5.	Dokumentasi Aktiva Produktif	Dokumentasi Aktiva Produktif	Dokumentasi sangat memadai, dan lengkap, dan sangat	Dokumentasi memadai, dan lengkap, dan informatif (diatas 95%).	Dokumentasi cukup memadai, cukup lengkap, dan cukup	Dokumentasi kurang memadai, kurang lengkap, dan kurang informatif (80%)	Dokumentasi tidak memadai, tidak lengkap, dan tidak informatif (dibawah 80%).	0

 BANK MALUKU <i>Sila Wabisa</i>		SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP		BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP)		Hal. 121
		Tanggal 31/12/2012		AUDIT BERBASIS RISIKO		
NAMA BAB						

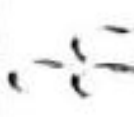
Rata-rata Dokumentasi Aktiva Produktif						
				informatif (100% tersedia)	Informatif (antara 86% - 95%).	- 85%).
6.	<i>Quality Assurance Findings:</i>	a	Kecukupan kebijakan dan prosedur	Seluruh proses mempunyai kebijakan dan prosedur (100%)	Minimal 80% proses mempunyai kebijakan dan prosedur	51% - 80% proses mempunyai kebijakan dan prosedur
		b	Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur	Seluruh petugas mematuhi seluruh kebijakan dan prosedur yang dimiliki (100%)	Sebagian besar petugas mematuhi sebagian besar kebijakan dan prosedur (95%)	Sekitar 90% petugas mematuhi sebagian besar kebijakan dan prosedur (85%)
		c	Efektivitas pemisahan fungsi organisasi	Seluruh bagian organisasi telah menjalankan fungsinya dengan baik (100%)	Sebagian besar bagian organisasi telah menjalankan fungsinya dengan baik (95%)	Sebagian kecil bagian organisasi telah menjalankan fungsinya dengan baik (85%)

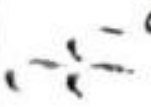
 BANK MALUKU <i>Sila Klatipae</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP		BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP)		Hal. 122	
	Tanggal 31/12/2012		AUDIT BERBASIS RISIKO			
NAMA BAB						
	d	Efektivitas pengawasan operasional	Pengawasan telah dilakukan secara sangat efektif (100% dilaksanakan)	Pengawasan telah dilakukan secara cukup efektif (91% sd 95%)	Pengawasan yang minim/ kurang (85% sd 90%)	Pengawasan yang dilakukan sangat minim (dibawah 85%)
	e	Management Concern	Manajemen perhatian sekali terhadap hasil audit SKAI, setiap hasil audit langsung ditindaklanjuti dan hadir saat persentasi (exit meeting hasil audit di cabang)	Manajemen cukup perhatian sekali terhadap hasil audit SKAI, setiap hasil audit ditindaklanjuti walaupun pelaksanaannya perlu waktu 2 bulan dan hadir saat persentasi (exit meeting hasil audit di cabang)	Manajemen kurang perhatian sekali terhadap hasil audit SKAI, setiap hasil audit ditindaklanjuti walaupun pelaksanaannya perlu waktu 3 bulan dan hadir saat persentasi (exit meeting hasil audit di cabang)	Manajemen tidak ada perhatian sama sekali terhadap hasil audit SKAI, setiap hasil audit tidak ditindaklanjuti dengan baik dan tidak hadir saat persentasi (exit meeting hasil audit di cabang)
			Rata-rata Quality Assurance Findings			
			Rata-rata Risiko Kepatuhan			

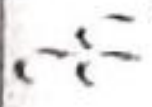
 BANK MALUKU <i>Sila Kaitani</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO		Hal. 123
	Tanggal 31/12/2012			
NAMA BAB				

7. RISIKO REPUTASI

No	Uraian	Low	Low-Moderate	Moderate	Moderate-High	High	Score
		$R \leq 1.5$ (Nilai 1)	$1.5 < R \leq 2.5$ (Nilai 2)	$2.5 < R \leq 3.5$ (Nilai 3)	$3.5 < R \leq 4.5$ (Nilai 4)	$R > 4.5$ (Nilai 5)	
1.	Frekuensi, materialitas dan eksposur pemberitaan negatif Bank a	Frekuensi dan materialitas pemberitaan negatif, tidak ada (0%)	Frekuensi dan materialitas pemberitaan negatif, kadang2 terjadi, namun tidak material sehingga tidak mengganggu kredibilitas perusahaan (dibawah 1%)	Frekuensi dan materialitas pemberitaan negatif, agak sering terjadi sehingga mengganggu kredibilitas perusahaan (1% - <3%)	Frekuensi dan materialitas pemberitaan negatif, sering terjadi sehingga mengganggu kredibilitas perusahaan (3% - <5%)	Frekuensi dan materialitas pemberitaan negatif, sangat sering terjadi sehingga sangat mengganggu kredibilitas perusahaan (diatas 5%)	0

 BANK MALUKU <i>Sila Sila</i>		SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	Hal. 124					
NAMA BAB		Tanggal 31/12/2012							
		b	Jenis media dan ruang lingkup pemberitaan negatif	Jenis media dan ruang lingkup pemberitaan negatif, hanya sedikit (ada beberapa) dan pemberitaan negatif kadang2 ada namun tidak mengganggu kredibilitas Bank (dibawah 1%)	Jenis media dan ruang lingkup pemberitaan negatif, cukup banyak dan pemberitaan negatif cukup meng-ganggu kredibilitas Bank (1% - <3%)	Jenis media dan ruang lingkup pemberitaan negatif, banyak dan pemberitaan negatif mengganggu kredibilitas Bank (3% - <5%)	Jenis media dan ruang lingkup pemberitaan negatif, sangat banyak dan pemberitaan negatif sangat meng-ganggu kredibilitas Bank (diatas 5%)	0	
		Rata-rata Frekuensi, Materialitas dan Eksposur Pemberitaan Negatif Bank							0
2.	Frekuensi dan materialitas keluhan nasabah	a	Frekuensi keluhan nasabah	Frekuensi keluhan nasabah ada beberapa namun pelayanan masih prima (dibawah 1%)	Frekuensi keluhan nasabah cukup banyak karena pelayanan kadang2 kurang prima (1% - <3%)	Frekuensi keluhan nasabah banyak karena pelayanan yang kurang prima (3% - <5%)	Frekuensi keluhan nasabah banyak sekali karena pelayanan yang tidak baik (diatas 5%)	0	

 BANK MALUKU <i>Sila Sapa</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP		BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO			Hal. 125		
	Tanggal 31/12/2012							
NAMA BAB								
			Materialitas b	Keluhan nasabah tidak materi dan tidak meng ganggu Bank (0%)	Keluhan nasabah kurang materi, namun cukup mengganggu Bank (dibawah 1%)	Keluhan nasabah cukup materi dan mengganggu Bank (1% - <3%)	Keluhan nasabah sangat material dan sangat mengganggu Bank (didas 5%)	0
Rata-rata Frekuensi dan Materialitas Keluhan Nasabah								
Rata-rata Risiko Reputasi								
0								

 BANK MALUKU <i>Sila Sahaja</i>	SK DIREKSI NOMOR DIR/131/KP	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	Hal. 126
	Tanggal 31/12/2012		
NAMA BAB			

No.	JENIS RISIKO	WEIGHT (W)	SCORE-RATING (R)	SCORE-AKHIR (WxR)
1	R. KREDIT	20%	0	0
2	R. LIKUIDITAS	15%	0	0
3	R. OPERASIONAL	15%	0	0
4	R. HUKUM	15%	0	0
5	R. STRATEJIK	15%	0	0
6	R. KEPATUHAN	10%	0	0
7	R. REPUTASI	10%	0	0
	<i>RISK LEVEL</i>			0
	HSL ASSESSMENT			LOW RISK

	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	KP.DIREKSI Nomor : Tanggal :	Halaman : 127
--	--	------------------------------------	------------------

B. PETUNJUK PENGISIAN RISK ASSESSMENT

1. Untuk menentukan besarnya risiko pada suatu auditee digunakan risk factor sebagai parameternya.
2. Setiap risk factor bias terdiri dari beberapa sub risk factor; demikian pula sub risk factor bisa terdiri dari beberapa sub sub risk factor.
3. Jumlah total bobot risk factor adalah 100.
4. Total bobot sub risk factor adalah sebesar bobot risk factornya, misalnya bobot risk factor adalah 15, sementara risk factor mempunyai 3 sub sub risk factor, maka total sub sub risk factor 1 sampai dengan 3 adalah 15.
5. Score adalah nilai masing-masing risk factor berdasarkan hasil assessment dengan skala 1 sampai dengan 5. Nilai 1 menunjukkan risiko terendah = Low; nilai 2 menunjukkan risiko terendah menuju menengah = Low to Moderate; nilai 3 menunjukkan risiko menengah = Moderate; nilai 4 menunjukkan risiko menengah menuju tinggi = Moderate to High; dan nilai 5 menunjukkan risiko tertinggi = High.
6. Hasil perkalian antara bobot risk factor dengan dengan score-nya adalah level risiko.
7. Semakin rendah hasil dari level risiko maka semakin rendah pula risikonya. Sebaliknya, semakin tinggi hasil level risiko menunjukkan semakin tingginya tingkat risiko.
8. Setelah diketahui level risiko dari masing-masing auditee, makaa dapat dilakukan penetapan pemeriksaan/audit berdasarkan unit/auditee yang mempunyai level risiko paling besar dan berturut-turut auditee yang mempunyaia level risiko berikutnya, sampai yang paling rendah risikonya.
9. Prioritas pemeriksaan/audit dilakukan terhadap unit/auditee yang mempunyai level risiko yang paling tinggi.

	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	KP. DIREKSI Nomor : Tanggal :	Halaman : 128
10. Demikian seterusnya sampai kepada auditee yang pantas untuk dilakukan pemeriksaan/audit atau bila level risikonya sangat rendah (Low) boleh dilakukan pemeriksaan secara partial terhadap aktivitas yang mempunyai risiko tinggi atau tidak dilakukan pemeriksaan untuk tahun berjalan.			

BUKU PEDOMAN
PERUSAHAAN
(BPP)
AUDIT BERBASIS RISIKO

KP. DIREKSI
Nomor :
Tanggal :

Halaman :
129

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran-1

KERTAS KERJA AUDIT (KKA-1)

Tanggal

Nama

Paraf

Ktr Pusat/Cabang :

Kegiatan :

Tahun Pemeriksaan :

Dibuat oleh :

Diperiksa oleh :

Halaman No.: dari :

Program
Audit No.

KONDISI

1

PENJELASAN CARA PENGISIAN
KERTAS KERJA AUDIT MODEL - 1

1. Data pokok pada judul KKA - 1
 - a. Kantor Pusat/Cabang : Diisi dengan nama unit organisasi yang diperiksa, misalnya: Divisi Umum dan Sumber Daya Manusia, Kantor Cabang Lahat, dll.
 - b. Kegiatan : Diisi dengan jenis kegiatan/aktivitas yang diperiksa, misalnya: aktivitas Kas, Umum & Akuntansi, Pemasaran, dll.
 - c. Tahun Pemeriksaan : Tahun dari data/informasi kegiatan/aktivitas yang diperiksa.
 - d. Dibuat oleh :
 - ♦ Nama : Diisi dengan nama auditor yang mengerjakan KKA.
 - ♦ Paraf : Cukup jelas.
 - ♦ Tanggal : Diisi dengan tanggal KKA yang dikerjakan.
 - e. Diperiksa oleh :
 - ♦ Nama : Diisi dengan nama auditor yang memeriksa KKA (dhi. Kepala Tim).
 - ♦ Paraf : Cukup jelas.
 - ♦ Tanggal : Diisi dengan tanggal KKA diperiksa oleh Kepala Tim.
 - f. Halaman no. : Diisi dengan nomor halaman KKA.
 - g. Dari : Diisi dengan jumlah seluruh halaman KKA untuk kegiatan/aktivitas tersebut. Misalnya, 2/6 artinya KKA halaman ke-2 dari KKA yang seluruhnya berjumlah 6 halaman.
2. No. Program Pemeriksaan :

Diisi dengan nomor urutan Program Audit dari suatu kegiatan atau aktivitas cfm. Program Pemeriksaan.
3. Kondisi : Digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu kegiatan atau aktivitas yang sedang diperiksa.

Halaman :
131

Lampiran-2

KERTAS KERJA AUDIT (KKA) - 2
UJI KETAATAN

Nama	Paraf	Tgl
------	-------	-----

Kantor Pusat/Cabang :
 Kegiatan :
 Tahun Audit :

Dilawat oleh
Diperiksa oleh

Halaman No : dari

[illegible]

	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	KP.DIREKSI Nomor : Tanggal :	Halaman : 132
--	---	------------------------------------	------------------

**PENJELASAN CARA PENGISIAN
KERTAS KERJA AUDIT MODEL – I**

1. Data pokok pada judul KKA – 2
Idem dengan KKA – 1.
2. Kolom
 - ♦ Nomor : Diisi dengan nomor urut.
 - ♦ Sampel : Diisi dengan sampel yang dipilih, misalnya : nomor voucher, nomor KU, dsb.
 - ♦ Karakter PP : Diisi dengan karakter kegiatan/aktivitas cfm. Program Audit
 - ♦ Jumlah : Diisi dengan jumlah hasil pada tiap-tiap sampel dan dinyatakan dengan tanda :
 - V = sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - X = Tidak sesuai dengan ketentuan.
 - TB = Tidak berlaku dari suatu ketentuan.

Tanda yang dicantumkan pada tiap sampel, dijumlahkan ke bawah dan ke samping.
 Dari hasil penjumlahan ke bawah menunjukkan pengendalian yang diuji, sedangkan hasil penjumlahan ke samping menunjukkan penerapan.
3. Keterangan : Cukup jelas.
4. Simpulan : Cukup jelas.

Halaman :
133

KERTAS KERJA AUDIT (KKA) - 3
UJI KEBENARAN

<u>Nama</u>	<u>Paraf</u>	<u>Tgl</u>
-------------	--------------	------------

Dibuat oleh _____
P. 07070600001049840000000000000000

Diperiksa oleh:

Halaman No.: dari

[illegible]

	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	KP. DIREKSI Nomor : Tanggal :	Halaman : 134
--	--	--	--------------------------

**PENJELASAN CARA PENGISIAN
KERTAS KERJA AUDIT MODEL – 3**

1. Data pokok pada judul KKA - 3
Idem dengan KKA – 1
2. Kolom
 - a. Nomor : Diisi dengan nomor urut.
 - b. Sampel : Diisi dengan sampel yang dipilih.
Nama-nama sampel ini harus sesuai dengan nama sampel yang tercantum dalam KKA-2.
 - c. Lajur ke-3 dst. : Diisi dengan karakter yang akan diuji, misalnya: nominal, tarif, dll.
3. Keterangan : Cukup jelas.

KERTAS KERJA AUDIT

Paraf

Halaman No.: dari :

[illegible]

**BUKU PEDOMAN
PERUSAHAAN
(BPP)
AUDIT BERBASIS RISIKO**

KP. DIREKSI
Nomor :
Tanggal :

**Halaman :
136**

PENJELASAN CARA PENGISIAN

KERTAS KERJA AUDIT MODEL - 4

1. Data pokok pada judul KKA - 4
Idem dengan KKA - 1
2. Kolom
 - a. Ref. : Diisi dengan nomor referensi dan halaman dari KKA serta temuan pemeriksaan berasal.
 - b. Kondisi : Diisi dengan temuan (keberhasilan atau penyimpangan atau pelanggaran) yang menurut Auditor perlu dijadikan bahan diskusi dengan unit yang diperiksa yang bersumber dari KKA - 1, KKA - 2, dan KKA - 3.
 - c. Keterangan : Diisi dengan catatan Kepala Tim tentang materi tersebut atau catatan pemeriksa pada waktu diskusi.

	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	KP.DIREKSI Nomor : Tanggal :	Halaman : 137
--	---	------------------------------------	------------------

Lampiran-5

LAPORAN PERSIAPAN AUDIT KANTOR CABANG

Sesuai Rencana Audit Tahun dan Penunjukan Tim Audit Cabang yang direncanakan dimulai tanggal sampai dengan..... dengan ini kami sampaikan Laporan Persiapan Audit sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

A. Tujuan Audit

Mengarah pencapaian tujuan audit dalam Rencana Audit Tahunan.

B. Sifat Audit

Bersifat Audit Umum atau Audit Khusus.

C. Periode Audit

Cukup jelas.

II. HASIL AUDIT TAHUN LALU

A. Profil Risiko dan hasil audit tahun lalu.

Profil Risiko tahun lalu "L/L-M/M/M-H/H", adapun permasalahan per masing-masing elemen ialah sebagai berikut :

1. Kredit (L/L-M/M/M-H/H)" =
2. Likuiditas (L/L-M/M/M-H/H)" =
3. Operasional (L/L-M/M/M-H/H)" =
4. Hukum (L/L-M/M/M-H/H)" =
5. Kepatuhan (L/L-M/M/M-H/H)" =
6. Strategik (L/L-M/M/M-H/H)" =
7. Reputasi (L/L-M/M/M-H/H)" =

B. Tindak Lanjut Hasil Audit Tahun Lalu

(Cukup jelas)

C. Disposisi Direksi

(Cukup jelas)

III. PERKEMBANGAN SELAMA PERIODE PEMERIKSAAN

A. Risiko Kredit : Membahas perkembangan komopenen risiko kredit yang diperiksa.

B. Risiko Likuiditas : Membahas seberapa kompleks komponen risiko likuiditas

- C. Risiko Operasional : Membahas seberapa kompleks komponen risiko operasional
- D. Risiko Hukum : Membahas seberapa kompleks komponen risiko hukum yang diperiksa
- E. Risiko Strategik : Membahas seberapa kompleks komponen risiko hukum yang diperiksa.
- F. Risiko Kepatuhan : Membahas seberapa kompleks komponen risiko kepatuhan yang diperiksa.
- G. Risiko Reputasi : Membahas seberapa kompleks komponen risiko reputasi yang diperiksa

IV. DATA PENDUKUNG LAINNYA

Berisi penjelasan data lain di luar Sistem yang dipergunakan untuk mendukung risk assessment, misalnya: perubahan teknologi dan struktur organisasi, sehingga mengakibatkan perubahan lingkungan pengendalian.

V. RISK ASSESSMENT

1. Risk factor
Sesuai risk factor dalam risk based audit.
2. Klasifikasi Risiko

Risiko diklasifikasikan menjadi :

a. High Risk

Aktivitas, unit atau transaksi yang mempunyai risiko bawaan (*level of significant*) yang tinggi, namun mempunyai frekuensi kejadian yang rendah (*likelihood of occurance*) sehingga membutuhkan pengendalian intern yang kuat dan supervisi yang kuat di luar organisasi untuk meminimalkan *detection risk*.

b. Moderate to High Risk

Aktivitas, unit atau transaksi yang mempunyai risiko bawaan (*level of significant*) yang sedang dan mempunyai frekuensi kejadian yang sedang pula (*likelihood of occurance*) sehingga membutuhkan pengendalian intern yang kuat dan supervisi yang cukup kuat di luar organisasi untuk meminimalkan *detection risk*.

	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	KP.DIREKSI Nomor : Tanggal :	Halaman : 139
--	--	------------------------------------	------------------

c. Moderate Risk

Aktivitas, unit atau transaksi yang mempunyai risiko bawaan (*level of significant*) yang rendah, namun mempunyai frekuensi kejadian yang tinggi (*likelihood of occurrence*) sehingga membutuhkan pengendalian intern yang mencukupi dan supervisi dari unit organisasi (*normal*) secara intensif untuk mengurangi detection risk.

d. Low to Moderate Risk

Aktivitas, unit atau transaksi yang mempunyai risiko bawaan (*level of significant*) yang sedang dan mempunyai frekuensi kejadian yang sedang pula (*likelihood of occurrence*) sehingga diperlukan pengendalian intern dan supervisi yang sedang.

e. Low Risk

Aktivitas, unit atau transaksi yang mempunyai risiko bawaan (*level of significant*) yang rendah dan mempunyai frekuensi kejadian yang rendah (*likelihood of occurrence*) sehingga hanya diperlukan pengendalian intern dan supervisi yang dibutuhkan rendah, bahkan tidak dibutuhkan karena tidak berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi.

3. Risk Classification and Audit Time Frame

<u>Risk classification</u>	<u>Risk Range</u>
High Risk	$R > 4.55$
Moderate to High Risk	$3.55 < R \leq 4.5$
Moderate Risk	$2.5 < R \leq 3.5$
Low to Moderate Risk	$1.5 < R \leq 2.5$
Low Risk	$R \leq 1.5$

4. Risk Assessment

Diuraikan tentang pelaksanaan risk assessment yang telah dilakukan oleh unit yang diperiksa.

VI. RENCANA AUDIT

A. Fokus dan Ruang Lingkup Audit

Membahas fokus audit dan ruang lingkup pemeriksaan untuk mencapai tujuan pemeriksaan berdasarkan hasil risk assessment.

B. Prosedur Audit

	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	KP DIREKSI Nomor : Tanggal :	Halaman : 140
--	---	------------------------------------	------------------

1. Metoda Audit

Cukup jelas.

2. Program Audit

Menjelaskan program audit yang dibuat/disusun/berubah sesuai hasil risk assessment.

3. Metode Sampling

Menjelaskan metoda sampling yang dipergunakan berikut sampel yang diambil dan jika memungkinkan dengan berdasarkan hasil risk assessment, laporan keuangan, saldo list, hasil CAAT's dan pemeriksaan Kontrol Intern Cabang.

C. Susunan Tim dan jadwal Waktu Audit

1. Susunan Tim sesuai dengan surat penunjukkan beserta pembagian tugas masing-masing anggota Tim.

2. Jadwal Waktu Pemeriksaan (Terlampir)

D. Anggaran Biaya Audit (terlampir)

E. Susunan Tim dan Waktu Audit

F. Susunan Tim dan waktu audit didasarkan kepada hasil risk assessment, sehingga aktivitas dengan klasifikasi risiko yang tinggi akan mempunyai waktu pemeriksaan lebih banyak dan diaudit oleh auditor yang lebih berkompetensi dibanding klasifikasi risiko yang lebih rendah.

Catatan:

Aktivitas dengan klasifikasi low risk tidak dilakukan pemeriksaan dan klasifikasi risiko.

Demikian Laporan Pemeriksaan Audit kami untuk mendapat persetujuan dan pengarahannya Pemimpin.

.....

Tim Audit,

(Nama Ketua Tim)

Ketua Tim

**BUKU PEDOMAN
PERUSAHAAN
(BPP)
AUDIT BERBASIS RISIKO**

KP. DIREKSI
Nomor
Tanggal

Halaman
141

VII. PETUNJUK/PENGARAHAN PEMIMPIN

A. PEMIMPIN KELOMPOK AUDITOR/AUDITOR SENIOR

B. PEMIMPIN SATUAN KERJA AUDIT INTERN

VII. LAMPIRAN

- A. Program Audit
- B. Sampling Audit
- C. Anggaran Biaya
- D. Jadwal Waktu Pemeriksaan

**BUKU PEDOMAN
PERUSAHAAN
(BPP)
AUDIT BERBASIS RISIKO**

KP.DIREKSI
Nomor :
Tanggal :

Halaman :
142

Lampiran-6

**RENCANA WAKTU AUDIT
UNIT YANG DIAUDIT (1)
TAHUN (2)**

HK (5)	BLN (6)	HP (7)	11	12	13	14	15	16	17	17	18	19	20	21	WAKTU		PARAF	
			1	2	3	4	5	Sb	Ma	6	7	8	9	10	ANGG (8) (10K)	REAL (9) (10K)	AUDITOR (10)	KET. TIM (11)
			FEBRUARI 20.....															
Ketua Tim	A. Persiapan Audit																	
	- Pengumpulan data																	
	- Penyels Laporan Audit																	
	B. Perjalanan (berangkat & kembali)																	
	C. Pelaksanaan Audit																	
Auditor 1																		
Auditor 2																		
Auditor 3																		
Auditor 4																		
Auditor 5																		
	D. Persiapan Diskusi																	
	E. Diskusi/Exit Meeting																	
	F. Perjalanan Pulang																	
	G. Penyerahan LRA																	

HK = HARI KALENDER

HP = HARI PEMERIKSAAN

..... (17) (17)
SKAI (18) KETUA TIM (19)

TOTAL WAKTU PEMERIKSAAN	(12)	(13)
TOTAL WAKTU MENURUT PKAT	(14)	(15)
SELISIH WAKTU	(16)	(17)

	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	KP. DIREKSI Nomor : Tanggal :	Halaman : 143
--	---	-------------------------------------	------------------

**PENJELASAN CARA PENGISIAN
 RENCANA WAKTU AUDIT**

- (1). Diisi nama Divisi/Kantor Cabang.
- (2). Diisi tahun pelaksanaan audit.
- (3). Diisi nama Auditor sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.
- (4). Diisi rincian kegiatan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan audit sampai dengan penyusunan laporan.
- (5). Diisi tanggal audit, mulai dari tahap persiapan sampai dengan penyusunan laporan.
- (6). Diisi bulan dilaksanakannya audit.
- (7). Diisi hari kerja pemeriksaan/audit, mulai dari tahap persiapan s/d penyusunan laporan.

Hari kerja yang direncanakan untuk melaksanakan setiap kegiatan (dengan men-cantumkan tanda XX pada lajur ini).

Catatan :

Untuk perjalanan yang dapat ditempuh dalam waktu singkat, hari perjalanan masuk dalam Hari Kerja pemeriksaan/audit.

- (8). Diisi jumlah hari kerja yang direncanakan untuk setiap kegiatan.

Catatan :

Rencana waktu perjalanan berangkat dan perjalanan kembali tidak dicantumkan dalam kolom ini, agar tidak masuk dalam total waktu pemeriksaan.

- (9). Diisi jumlah hari kerja yang digunakan untuk menyelesaikan setiap kegiatan (realisasi hari kerja).

Catatan :

Realisasi waktu perjalanan berangkat dan perjalanan kembali tidak dicantumkan dalam kolom ini, agar tidak masuk dalam total waktu pemeriksaan.

- (10). Diisi paraf pemeriksa setelah setiap kegiatan pemeriksaan selesai dilaksanakan.
- (11). Diisi paraf kontrol Kepala Tim, setelah setiap kegiatan selesai dilaksanakan.
- (12). Diisi total rencana waktu pelaksanaan pemeriksaan/audit.
- (13). Diisi total realisasi waktu pelaksanaan pemeriksaan/audit.
- (14). Diisi total waktu pemeriksaan menurut PKAT.

	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	KP.DIREKSI Nomor : Tanggal :	Halaman : 144
--	--	------------------------------------	------------------

Catatan :

Tidak termasuk perjalanan berangkat dan perjalanan kembali (pulang) yang ada di luar waktu pemeriksaan.

- (15). Diisi selisih waktu antara anggaran waktu dengan PKAT.
- (16). Diisi selisih waktu antara realisasi waktu pemeriksaan dengan PKAT.
- (17). Diisi nama tempat dan tanggal persetujuan rencana waktu pemeriksaan.
- (18). Diisi nama dan tanda tangan Pemimpin Satuan Kerja Audit Intern.
- (19). Diisi nama tempat dan tanggal penyusunan rencana waktu pemeriksaan.
- (20). Diisi nama dan tanda tangan Kepala Tim.

	BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO	KP. DIREKSI Nomor : Tanggal :	Halaman : 145
--	---	-------------------------------------	------------------

Lampiran-7

RENCANA ANGGARAN BIAYA AUDIT
 UNIT YANG DIPERIKSA (1) :
 TAHUN (2) :

NO.	NAMA AUDITOR	HARI	JUMLAH HARI	BIAYA PERJALANAN	BIAYA PENGINAPAN	BIAYA TRANSPOR	JUMLAH	REALISASI	SELISIH	CATATAN KEPUA TIM
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1		ILJ								
		HD								
2		ILJ								
		HD								
3		ILJ								
		HD								
4		ILJ								
		HD								
5		ILJ								
		HD								
6		ILJ								
		HD								
TOTAL				(14)	(14)	(14)	(14)	(14)	(14)	
ANGGARAN MENURUT ANGGARAN TAHUNAN SKAI							(15)	(16)	(17)	

CATATAN : (22)

(18)
 SATUAN KERJA AUDIT INTERN, (19)

(20)
 TIM AUDIT (21)

BUKU PEDOMAN
PERUSAHAAN
(BPP)
AUDIT BERBASIS RISIKO

KP. DIREKSI
Nomor :
Tanggal :

Halaman :
146

PENJELASAN CARA PENGISIAN
RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMERIKSAAN/AUDIT

- (1). Diisi nama Divisi/Kantor Cabang
- (2). Diisi tahun pelaksanaan pemeriksaan/audit
- (3). Cukup jelas
- (4). Diisi nama Auditor sesuai surat tugas
- (5). Cukup jelas
- (6). Diisi jumlah hari perjalanan (PP) dan hari dinas yang dianggarkan (termasuk hari libur)
- (7). Diisi jumlah biaya perjalanan dinas yang dianggarkan (sesuai dengan level/kepangkatan)
- (8). Diisi jumlah biaya penginapan yang dianggarkan
- (9). Diisi jumlah biaya transportasi yang dianggarkan
- (10). Diisi penjumlahan kolom 7 + 8 + 9 per masing-masing auditor
- (11). Diisi jumlah realisasi biaya per masing-masing auditor
- (12). Diisi selisih antara kolom 10 dan kolom 11 per masing-masing auditor
- (13). Diisi catatan Kepala Tim mengenai sebab perbedaan antara anggaran dan realisasi biaya (jika realisasi lebih besar dari anggaran biaya)
- (14). Cukup jelas
- (15). Diisi jumlah anggaran biaya tim pemeriksa menurut PKAT
- (16). Diisi total realisasi biaya tim pemeriksa
- (17). Diisi selisih antara kolom 15 dengan kolom 16
- (18). Diisi nama tempat dan tanggal persetujuan rencana anggaran biaya pemeriksaan
- (19). Diisi nama dan tanda tangan Pemimpin Satuan Kerja Audit Intern
- (20). Diisi nama dan tempat dan tanggal penyusunan anggaran biaya pemeriksaan
- (21). Diisi nama dan tanda tangan Kepala Tim
- (22). Diisi catatan atau pendapat Pemimpin Satuan Pengawasan Intern mengenai penggunaan biaya pemeriksaan

Catatan :

Untuk perhitungan biaya pemeriksaan, hari libur dimasukkan dalam hari dinas (HD)

**BUKU PEDOMAN
PERUSAHAAN
(BPP)
AUDIT BERBASIS RISIKO**

KP. DIREKSI
Nomor :
Tanggal :

**Halaman :
147**

Lampiran-8

TEMUAN HASIL AUDIT (THA)

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA
DIVISI/KANTOR CABANG
TAHUN : XXXXX**

**OLEH :
SATUAN KERJA AUDIT INTERN**

BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO		KP DIREKSI Nomor : Tanggal :	Halaman 148
DATA AUDITEE/AUDITOR			
DIVISI/KANTOR CABANG :			
	PEMINPIN	NAMA	PERIODE
1	Pemimpin Divisi/Kantor Cabang		
	- Sekarang		
	- Sebelumnya		
2	Wakil Pemimpin Divisi/Kantor Cab		
	- Sekarang		
	- Sebelumnya		
a. Auditor			
- Ketua Tim			
- Anggota			
- Anggota			
- Anggota			
- Anggota			
b. Waktu Audit :			
c. Periode Audit :			
d. Diskusi :			
e. Pemimpin Diskusi :			
f. Hadir Pada Waktu Diskusi :			

TEMUAN HASIL AUDIT (THA)
 TAHUN

Surat Tugas No. & Tgl : SKAU/..... SKAU/...../R
 Tgl
 Lama Audit : Tgl sd
 Sifat Pemeriksaan : Umum/Khusus

Untuk Perhatian : Kepala Cabang

Halaman

No.	KONDISI	PENJELASAN AUDITEE	TINDAK LANJUT
1	TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN YG LALU		
2	HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN DAN KETAATAN TERHADAP KETENTUAN, SISTEM DAN PROSEDUR YANG BERLAKU A. Pelaksanaan Akuntansi dan pelaporan (Jika ada kasus yang berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan, diungkapkan dalam Sub Bab ini).		

BUKU PEDOMAN PERUSAHAAN (BPP) AUDIT BERBASIS RISIKO		KP.DIREKSI Nomor : Tanggal :	Halaman : 150
--	--	---	------------------

No.	KONDISI	PENJELASAN AUDITEE	TINDAK LANJUT
B.	Pelaksanaan ketaatan terhadap ketentuan: - Bidang Kreditan - Bidang Non Kredit (Jika ada kasus yang berkaitan dengan kegiatan/aktivitas kredit dan non kredit diungkapkan dalam Sub Bab ini)		
III	HASIL PEMERIKSAAN OPERASIONAL		
A.	Daya Guna dan Hasil Guna pelaksanaan Sistem Pengendalian Manajemen (Organisasi, Personalia, Perkreditan, fungsi/kegiatan lainnya, TL dan lain-lain)		
B.	Daya Guna dan Kehematan Dalam Penggunaan Sumber Daya (Portepel Kredit, Aktiva Tetap, Inventaris Kantor, Alat Tulis menulis, dan lain-lain)		
C.	Hasil Guna atau Manfaat Yang Direncanakan (Business Plan, Anggaran dan Realisasi, serta Pemasaran)		

SATUAN KERJA AUDIT INTERN,

BANK PAPUA
Divisi/Kantor Cabang

(.....) (.....)
Ketua Tim Pemimpin Diskusi

(.....)
Kepala Cabang

BUKU PEDOMAN
PERUSAHAAN
(BPP)
AUDIT BERBASIS RISIKO

KP. DIREKSI
Nomor :
Tanggal :

Halaman
151

Lampiran-9

DATA TEMUAN
YANG BERSIFAT ADMINISTRATIF
(TIDAK DIDISKUSIKAN)

DIVISI/KANTOR CABANG :
TAHUN :

Halaman :

No.	KONDISI	PENJELASAN AUDITEE	TINDAK LANJUT
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

SATUAN KERJA AUDIT INTERN,

BANK PAPUA
Divisi/Kantor Cabang

(.....) (.....)
Ketua Tim Pemimpin Diskusi

(.....)
Kepala Cabang